

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan sarana pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan bersama seluruh perangkat daerah selama tahun 2020 sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026. Wujud akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan tidak saja mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari terlaksananya program dan kegiatan yang dirasakan oleh masyarakat, namun pada hal yang lebih mendasar yaitu apakah program dan kegiatan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berdampak pada perubahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara substansif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ini disusun dengan menggunakan data realisasi kinerja yang ada dalam LKjIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Barat. Materi LKjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk Tahun 2021-2026. LKjIP juga memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan dapat dijadikan sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja pemerintah pada masa mendatang.

Berbagai keberhasilan terhadap pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat tidak terlepas dari hasil kerja keras semua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu Aparatur Pemerintah di semua jenjang pemerintahan, pihak swasta dan masyarakat tentunya, baik dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun pengawasannya yang dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, yang telah turut membantu dalam penyelesaian laporan ini, semoga laporan kinerja ini bermanfaat dan dapat menjadi umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat Kutai Barat yang kita cintai.

Sendawar, 24 Maret 2022

BUPATI KUTAI BARAT

The image shows the official seal of the Bupati Kutai Barat, which is a circular emblem containing a Garuda and the text 'BUPATI KUTAI BARAT'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

FX, YAPAN, SH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 yang disahkan pada tanggal 25 Oktober 2021, maka dilakukan reviu terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2021. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut merujuk pada Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 yang menyebutkan “Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dan Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran “, maka pada tanggal 8 Nopember 2021 dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2021, dimana semula terdapat 16 sasaran strategis dan 21 Indikator Kinerja Utama menjadi 9 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama.

Tahun 2021 adalah tahun Pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2021-2026, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan

untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi SAKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam tahun pertama RPJMD 2021 – 2026 ini diukur dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Porformance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian 9 sasaran strategis, dihitung sebagai realisasi kinerja tahunan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja hasil reuiu tahun 2021. Dalam mengukur capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis tersebut, dibantu dengan dukungan indikator-

indikator kinerja setingkat *outcome* yang sebagian besar diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian diperoleh hasil akumulatif dari 9 sasaran strategis dan 23 IKU yang ditetapkan dengan nilai pencapaian akumulatif sebesar **109,57 %** atau termasuk dalam kategori **"MELAMPAUI TARGET (MT)"**. Adapun hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 secara spesifik dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun keempat RPJMD 2021 – 2026 menganalisa dan mengukur 9 sasaran dengan 23 indikator kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 5 sasaran atau sebesar 55,55% dengan Capaian Kinerja Melampaui Target.
 - b. Sebanyak 3 sasaran atau sebesar 33,33 % dengan Capaian Kinerja Sangat Berhasil.
 - c. Sebanyak 1 Sasaran atau 11,11% dengan capaian Kinerja Cukup Berhasil



2. Interpretasi kategori pengukuran indikator kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa :
- Sebanyak 9 Indikator Kinerja Utama atau 39,13 % dengan kategori Melampaui Target.
 - Sebanyak 2 Indikator Kinerja Utama atau 8,70 % dengan kategori Mencapai Target.
 - Sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama atau 52,17% dengan kategori Belum Mencapai Target.



3. Kategori dan nilai capaian pada pengukuran 9 sasaran sebagai berikut :
- Sasaran dengan kategori Melampaui Target (MT), (nilai diatas 100)
 - Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah, dengan capaian 157, 36%;
 - Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru, dengan capaian 142,40 %;
 - Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan, dengan capaian 101,66 %;
 - Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, dengan capaian 100,19%
 - Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan Capaian 126,87%

b. Sasaran dengan kategori Sangat Baik (SB), (nilai 85,00 - 100)

- 1) Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat, dengan capaian 97,83%;
- 2) Kelestarian dan keberlanjutan Lingkungan Hidup dengan capaian 98,32%;
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah daerah, dengan capaian 96,36;

c. Sasaran dengan kategori Cukup Baik (CB), (nilai 55,00 - 69.99)

- 1) Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar, dengan capain 65,14%

Selanjutnya dilihat dari sisi Akuntabilitas Kinerja Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Kabupaten Kutai Barat setelah perubahan APBD 2021 yang ditargetkan berjumlah Rp. 2.247.965.483.906,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.973.323.752.485,71 atau sebesar 87,78%.
2. Total Anggaran Belanja yang ditargetkan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.944.928.475.970,00 Dari target tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.158.396.440.333,79 atau persentase penyerapan belanja sebesar 73,29%.
3. Pada Belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp. 1.632.113.314.267,00 terealisasi Rp. 1.249.691.261.990,73 atau 76,57%.
4. Belanja Modal ditargetkan sebesar Rp 930.735.773.269,00 terealisasi sebesar Rp 597.002.939.452,86 atau 64,14%.
5. Belanja Tidak Terduga ditargetkan sebesar Rp. 80.000.000.000,00 terealisasi Rp. 10.771.008.718,00 atau 13,46%
6. Belanja Transfer ditargetkan Rp. 302.079.388.434,00 realisasi Rp. 300.931.230.172,20 atau 99,62%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT	19
E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	40
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	42
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	42
2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021	51
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	52
2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	55
2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021	57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	60
3.1 CAPAIAN INDIKATOR UTAMA	60
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS	66
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	70
ANALISIS CAPAIAN SASARAN	
SASARAN 1	74
SASARAN 2	91
SASARAN 3	100

SASARAN 4	106
SASARAN 5	122
SASARAN 6	134
SASARAN 7	139
SASARAN 8	176
SASARAN 9	190
BAB IV PENUTUP	206
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah	6
Tabel 1.2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Kampung	21
Table 1.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	23
Tabel 1.4 Luas Wilayah, Jumlah KK, Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan.....	24
Tabel 1.5 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	27
Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah).....	29
Tabel 1.7 PDRB Perkapita Kutai Barat Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah Per Tahun)	31
Tabel 1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018-2021	32
Tabel 1.9 Rincian Jumlah Pegawai /ASN dan Non ASN/PTT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2021	37
Tabel 1.10 Rincian Jumlah Pegawai / ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Gender.....	38
Tabel 1.11 Rincian Jumlah Eselon	38
Tabel 1.12 Rincian Jumlah Pegawai/ASN Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 1.13 Jumlah Tenaga Kerja Kontrak Berdasarkan Pendidikan ..	39
Tabel 1.14 Data Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Pendidikan (Guru)	40
Tabel 1.15 Data Tenaga Kerja Kontrak Tenaga Administrasi Penyelenggara Pendidikan	40
Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	44

Tabel 2.2 Janji Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	46
Tabel 2.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026	50
Tabel 2.4 Penetapan INdikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026	54
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.....	56
Tabel 2.6 Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021	58
Tabel 2.7 Alokasi Anggaran Per Indikator Sasaran Tahun 2021	58
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja Indikator Dalam Skala Pengukuran Ordinal	61
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2021	62
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	63
Tabel 3.4 Jumlah Indikator Per Sasaran	66
Tabel 3.5 Rekapitulasi Capaian Sasaran	67
Tabel 3.6 Pengkategorian Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran	69
Tabel 3.7 Komposisi Belanja Pemerintah Kabupaten	70
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja	71
Tabel 3.9 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran	72
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah Terhadap Perekonomian (PDRB) Tahun 2021	75
Tabel 3.12 Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	78
Tabel 3.13 Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021.....	79
Tabel 3.14 Jumlah Produksi Perkebunan	80
Tabel 3.15 Jumlah Produksi dan Populasi Peternakan	80

Tabel 3.16 Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani dan Penyuluh Tahun 2021.....	81
Tabel 3.17 Produksi Perikanan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018- 2021	84
Tabel 3.18 Jumlah Wisatawan Kutai Barat 2017-2021	86
Tabel 3.19 Jumlah Tempat Wisata, Pengunjung dan Rata-Rata Tarif Masuk	87
Tabel 3.20 Realisasi Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	90
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal Baru	91
Tabel 3.22 Data Perselisihan Hubungan Industrial.....	94
Tabel 3.23 Pencari Kerja Menurut Kelompok Pendidikan	95
Tabel 3.24 Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil	96
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat.....	100
Tabel 3.26 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah)	104
Tabel 3.27 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Persen)	105
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	106
Tabel 3.29 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2021	122
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	123
Tabel 3.31 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah.....	124

Tabel 3.32 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	125
Tabel 3.33 Perkembangan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat	127
Tabel 3.34 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	128
Tabel 3.35 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat	134
Tabel 3.36 Capaian Kinerja Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	134
Tabel 3.37 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	135
Tabel 3.38 Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup	136
Tabel 3.39 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	137
Tabel 3.40 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	139
Tabel 3.41 Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah.....	141
Tabel 3.42 Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021.....	144
Tabel 3.43 Nilai Akip Kabupaten Kutai Barat dari 2018-2020	146
Tabel 3.44 Realisasi Kinerja Sasaran 7 Dibandingkan Target Akhir RPJMD	147
Tabel 3.45 Rincian Penilaian Evaluasi Periode 2018-2020 Akip Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.....	148
Tabel 3.46 Progres Tahun 2021 Atas Tindak Lanjut Rekomendasi Tim Evaluator Kementerian PAN-RB Tahun 2020.....	152

Tabel 3.47 Hasil Audit BPK Terhadap Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017-2020.....	156
Tabel 3.48 Realisasi Kinerja Sasaran 5 Dibandingkan Target Akhir RPJMD	157
Tabel 3.49 Tabel Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD) 2017-2020	162
Tabel 3.50 Nilai Kabupaten Kutai Barat Dari 2017-2019	162
Tabel 3.51 Realisasi Kinerja Sasaran 6 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	163
Tabel 3.52 Progres Perkembangan Kampung	167
Tabel 3.53 Realisasi Indikator Persentase Desa Mandiri	168
Tabel 3.54 Progres Perkembangan IPG Kabupaten.....	174
Tabel 3.55 Realisasi Indikator IPG	174
Tabel 3.56 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dari 3 Indikator Kinerja	176
Tabel 3.57 Cakupan Layanan Air Minum Sistem Perpipaan Perunit Pengolah (WTP, IKK)	178
Tabel 3.58 Data Yang Terfasilitasi SAB	179
Tabel 3.59 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	180
Tabel 3.60 Realisasi Kinerja Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	181
Tabel 3.61 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur	183
Tabel 3.62 Data Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.....	184
Tabel 3.63 Realisasi Kinerja Indikator Prsentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	185
Tabel 3.64 Data Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Jumlah RTLH Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.....	187

Tabel 3.65 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	188
Tabel 3.66 Realisasi Kinerja Indikator Berkurangnya RTLH Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD	188
Tabel 3.67 Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan Dari 2 Indikator Kinerja ...	190
Tabel 3.68 Panjang Jalan di Kabupaten Kutai Barat Menurut Status Tahun 2021.....	192
Tabel 3.69 Rekapitulasi Kondisi Jalan Di Kabupaten	193
Tabel 3.70 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2021.....	194
Tabel 3.71 Realisasi Kinerja Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	195
Tabel 3.72 Jumlah Desa/Kampung Yang Bisa Mengakses Internet Tahun 2021.....	197
Tabel 3.73 Perkembangan Realisasi Dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021.....	198
Tabel 3.74 Realisasi Kinerja Indikator Cakupan Kayanan Telekomunikasi Tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPJMD.....	199
Tabel 3.75 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program dan Kegiatan....	202
Tabel 3.76 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Program Kegiatan	204

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat Setelah Pemekaran Berdasarkan Topografi	20
Grafik 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2021 (Juta Rupiah).....	30
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021.....	31
Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2018-2021	32
Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	65
Grafik 3.2 Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian Dalam Arti Luas Terhadap 2018-2021	79
Grafik 3.3 PDRB Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan Minum) Tahun 2018-2021	89
Grafik 3.4 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	93
Grafik 3.5 Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil	97
Grafik 3.6 Perkembangan PDRB Perkapita	102
Grafik 3.7 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat	125
Grafik 3.8 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	126
Grafik 3.9 Perkembangan Capaian Rata-rata Lama Sekolah	128
Grafik 3.10 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.....	129
Grafik 3.11 Jumlah Sekolah di Kutai Barat	130
Grafik 3.12 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	135
Grafik 3.13 Perkembangan Capaian Usia Harapan Hidup.....	136

Grafik 3.14 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	137
Grafik 3.15 Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020-2021.....	144
Grafik 3.16 Hasil Akip Kabupaten Kutai Barat	147
Grafik 3.17 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun 2017-2020	163
Grafik 3.18 Realisasi Indikator Persentase Desa Mandiri	168
Grafik 3.19 Realisasi Indikator IPG Kabupaten Kutai Barat	175
Grafik 3.20 Perkembangan Realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	180
Grafik 3.21 Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur.....	183
Grafik 3.22 Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021	184
Grafik 3.23 Perkembangan Realisasi Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap	194
Grafik 3.24 Perkembangan Realisasi Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019-2021	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kutai Barat..... 19

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh Pemerintahan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan Pemerintahan daerah yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang pada intinya mengharuskan Pemerintah Kabupaten beserta perangkatnya untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau menyampaikan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** sebagai laporan yang merupakan kewajiban

pelaporan pelaksanaan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sebagai penjabaran dari Perpres Nomor 29 Tahun 2014, Pemerintah membuat petunjuk teknis (juknis) Sistem AKIP berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 ini disusun sehubungan dengan komponen dari Sistem AKIP yakni pelaporan kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan LKjIP Tahun 2021 Kabupaten Kutai Barat berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Dengan demikian LKjIP Kabupaten Kutai Barat menjadi laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden/Wakil Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepada Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2021 yaitu RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5395);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Permenpan No 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikiator Kinerja Utama (IKU)
 10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 5);
12. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 180/832/HK-TU-P/I/2022 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)” kepada Presiden. Dengan demikian maka penyusunan LKjIP ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi, misi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara periodik, diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan (*performance indicator*) dan menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden yang proses penyusunannya telah dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tujuan

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
- Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas

kinerja Organisasi Pemerintah serta meminimalkan peluang terciptanya korupsi, kolusi dan nepotisme.

- Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
- Sebagai alat kendali dan sarana untuk menilai kinerja sehingga dapat mendorong terwujudnya *good governance* yang memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

3. Permasalahan Pembangunan

3.1 Permasalahan Umum

Setiap daerah pasti menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan. Permasalahan pembangunan daerah bersifat dinamis, baik yang disebabkan faktor internal maupun eksternal, terlebih daerah yang tergolong masih baru seperti Kabupaten Kutai Barat. Permasalahan umum yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Barat dalam pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan antara lain:

Tabel 1.1

PEMETAAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2020, LPE Kab. Kutai Barat berada pada posisi -2,92.	Kondisi pandemi ini menyebabkan lesunya ekonomi masyarakat.	Masifnya penyebaran kasus Covid-19 di Kutai Barat dengan kasus terkonfirmasi sejumlah 7.033 jiwa (Agustus 2021) dan 235 jiwa meninggal. Untuk menekan penyebaran tersebut, diberlakukan pembatasan kegiatan dan pergerakan masyarakat.
		Sektor ekonomi penopang utama PDRB seperti sektor pertambangan dan penggalan pada	Harga Komoditi pertambangan dan penggalan yang terpengaruh oleh kondisi ekonomi dunia.

2	<p>Angka Kemiskinan menunjukkan trend meningkat sejak 5 tahun terakhir. Di tahun 2020, angka kemiskinan sebesar 9,29% urutan tertinggi ke-3 setelah Mahakam Ulu dan Kutai Timur. <i>Sumber: BPS Kaltim.</i></p>	<p>tahun 2020 mengalami pertumbuhan - 3,67%.</p>	
		<p>Sektor pertanian dalam arti luas yang pada tahun 2020 juga menunjukkan pertumbuhan negative sebesar -1,99%.</p>	<p>Peremajaan perkebunan masih kurang optimal karena tingginya biaya peremajaan.</p> <p>Ketersediaan benih unggul masih kurang.</p> <p>agroindustri Sumber Daya Lokal di Kabupaten Kutai Barat Belum mampu dikelola secara sinergis, inovatif berdaya saing nasional. Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam arti luas.</p> <p>Belum optimalnya dukungan sarana prasarana dalam pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas.</p>
		<p>Belum optimalnya kontribusi sektor Perdagangan dan jasa.</p>	<p>Masih tingginya ketergantungan terhadap komoditi strategis dari luar daerah.</p> <p>Masih minimnya pelaku UMKM yang diberdayakan.</p> <p>Sektor pariwisata belum terkelola secara optimal, sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata masing kurang.</p>
		<p>Belum optimalnya kontribusi sektor.</p>	<p>lingkungan perairan sebagai media Sumber daya perikanan Mengalami penurunan Kualitas.</p> <p>Budidaya perikanan keramba dan kolam belum optimal.</p>
		<p>Masih tingginya angka pengangguran. Tahun 2019 sebesar 5,08% dan meningkat 0,22% dari tahun 2018. Tahun 2020, belum ada data di BPS.</p>	<p>Lulusan masih belum sesuai dengan kebutuhan tempat kerja. Pencari kerja didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan maksimal SLTA.</p> <p>Angkatan kerja sebagian besar berasal dari perdesaan.</p> <p>Ketersediaan Informasi pasar kerja belum optimal.</p> <p>Meningkatnya pemutusan hubungan kerja.</p> <p>Belum berkembangnya sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja yang dapat membekali keterampilan penduduk sebelum bekerja.</p>
		<p>Sebagian besar penduduk masih menggantungkan penghasilan usahanya</p>	<p>Penyuluh PPL kerja belum maksimal untuk pertanian.</p> <p>Kurangnya inovasi di bidang pertanian dan perkebunan yang berdampak langsung pada</p>

		di sub-sektor pertanian dengan nilai tambah yang relatif kecil.	peningkatan kesejahteraan petani.
		Ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini di tunjukkan dari Indeks Gini yang meningkat selama 3 tahun terakhir Tahun 2020 sebesar 0,338 meningkat 0,004 dari tahun 2019.	Pusat-pusat perekonomian masih berada dekat dari lingkup ibu kota kabupaten.
			Masih kurangnya akses pasar pelaku ekonomi, terutama pelaku ekonomi ditingkat pedesaan.
			Menurunnya pengeluaran perkapita penduduk Kutai Barat. Tahun 2020 menempati urutan terendah ke-2 se-Provinsi Kalimantan Timur (9.712 Ribu Rp / Kapita / Tahun). * Sumber: BPS Kaltim.
3	Pemenuhan kebutuhan primer Masyarakat (Air Minum, Sanitasi, listrik, rumah layak huni serta akses jalan dan jembatan dan telekomunikasi) belum optimal.	Masih terdapat 6,26% rumah tangga di Kutai Barat yang pada tahun 2020 belum memiliki Listrik. (Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur 2020).	Kondisi geografis Kutai Barat yang mengakibatkan sulitnya penyaluran listrik (terutama listrik negara) ke daerah-daerah pelosok.
		Belum optimalnya penuntasan jalan konektivitas yang menghubungkan antar kampung serta sistem drainase di kawasan Perkotaan Sendawar.	Dari 1.286,97 Km jalan yang menjadi tanggungjawab kabupaten di tahun 2020, jalan mantap sebesar 55,7%. Selain ruas jalan konektivitas, infrastruktur Kawasan permukiman juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
		Belum optimalnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum.	Belum optimalnya keterhubungan jaringan jalan yang menghubungkan antar kampung.
			Masih terdapat permukiman kumuh dengan luasan 1045,63 Ha dan terdapat rumah tidak layak huni sejumlah 10.652 Unit.
		Jaringan pipa distribusi primer, sekunder, tersier dan sambungan rumah belum mencakup seluruh wilayah dalam	

			cakupan layanan PDAM.
			Akses air minum layak baru mencapai 67,37% melalui jaringan perpipaan (PDAM) dan Non PDAM serta 4,82% melalui Jaringan non perpipaan. Masih terdapat 27,81% yang belum memperoleh akses terhadap air minum layak.
			Akses terhadap layanan pengelolaan air limbah layak sebesar 77,1%, akses Belum Layak 5,92% dan masih melakukan BABS (tanpa akses) 15,44%. Sedangkan akses Aman Air Limbah baru mencapai 1,54%. (Sumber: website Monev STBM 2020, diolah).
			Capaian Pengelolaan Persampahan masih rendah. Capaian penanganan sampah sebesar 51,5% (dalam wilayah Perkotaan Sendawar dan sekitarnya), sedangkan capaian pengurangan sampah masih 0%. Pengelolaan sampah masih terpusat di TPA, belum ada aktivitas pengurangan dan pemilahan sampah mulai dari titik lokasi timbulnya sampah.
			Masih rendahnya luas lahan pertanian yang mendapat layanan irigasi. Rasio jaringan irigasi 9.127 m terhadap luas lahan budidaya pertanian 2.570 Ha pada tahun 2020 sebesar 3,55.
			Lokasi pembangunan prasarana irigasi belum terkoneksi langsung dengan lahan pertanian.
			Belum tersedianya database (peta lahan pertanian, daerah irigasi dan sawah beririgrasi).
		Masih adanya desa/titik area blank spot.	Kurang optimalnya koordinasi sektor pertanian dan sektor sumber daya air.
			Kewenangan untuk menambah tower dan BTS bukan berada di tangan Pemerintah daerah.
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kutai Barat masih rendah. Tahun 2020,	Masih rendahnya usia harapan hidup. Pada tahun 2020 menempati urutan ke- 6 se-Provinsi	Kualitas Jaringan telekomunikasi di beberapa area perlu ditingkatkan.
			1. Kasus Stunting/gizi buruk masih tinggi.
			2. Jumlah Kasus Penyakit Menular Masih tinggi.
			3. Penyakit Tidak Menular

menduduki peringkat terendah ke-2 se Kalimantan Timur (71,19). *Sumber: BPS Kaltim.	Kalimantan Timur (72,86). *Sumber: BPS Kaltim.	<p>(Hipertensi, Diabet, ODGJ) masih ada dan cenderung meningkat.</p> <p>4. Masih kurangnya Tenaga Kesehatan terutama pada faskes dikampungkampung dan terbatasnya dokter-dokter spesialis.</p> <p>5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kesehatan, terutama ketersediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan di Rumah sakit dan faskes faskes tingkat kampung.</p> <p>6. Prilaku sosial masyarakat yang masih menggunakan sungai sebagai tempat untuk BAB dan pembuangan limbah rumah tangga.</p> <p>7. Penduduk di sekitar sungai yang masih menjadikan air sungai sebagai sumber air bersih, sehingga menimbulkan berbagai penyakit.</p> <p>8. Sistem Pelayanan Rumah Sakit yang belum maksimal, terutama ketersediaan ruang perawatan medis, ICU dan sarana kesehatan rumah sakit lainnya termasuk Sistem Informasi Pelayanan Rumah Sakit.</p> <p>9. Kurangnya sarana sanitasi dan air bersih rumah tangga, yang menyebabkan tingginya kasus penyakit yang diakibatkan dari faktor kebersihan.</p> <p>10. Permasalahan lingkungan hidup seperti kesadaran masyarakat terkait kebersihan dan pengelolaan limbah dan sampah yang belum optimal.</p>
	Rata-rata lama sekolah masih sangat rendah. Tahun 2020 menempati urutan ke 3 terendah se Provinsi Kalimantan timur (8,47). *Sumber : BPS Kaltim.	<p>1. Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat terbatas, termasuk di dalamnya ketersediaan guru. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar.</p> <p>2. Pasokan listrik yang tidak mencukupi ikut mengganggu proses belajar dan mengajar.</p> <p>3. Belum meratanya tenaga pendidik diikuti dengan masih rendahnya tingkat sertifikasi tenaga kependidikan.</p> <p>4. Pengembangan nilai, keragaman, dan kekayaan adat budaya masih belum tertangani secara optimal dan sistematis.</p> <p>5. Faktor ekonomi ikut mempengaruhi kemauan anak-anak usia sekolah untuk belajar. Lebih banyak anak-anak usia sekolah ikut membantu orang tuanya Bekerja.</p>

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Barat 2021-2026

3.2 Permasalahan Khusus (Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan).

1. Urusan Pendidikan

- Angka putus sekolah tinggi pada jenjang SMA dan SMK karena faktor ekonomi dan akses (geografis, sarana transportasi).
- Rendahnya kualitas pendidikan mengacu pada hasil UAS SD dan SMP.
- Banyak guru yang belum berpendidikan S1 dan guru PTT yang berlatar belakang pendidikan non-keguruan.
- Sarana Pendukung Kurang (lab, buku, alat peraga dan lain-lain).

2. Urusan Kesehatan

- Rasio pelayanan Rumah Sakit yang belum merata.
- Ketersediaan tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar nasional.
- Kekosongan obat, proses lelang baru dimulai pada bulan juni.
- Jumlah tenaga kesehatan pada puskesmas terlatih masih kurang (terlatih APN, MTBS, BBLR, SDIDTK, dsb).
- Jumlah pengelola program promkes masih kurang.
- Sebagian pengelola program promkes di Puskesmas belum mengetahui uraian tugas sebagai penyuluh.
- Kondisi gedung Rumah Sakit banyak yang tidak sesuai persyaratan.
- Masih ada peralatan canggih yang belum beroperasi karena SDM belum Bersertifikasi
- Pervalensi penyakit tidak menular yang terus meningkat.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan masih terbatas.
- Aksesibilitas antar kampung, kecamatan dan pusat kegiatan ekonomi belum maksimal.
- Alih fungsi lahan tinggi dan konversi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- Belum efektifnya penataan ruang sebagai alat untuk mengembangkan wilayah yang dapat mengakomodasikan kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pelaku pembangunan dan lintas sumber pembiayaan.
- Cakupan layanan infrastruktur dasar untuk air minum dan air limbah dan perumahan permukiman belum 100% memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Penyediaan layanan air minum layak dan layanan sanitasi untuk air limbah dan persampahan (sesuai target SPM berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota) serta listrik bagi masyarakat belum dapat berjalan secara optimal.
- Sistem irigasi pertanian belum dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Pemerintah Daerah sudah membangun system irigasi. Data menunjukkan DAK Penugasan selama tahun 2017, 2018 dan 2019 selalu ada pembangunan atau pemeliharaan jaringan irigas, akan tetapi belum dapat dioptimalkan penggunaan oleh masyarakat dikarenakan ada beberapa titik area pertanian/perkebunan/sawah yang jauh dari jaringan irigasi sehingga perlu ada

sinkronisasi/pembaharuan data arean pertanian/perkebunan/persawahan.

4. Urusan Perencanaan dan Pembangunan

- Sinkronisasi perencanaan pembangunan belum terlaksana secara optimal.
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah masih lemah.
- Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD masih belum berjalan beriringan.
- Kegiatan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan dan inovasi daerah masih belum berkembang.
- Kompetensi sumber daya manusia dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah masih sangat terbatas.

5. Urusan Perumahan dan Permukiman

- Masih terdapat penduduk yang bertempat tinggal di hunian tidak layak.
- Pembenahan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni masih belum berjalan optimal.
- Masih terjadi backlog perumahan.

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Angka kriminalitas yang cukup tinggi.
- Jumlah demonstrasi yang anarkis masih cukup tinggi.
- Angka penyalahgunaan narkoba yang cukup besar.

7. Urusan Sosial

- Belum optimalnya Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

8. Urusan Ketenagakerjaan

- Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.
- Masih tingginya angka pengangguran terdidik.
- Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
- Belum optimalnya fungsi sarana hubungan industrial.

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Capaian IPG dan IDG yang belum optimal.
- Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang belum optimal.

10. Urusan Pangan

- Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik.
- Belum optimalnya nilai PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat Kutai Barat.
- Masih terdapat desa rawan pangan Kutai Barat
- Rendahnya pengawasan pangan yang beredar.

11. Urusan Pertanahan

- Belum semua bidang tanah memiliki kepastian hukum.
- Masih terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

12. Urusan Lingkungan Hidup

- Permasalahan alih fungsi lahan yang memicu konflik sosial (hutan menjadi perkebunan dan pertambangan).
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam memelihara Kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan masih tingginya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam.
- Belum optimalnya pengelolaan sampah dan

limbah.

- Belum tercapainya gungsi kawasan lindung secara optimal.

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kepemilikan dokumen kependudukan (terutama akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan) oleh penduduk terutama pada keluarga miskin masih rendah.

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

- Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat.
- Kapasitas dan peran kelembagaan pemberdayaan masyarakat masih relatif rendah.

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Ketahanan Keluarga. Rapuhnya ketahanan penyebab berbagai permasalahan keluarga seperti kasus perceraian dan KDRT.
- Distribusi penduduk yang tidak merata.

16. Urusan Perhubungan

- Belum adanya pelabuhan besar untuk angkutan air.
- Belum adanya terminal tipe B/C yang refresentatif.

17. Urusan Komunikasi & Informatika

- Kurangnya integrasi berbagai interface pelayanan publik.

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Rendahnya daya saing koperasi dibanding pelaku usaha non koperasi.

- Rendahnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia.
- Masih adanya koperasi yang tidak aktif.
- Masih belum optimalnya kontribusi UKM dalam perekonomian daerah.
- Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibanding barang luar.
- Inovasi produksi, proses masih kurang.
- Kemitraan dengan lembaga keuangan dalam pembiayaan belum terwujud.

19. Urusan Penanaman Modal

- Rendahnya Investasi baik PMA maupun PMDN.
- Penyebaran investasi antar kecamatan yang tidak merata.

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Minimnya sarana olahraga.
- Belum optimalnya layanan pendidikan keolahragaan.
- Belum optimalnya pembudayaan olahraga.
- Belum optimalnya pengembangan kapasitas/pemberdayaan kaum muda yang berkontribusi pada pembangunan.

21. Urusan Statistik

- Penyediaan data untuk analisis belum memadai.

22. Urusan Kebudayaan

- Masih banyaknya cagar budaya dan warisan budaya yang belum tertangani secara optimal.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelestarian cagar budaya dan warisan budaya.
- Minat masyarakat untuk berkunjung ke museum masih rendah karena daya tarik dan promosi yang

kurang serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya museum.

- Belum optimalnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya, adat istiadat, bahasa, seni dan tradisi luhur.

23. Urusan Perpustakaan

- Rendahnya minat baca masyarakat.
- Belum optimalnya pinjam silang antar perpustakaan.

24. Urusan Kearsipan

- Penyelenggaraan kearsipan dan pemanfaatan arsip yang belum optimal.

25. Urusan Persandiaan

- Jumlah sandiman yang belum optimal (ketersediaan SDM sandi yang berkualifikasi terbatas).

26. Urusan Perikanan

- Masih tingginya illegal Fishing (penggunaan Racun, Setrum).
- Belum ada pelabuhan ikan dan penampungan.
- Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan perikanan.
- Penyediaan kebutuhan ikan di Kutai Barat masih banyak dipasok dari luar daerah.
- Konsumsi ikan di masyarakat Kutai Barat relatif rendah dibanding tingkat nasional.

27. Urusan Pariwisata

- Kurangnya Produk Wisata Berkelas Dunia.
- Pengeluaran wisatawan masih rendah.
- Lama tinggal wisatawan yang masih rendah.
- Objek daya tarik wisata belum optimal dikembangkan.
- Sarana prasarana pendukung pariwisata masih

terbatas.

- Belum memiliki ikon wisata yang mampu bersaing dengan Kabupaten lain.
- Kesiapan masyarakat sebagai tuan rumah masih perlu ditingkatkan.

28. Urusan Pertanian

- Keterbatasan Kapasitas SDM Pertanian.
- Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan peternakan) belum optimal.
- Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- Produksi dan produktivitas pertanian masih rendah.
- Sektor pertanian belum terkait dengan industri pengolahan.
- Tenaga penyuluh pertanian masih terbatas.
- Dukungan subsistem agribisnis masih belum tersedia (penyediaan bibit, budidaya, pemasaran dan permodalan).

29. Urusan Kehutanan

- Masih terdapat lahan kritis di kawasan hutan.
- Masih terjadi kerusakan hutan.
- Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lain yang tidak berizin.

30. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- Belum optimalnya penyediaan listrik di Kampung.
- Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan.
- Belum optimalnya konversi energi.

31. Urusan Perdagangan

- Persaingan usaha sektor perdagangan sangat kompetitif, dan memarginalisasi pelaku skala

kecil.

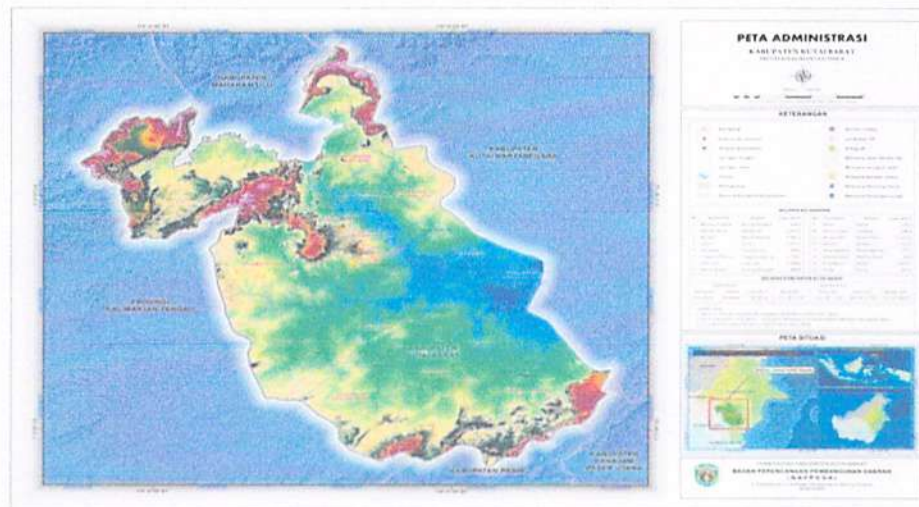
- Masih rendahnya nilai ekspor.
- Jejaring pasar keluar wilayah Kabupaten belum terbentuk.
- Kerjasama dengan berbagai stakeholder masih kurang.

D. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

1. Kondisi Geografi

Gambar 1.1

PETA KABUPATEN KUTAI BARAT



Sumber : Bapelitbangda Kab. Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota Sendawar terletak di bagian barat daya Provinsi Kalimantan Timur dan merupakan salah satu Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi dan Kabupaten lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dari Kabupaten Kutai Barat, secara langsung luas wilayah Kabupaten Kutai Barat berkurang menjadi sekitar 20.381,59 Km² atau kurang lebih mencapai 16,06% dari keseluruhan luas Propinsi Kalimantan Timur.

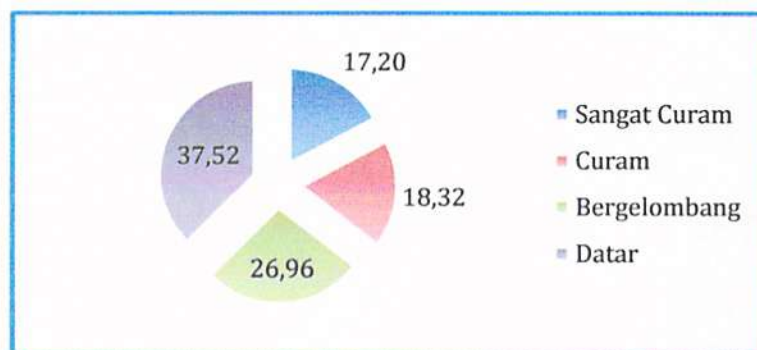
Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°45'49"- 116°32'43" Bujur Timur dan 00°37'30" Lintang Utara dan 1°09'33" Lintang Selatan.

Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kutai Barat memiliki batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Hulu.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013, Kabupaten Kutai Barat memiliki wilayah seluas 20.381.59 Km². Didominasi oleh topografi datar sampai dengan bergelombang sedang yakni sebesar 46,48 %, topografi sangat curam (17,20%) dan curam (18,32%). Wilayah dengan topografi pegunungan mencapai 350.653,07 hektar atau kurang dari 18% dari luas seluruhnya dan berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
LUAS WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT SETELAH PEMEKARAN BERDASARKAN TOPOGRAFI



Sumber : Bapeltbangda Kab. Kutai Barat

Wilayah berbukit dan bergunung dijumpai di Kecamatan Bongan kawasan gunung Meratus, Kecamatan Linggang Bigung bagian Barat dan Utara, dan Kecamatan Long Iram bagian Utara.

Secara Klimatologi wilayah Kabupaten Kutai Barat terbagi menjadi 4 tipe daerah hujan yaitu:

- 1) Kawasan dengan curah hujan antara 2.000 - 2.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak pada ujung bagian timur Kabupaten Kutai Barat di sepanjang wilayah Kecamatan Penyinggahan, Tanjung Isui dan Muara Kedang;
- 2) Kawasan dengan curah hujan antara 2.500 - 3.000 mm/tahun. Kawasan ini terletak di bagian tengah meliputi daerah sekitar Kecamatan Melak, Muara Pahu, Damai, Muara Lawa, Jempang dan Bongan;
- 3) Kawasan dengan curah hujan antara 3.000 - 3.500 mm/tahun. Kawasan ini terletak di sebelah barat Melak meliputi Kecamatan Barong Tongkok sampai bagian selatan Kecamatan Barong Tongkok;
- 4) Kawasan dengan curah hujan antara 3.500 - 4.000 mm/tahun. Kawasan ini terletak di wilayah Kecamatan Long Iram meliputi daerah sekitar Kecamatan Long Iram;

Setelah pemekaran Kabupaten Mahakam Ulu, saat ini Kabupaten Kutai Barat terdiri dari 16 Kecamatan, 190 Kampung dan 4 Kelurahan. Kecamatan dengan jumlah kampung terbanyak ialah Kecamatan Barong Tongkok yang terdiri dari 19 Kampung. Adapun nama kecamatan, jumlah kampung dan kelurahan dapat dilihat lebih jelasnya pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.2
**JUMLAH KECAMATAN, KELURAHAN DAN KAMPUNG
DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kampung
1	Long Iram	-	11
2	Melak	2	2
3	Barong Tongkok	2	19

4	Damai	-	17
5	Muara Lawa	-	8
6	Muara Pahu	-	12
7	Jempang	-	12
8	Bongan	-	16
9	Penyinggahan	-	6
10	Bentian Besar	-	9
11	Linggang Bigung	-	11
12	Nyuatan	-	10
13	Siluq Ngurai	-	16
14	Mook Manaar Bulatn	-	14
15	Tering	-	15
16	Sekolaq Darat	-	8
Jumlah		4	190

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab. Kutai Barat, 2021

2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran pembangunan sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui karakteristiknya (kuantitas, distribusi, komposisi dan kualitas) untuk mengetahui potensi maupun kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju subyek yang berkualitas. Penduduk mempunyai kedudukan yang strategis dalam pembangunan daerah yaitu sebagai subyek pembangunan dan juga sebagai obyek pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah,

menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercatat sebanyak 170.871 jiwa, Jumlah penduduk ditahun 2021 ini ada peningkatan dibanding tahun 2020 yang jumlah penduduknya sebanyak 165.938 jiwa.

Berikut disajikan pada tabel 1.2 jumlah penduduk Kutai Barat tahun 2021 masing-masing Kecamatan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1.3
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Long Iram	3.850	3.451	7.301
2	Melak	7.946	7.463	15.409
3	Barong Tongkok	17.127	15.859	32.986
4	Damai	5.696	5.111	10.807
5	Muara Lawa	3.833	3.547	7.380
6	Muara Pahu	4.480	4.048	8.528
7	Jempang	6.170	5.325	11.495
8	Bongan	5.843	5.197	11.040
9	Penyinggahan	2.072	1.855	3.927
10	Bentian Besar	1.732	1.554	3.286
11	Linggang Bigung	8.412	7.717	16.129
12	Nyuatan	3.409	3.083	6.492
13	Silug Ngurai	3.257	2.866	6.123
14	Mook Manaar Bulatn	4.543	4.063	8.606
15	Tering	5.621	5.085	10.706
16	Sekolaq Darat	5.543	5.113	10.656
Jumlah		89.534	81.337	170.871

Sumber : Disdukcapil Kab. Kutai Barat 2021

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 89.534 jiwa (52,39%) sedangkan penduduk perempuan sebanyak 81.337 jiwa (47,60%). Untuk jumlah Keseluruhan ditahun 2021 ini laki-laki dan perempuan berjumlah 170.871.

Berikut data pada Tabel 1.3 menunjukkan luas wilayah, jumlah KK, jumlah penduduk serta kepadatan penduduk pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Barat hingga bulan Desember 2021 :

Tabel 1.4

**LUAS WILAYAH, JUMLAH KK, PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021**

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk / Km ²
Long Iram	1.657,95	2.349	7.301	4,40
Melak	179,11	4.840	15.409	86,03
Barong Tongkok	430,58	10.935	32.986	76,60
Damai	2.025,53	3.639	10.807	5,33
Muara Lawa	436,54	2.402	7.380	16,90
Muara Pahu	1.110,64	2.774	8.528	7,67
Jempang	744,47	3.876	11.495	15,44
Bongan	2.305,31	3.555	11.040	4,78
Penyinggahan	192,08	1.263	3.927	20,44
Bentian Besar	1.287,86	1.118	3.286	2,55
Linggang Bigung	5.718,07	5.141	16.129	2,82
Nyuatan	1.312,62	2.075	6.492	4,94
Siluq Ngurai	1.629,10	2.009	6.123	3,75
Mook Manaar Bulatn	960,57	2.874	8.606	8,95
Tering	342,22	3.456	10.706	31,28

Sekolaq Darat	48,94	3.483	10.656	217,73
Kutai Barat	20.381,59	55.789	170.871	8,38

Sumber : *Disdukcapil Kab. Kutai Barat 2021*

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya tergolong rendah, namun demikian beberapa Kecamatan seperti Kecamatan Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Tering dan Barong Tongkok merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih padat di banding Kecamatan lain. Bila dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dengan wilayah Kutai Barat yang memiliki luas 20.381,59 Km², maka dapat diperoleh kepadatan penduduk untuk Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar 8,38 jiwa/km². Dari kepadatan tersebut di atas, Kecamatan Sekolaq Darat memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 217,73 jiwa/km² kemudian diikuti Kecamatan Melak dengan kepadatan 86,03 jiwa/ km² dan Kecamatan Barong Tongkok sebesar 76,60 jiwa/km². Sebaliknya Kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Bentian Besar dengan kepadatan penduduk 2,55 jiwa/km², diikuti Kecamatan Linggang Bigung dengan 2,82 jiwa/km² dan Siluq Ngurai yang kepadatan penduduk 3,75 jiwa/ km².

3. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian Kabupaten Kutai Barat di tahun 2021 relatif tidak banyak mengalami pergeseran. Pergerakan roda ekonomi ini tidak terlepas dari situasi dan kondisi Kabupaten Kutai Barat dengan penerapan kebijakan pemerintah daerah melalui paket kebijakan yang berpedoman pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata serta terarah dan tepat sasaran, dengan selalu berlandaskan pada skala prioritas kebutuhan. Prioritas pembangunan selama Tahun 2021 pada sektor ekonomi menitikberatkan program pembangunan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada peningkatan kesejahteraan melalui usaha

kecil/menengah, koperasi, dan pertanian sebagai tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kutai Barat.

Kondisi makro ekonomi Kutai Barat juga tidak terlepas dari dampak perkembangan kondisi ekonomi maupun non ekonomi. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional yang tercerminkan pula pada perekonomian regional di setiap Kabupaten. Beberapa indikator makro ekonomi nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama tahun 2021 seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita.

Dampak dari faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi bagi Kutai Barat, sebagai daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) memberi pengaruh terhadap perkembangan kondisi makro ekonomi. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan Daerah untuk melayani masyarakat (*Public Services*), secara langsung telah menimbulkan “*Multiplier Effect*” terhadap perekonomian daerah, sehingga diharapkan pembangunan di Kutai Barat dapat lebih cepat berkembang dan hasilnya dapat dinikmati masyarakat secara nyata.

3.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kutai Barat pada tahun 2021 didominasi Lapangan Usaha berbasis sumberdaya alam, yaitu Pertambangan khususnya komoditas Batu Bara yang namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan. Terlihat dari besarnya peranan Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kutai Barat. Dan pada tahun 2021, struktur ekonomi Kutai Barat juga menunjukkan peningkatan, dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi (15.773,48 juta rupiah), diikuti lapangan usaha Pertanian yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (4.804,19 juta rupiah) dan Konstruksi (3.477,72 juta rupiah). Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB Atas Dasar

Harga Berlaku Kabupaten Kutai barat mulai berangsur-angsu menunjukkan peningkatan.

Berikut Tabel Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 – 2021 :

Tabel 1.5
NILAI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2021 (JUTA RUPIAH)

	Kategori	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.885.244,6	4.056.840,0	4.804,19
B	Pertambangan dan Penggalian	14.250.640,8	12.402.259,3	15.773,48
C	Industri Pengolahan	1.647.428,6	1.782.974,3	2.046,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.999,0	7.921,8	8,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.621,7	8.851,8	10,20
F	Konstruksi	3.467.978,8	3.301.729,9	3.477,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.188.014,4	2.234.134,5	2.320,10
H	Transportasi dan Pergudangan	473.470,6	457.493,2	504,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99.273,7	93.432,5	98,30
J	Informasi dan Komunikasi	305.970,2	333.298,1	369,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	36.762,7	37.781,6	41,55
L	Real Estate	156.450,0	156.236,1	156,83
M,N	Jasa Perusahaan	18.388,3	18.035,8	18,07
O	Administrasi Pemerintahan,	1.471.993,2	1.424.895,0	1.427,04

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
P	Jasa Pendidikan	484.692,8	523.244,5	570,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	256.763,5	314.614,2	358,05
R,S,T U	Jasa lainnya	106.551,6	106.269,8	109,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		28.242.132,2	28.865.244,5	32.092,83

Sumber : BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2021

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan produksi dari barang dan jasa pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga angka pertumbuhan ini sudah tidak dipengaruhi faktor perubahan harga atau bisa diartikan benar-benar murni disebabkan oleh kenaikan produksi dari barang dan jasa tersebut.

3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Seiring dengan terjadinya musibah global dan nasional yaitu COVID-19, situasi ekonomi regional Kutai Barat menunjukkan peningkatan di tahun 2021. Kondisi ini tergambar dari estimasi capaian akan laju pertumbuhan ekonomi Kutai Barat tahun 2021 yang mencapai 4,18 persen, mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2020 yang jauh sebesar -2,92 persen.

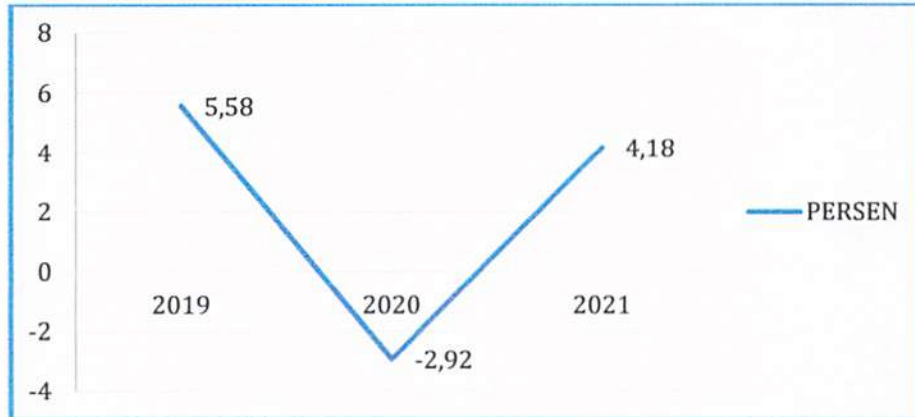
Berikut Tabel Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Barat tahun 2019-2021 :

Tabel 1.6
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019-2021 (PERSEN)**

KATEGORI	URAIAN	TAHUN		
		2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,52	-1,99	-0,8
B	Pertambangan dan Penggalian	5,53	-3,67	5,73
C	Industri Pengolahan	5,29	-3,96	-0,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,24	13,06	2,92
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,39	2,39	4,34
F	Konstruksi	5,39	-5,24	4,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,71	1,03	2,68
H	Transportasi dan Pergudangan	7,68	-5,37	4,84
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,90	-6,15	3,36
J	Informasi dan Komunikasi	8,53	8,61	9,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	1,76	7,24
L	Real Estate	3,95	-1,56	-1,73
M,N	Jasa Perusahaan	4,07	-3,78	1,29
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	-5,31	4,57
P	Jasa Pendidikan	7,07	5,25	5,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,13	19,20	15,92
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,85	-1,92	2,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,58	-2,92	4,18

Sumber : BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2021

Grafik 1.2
**LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019-2021 (PERSEN)**



3.3 PDRB Per Kapita

PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk pada wilayah tersebut. Pada ada tahun 2021, PDRB per kapita Kabupaten Kutai Barat diestimasikan mencapai Rp 184,46 juta mengalami peningkatan sebesar Rp 0,62 juta dari tahun 2020 sebesar 183,84 juta.

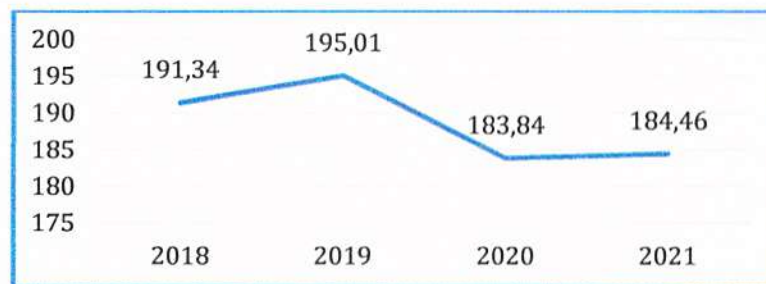
PDRB per kapita diperoleh dari PDRB Kutai Barat secara keseluruhan, yang meliputi 17 kategori lapangan usaha, dimana sebagian besar PDRB Kabupaten Kutai Barat didominasi oleh lapangan usaha pertambangan batu bara. Sementara nilai tambah dari lapangan usaha pertambangan batu bara tidak mencerminkan pendapatan masyarakat secara riil, sehingga dapat diartikan pendapatan per kapita masyarakat yang sesungguhnya bisa jadi jauh lebih rendah lagi.

Tabel 1.7
PDRB PERKAPITA KUTAI BARAT TAHUN 2018-2021
(JUTA RUPIAH PER TAHUN)

Tahun	PDRB Perkapita (Juta Rupiah per Tahun)
2018	191,34
2019	195,01
2020	183,84
2021	184,46

Sumber : BPS Kab. Kutai Barat Tahun 2021

Grafik 1.3
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT LAPANGAN USAHA
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019-2021 (JUTA RUPIAH)



4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni berumur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. 3 (tiga) dimensi pokok penyusun IPM tersebut, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Aspek kesehatan dalam pembangunan manusia diukur oleh indeks harapan hidup sebagai representasi kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang. Aspek pendidikan diukur oleh indeks pendidikan yang diperoleh dengan mengukur rata-rata lama sekolah dan angka harapan

sekolah. Standar hidup yang layak merupakan gambaran dari aspek ekonomi masyarakat. Aspek ekonomi tersebut dihitung dengan menggunakan indikator GNI per kapita.

Perkembangan IPM di Kutai Barat dalam 4 (empat) tahun terakhir, meskipun percepatannya bergerak bervariasi. Pada tahun 2020 IPM Kutai Barat tercatat 71,19 persen, sama dengan tahun 2021 ini 71,19 persen.

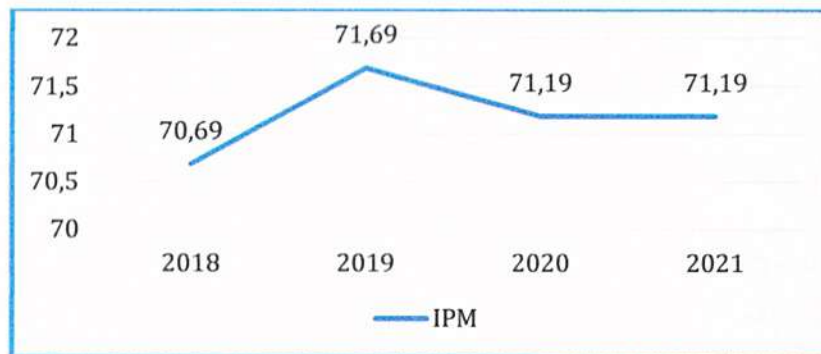
Berikut Tabel dan Grafik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kutai Barat tahun 2018 – 2021 :

Tabel 1.8
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 – 2021**

Tahun	IPM
2018	70,69
2019	71,69
2020	71,19
2021	71,19

Sumber : BPS Kutai Barat 2021

Grafik 1.4
**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 – 2021**



Dari Tabel dan Grafik di atas, capaian kinerja IPM Kutai Barat tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pada tahun 2021.

5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat 7 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat merupakan Inspektorat Tipe A;

Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri dari :

- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- 2) Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan;

- 5) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- 6) Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 8) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
- 9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- 13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 14) Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- 15) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan;

- 16) Dinas Ketahanan Pangan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 17) Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 18) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- 19) Dinas Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- 20) Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
- 21) Dinas Perikanan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.

Badan Daerah Kabupaten Kutai Barat, terdiri atas:

- 1) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; dan
- 4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Kecamatan terdiri atas:

- 1) Kecamatan Barong Tongkok dengan Tipe A;
- 2) Kecamatan Melak dengan Tipe A;
- 3) Kecamatan Linggang Bigung dengan Tipe A;
- 4) Kecamatan Sekolaq Darat dengan Tipe A;

- 5) Kecamatan Damai dengan Tipe A;
- 6) Kecamatan Muara Lawa dengan Tipe A;
- 7) Kecamatan Jempang dengan Tipe A;
- 8) Kecamatan Bongan dengan Tipe A;
- 9) Kecamatan Siluq Ngurai dengan Tipe A;
- 10) Kecamatan Bentian Besar dengan Tipe A;
- 11) Kecamatan Muara Pahu dengan Tipe A;
- 12) Kecamatan Penyinggahan dengan Tipe A;
- 13) Kecamatan Mook Manaar Bulatn dengan Tipe A;
- 14) Kecamatan Nyuatan dengan Tipe A;
- 15) Kecamatan Tering dengan Tipe A; dan
- 16) Kecamatan Long Iram dengan Tipe A.

Perangkat Daerah Lainnya :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar (RSUD) Tipe C, bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah;
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebanyak 19 unit, tersebar di 16 Kecamatan, sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- 3) UPT Dinas Daerah;
- 4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundangundangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
- 5) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya

sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kutai Barat yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur teknis pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia.

6. Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat

Guna melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup memadai sebanyak 13.286 orang yang terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 3.628 orang.
- Tenaga Kerja Kontrak (TKK)/Honorar sebanyak 9.658 orang

Tabel 1.9

RINCIAN JUMLAH PEGAWAI/ASN DAN NON ASN/PTT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2021

No	Jenis Kepegawaian	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	3.783	3.634	3.628
2	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	5.483	6.063	9.658
Jumlah		11.582	11.966	13.286

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

Tabel 1.10
**RINCIAN JUMLAH PEGAWAI/ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 BERDASARKAN
GOLONGAN RUANG DAN GENDER**

No	Golongan dan Ruang	Gender		Jumlah Total
		Laki - Laki	Perempuan	
1	I	39	5	44
2	II	634	527	1.170
3	III	918	1.032	1.950
4	IV	266	198	464
Jumlah		1.866	1.762	3.628

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

Sementara jika dilihat berdasarkan Eselon, sebaran ASN Kabupaten Barat dapat dilihat pada tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.11
**RINCIAN JUMLAH ESELON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 - 2021**

No	Eselon	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Eselon IIa	1	1	1
2	Eselon IIb	29	23	29
3	Eselon IIIa	60	52	69
4	Eselon IIIb	97	95	108
5	Eselon IVa	443	432	449
6	Eselon IVb	51	56	56
7	Eselon Va	-	-	-
8	Eselon Vb	-	-	-
Jumlah		694	693	712

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

Berdasarkan tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 rincian sebagai berikut :

Tabel 1.12
**RINCIAN JUMLAH PEGAWAI/ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021 BERDASARKAN
PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	19
2	SLTP	35
3	SLTA	1.205
4	D1	20
5	D2	113
6	D3	390
7	D4/S1	1.525
8	S2	318
9	S3	3
Jumlah		3.628

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

Jumlah Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 menurut tingkat pendidikan dengan rincian sbb :

Tabel 1.13
**JUMLAH TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2021 BERDASARKAN PENDIDIKAN**

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	118
2	SLTP	258
3	SLTA	4.886
4	D1	17
5	D2	9
6	D3	1.054

7	D4/S1	3.261
8	S2	55
9	S3	
Jumlah		9.658

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

Tabel 1.14

**DATA TENAGA KERJA KONTRAK (TKK)
TENAGA KEPENDIDIKAN (GURU) TAHUN 2021**

SEKOLAH	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
	SMA	D I	D 2	D 3	D4/S1	S 2	S 3	
PG/PAUD	123	1	3	7	104	0	0	238
TK/RA	151	9	6	6	135	0	0	307
SD/MI	515	6	23	23	788	0	0	1.354
SLB	0	0	0	0	0	0	0	0
SMP/MTS	13	2	5	20	627	0	0	667
JUMLAH	802	18	36	56	1.654	0	0	2.566

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

Tabel 1.15

**DATA TENAGA KERJA KONTRAK (TKK) TENAGA ADM
PENYELENGGARA KEPENDIDIKAN TAHUN 2021**

JENJANG PENDIDIKAN	JABATAN				JUMLAH
	TU	PERPUSTAKAAN	PENJAGA SEKOLAH	PELAYAN	
PG/PAUD	16	0	0	7	23
TK/RA	19	2	5	14	40
SD/MI	139	56	78	69	342
SMP/MTs	96	21	25	19	161
JUMLAH	270	79	108	109	566

Sumber : BKPSDM Kab. Kutai Barat 2021

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 ini dilakukan dengan membentuk fokus grup yang melakukan pengumpulan data, kajian, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sasaran/program yang

telah ditetapkan. Berbagai dokumen perencanaan daerah yang telah ada baik itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 - 2026, Arah dan Kebijakan Umum dan Strategi Prioritas APBD tahun 2021, serta dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2021 menjadi bahan perencanaan kinerja untuk diukur dan dievaluasi pencapaiannya.

Dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, LKjIP tahun 2021 lebih banyak menguraikan hal-hal strategis yang masih memerlukan perbaikan, sedangkan hal-hal yang relatif telah berhasil dengan baik tidak terlalu banyak diungkapkan.

Adapun sistematika penyusunan LAKIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang; maksud dan tujuan; gambaran umum Kabupaten Kutai Barat serta sistematika penulisan.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 - 2026 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kutai Barat Tahun 2021.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dikaitkan dengan sasaran strategis untuk tahun 2021 dan penyajian dari hasil pengukuran Kinerja Tahun 2021.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kabupaten Kutai Barat untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, isi, serta program pemerintah Kabupaten Kutai Barat tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.

A. VISI :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu :

**“Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera
Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Sumber
Daya Manusia”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:

a. Semakin Adil

Semakin Adil diartikan bahwa secara bertahap dan pasti berbagai kesenjangan (gap) atau disparitas hasil-hasil pembangunan akan semakin berkurang dan hasil-hasil pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya secara lebih meluas dan merata ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Kutai Barat, tidak lagi berfokus di pusat-pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu saja. Sehingga, pembangunan merata pada semua wilayah menuju kesejahteraan.

b. Semakin Mandiri

Semakin Mandiri diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan akan semakin mampu untuk terus maju dengan bertumpu pada kekuatan serta daya inovasi masyarakat dan daerah, kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mewujudkan kehidupan yang sejajar serta sederajat dengan daerah lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Dalam membangun kemandirian ini mutlak harus dibangun kemampuan daya saing daerah.

c. Semakin Sejahtera

Semakin Sejahtera diartikan bahwa di masa mendatang dapat terciptanya kualitas hidup masyarakat Kutai Barat pada semua aspek kehidupan, pembangunan yang akan dilaksanakan pada lima tahun mendatang diharapkan mampu mewujudkan suatu keadaan masyarakat yang tercukupi kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan memiliki pendapatan yang lebih baik.

d. Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Berbasis Ekonomi Kerakyatan diartikan bahwa masyarakat Kutai Barat di masa mendatang diharapkan mampu memanfaatkan Sumber Daya alam secara berkelanjutan dalam menyelenggarakan system ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi local, melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian.

e. Peningkatan Kualitas SDM

Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya peningkatan daya saing dan kemandirian masyarakat namun juga mendukung pembangunan nasional.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Table 2.1

KETERKAITAN VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

VISI	MISI
Kutai Barat Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	<i>Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan</i>
	<i>Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan</i>
	<i>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel</i>
	<i>Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan</i>

- 1) **Misi Pertama : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan.** Dalam periode lima (5) tahun mendatang, pendekatan pengembangan ekonomi kerakyatan menggunakan konsep Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang dipadukan dengan konsep pengembangan kawasan (*kluster*). Kedua pendekatan tersebut diharapkan menciptakan pekerjaan yang beragam, sesuai dengan keterampilan masyarakat local dan berkelanjutan.;
- 2) **Misi kedua : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.** Manusia merupakan objek sekaligus subjek/pelaku pembangunan. Pelestarian lingkungan, perlawanan terhadap kemiskinan, peningkatan ekonomi, dan sebagainya merupakan upaya mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan bagi umat manusia. Pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia merupakan penentu keberhasilan pembangunan.;
- 3) **Misi ketiga : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.** Visi Kutai Barat dapat dicapai dengan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama dapat terjadi ketika ada rasa saling percaya dan peduli antara pemerintah dan masyarakat pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa kepedulian ditunjukkan dengan pelayanan yang cepat dan murah; dan
- 4) **Misi keempat : Meningkatkan pemerataan insfrastruktur dasar dan insfrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.** Insfrastruktur atau sering disebut sarana dan prasarana memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan. Insfrastruktur merupakan modal pembangunan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa insfrastruktur seperti jalan, listrik, pelabuhan merupakan modal penting untuk

mencapai pertumbuhan perekonomian wilayah yang tinggi dan berkelanjutan. Insfrastruktur yang baik akan meningkatkan perekonomian wilayah sekaligus perekonomian masyarakat. Kebijakan pembangunan insfrastruktur penunjang ekonomi kerakyatan.

Penjabaran pelaksanaan keempat misi diatas, telah diuraikan melalui janji politik Bupati Kutai Barat. Semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat 2021-2026. Penetapan janji politik, merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bupati Kutai Barat.

RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 merupakan dokumen strategis Kabupaten Kutai Barat untuk mengimplementasikan janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Berkenaan dengan janji-janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih dimaksud dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.2
JANJI BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH

No	Janji Politik/Kampanye	Program Terkait	SKPD Terkait Pencapaian Misi
1	Meningkatkan Jumlah Wirausahawan Lokal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	Meningkatkan peran BUMK dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat lokal	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
3	Meningkatkan Jumlah	Program pengembangan	Dinas Perdagangan,

	UMKM berbasis komoditas unggulan dan berdaya saing	UMKM Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Pendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Meningkatkan Rantai Pasok Produksi Komoditas Unggulan Lokal	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
6	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Praktik-Praktik Jasa Lingkungan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup
7	Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
8	Menurunkan Angka Putus Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	Meningkatkan Rata-Rata Nilai UN		
10	Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan dan RSUD
11	Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Menjangkau Keseluruh Lapisan Masyarakat	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
12	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah

	Pemerintahan	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
13	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan Pelatihan Daerah
14	a. Menyediakan infrastruktur yang merata serta Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Program Pengembangan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Menyediakan Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan		

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Barat 2021-2026

Janji-janji tersebut bukanlah sekedar janji belaka. Banyak sisi positif yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kabupaten Kutai Barat. Dengan janji-janji tersebutlah, Bupati Kutai Barat terus memelihara keinginan dan tekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy Planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi, dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Hubungan antara kepala daerah dan perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pada Penyusunan RPJMD ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reuiu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 menetapkan sebanyak 9 (Sembilan) sasaran dan 23 (dua puluh tiga) indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.3
**TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN KUTAI BARAT 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan local secara berkelanjutan.		
Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
	Meningkatnya peran sector unggulan daerah berbasis kluster terhadap Perekonomian Daerah (PDRB)	Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB
		Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB
Menurunkan Angka Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan	
	Terciptanya lapangan kerja baru dan Wirausahawan local baru	Tingkat Pengangguran terbuka Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil
	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	PDRB Perkapita
Menjaga Keberlanjutan Kawasan Dalam Skema Pembangunan Ekonomi Hijau	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
	Terjaganya kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air
		Indeks Kualitas Udara
Indeks Kualitas Lahan		
Misi 2 : Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan yang didukung optimalisasi pelayanan kesehatan.		
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kab. Kutai Barat	Indeks Pembangunan Manusia	
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.		
Meningkatkan	Indeks Reformasi Birokrasi	

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat
		Indeks BPK
		Nilai LPPD
		Persentase Desa Mandiri
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
		Nilai SAKIP
Misi 4 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur penopang ekonomi kerakyatan.		
Menyediakan Infrastruktur dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Indeks Gini	
	Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Penduduk Berakses air Minum Layak
		Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Layak Tidak Huni)
	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap
		Cakupan Layanan Telekomunikasi

Sumber : RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026

2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, tentu saja harus ada beberapa kebijakan yang dijadikan dasar dalam perumusan perencanaan. Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselaraasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakannya.

Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada peripde RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung

didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan belanja daerah pada RPJMD 2021-2026 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan seperti :

1. Pemenuhan kebutuhan belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pemenuhan Belanja Fungsi Kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Pemenuhan kewajiban belanja moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
4. Pemenuhan belanja pegawai atas belanja gaji dan tunjangan dan rencana pemberian tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari vis politik kepala daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Kabupaten Kutai Barat. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi program prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan janji politik pada saat kampanye.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran akan tercapai Ketika strategi yang digunakan tepat. Pemkab Kutai Barat selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibanahi.

Adapun strategi Pemkab Kutai Barat mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu

membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan : pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan Pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program : adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran Sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan : adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. Sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas Fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan Merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemkab Kutai Barat melaksanakan reviu terhadap sasaran dan indikator kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana table berikut:

Tabel 2.4
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021-2026**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	1.1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%
		1.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%
		1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2.1	Tingkat Pengangguran terbuka	%
		2.2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	3.1	PDRB Perkapita	Juta
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks
		4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks
		4.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	5.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
		5.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	6.1	Usia Harapan Hidup	Tahun
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai
		7.2	Opini BPK	Opini
		7.3	Nilai LPPD	Poin

		7.4	Persentase Desa Mandiri	%
		7.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%
		7.6	Nilai SAKIP	Poin
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	8.1	Persentase penduduk berakses air minum	%
		8.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%
		8.3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	9.1	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%
		9.2	Cakupan Layanan Komunikasi	%

2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan salah satu tahapan dalam **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi Amanah kepada pimpinan SKPD sebagai penerima Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Target Kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administrative, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu,

penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan system manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekedar tanda tangan.

Tabel 2.5
**PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**

No	Sasaran	No	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	1.1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,04
		1.2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,5
		1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,35
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2.1	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,8
		2.2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	3.1	PDRB Perkapita	Juta	188,54
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	62,1
		4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,24
		4.3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,06
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	5.1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,49
		5.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	6.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,96
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah	7.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,50
		7.2	Opini BPK	Opini	WTP

	Daerah	7.3	Nilai LPPD	Poin	3,5
		7.4	Persentase Desa Mandiri	%	20
		7.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	83,97
		7.6	Nilai SAKIP	Poin	64
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	8.1	Persentase penduduk berakses air minum	%	76,45
		8.2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,25
		8.3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	29
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	9.1	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	56
		9.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	43

2.5 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin di capai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 Berjumlah Rp.2.241.843.665.826,00 adapun anggaran setelah perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 berjumlah Rp 2.944.928.475.970,00 Anggaran Belanja langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, Komposisi belanja APBD Kabupaten Kutai Barat, Sebagai berikut:

Tabel 2.6
**ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	1.632.113.314.267,00
2	Belanja Modal	930.735.773.269,00
3	Belanja Tidak Terduga	80.000.000.000,00
4	Belanja Transfer	302.079.388.434,00
Jumlah		2.944.928.475.970,00

Sumber : BKAD Kab. Kutai Barat 2021

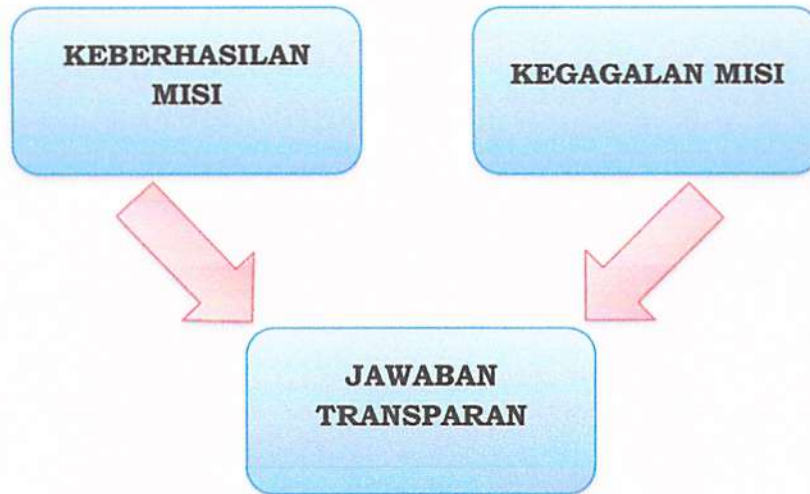
Tabel 2.7
ALOKASI ANGGARAN PER INDIKATOR SASARAN TAHUN 2021

No	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	51.096.857.840,00
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	5.781.251.430,00
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.960.576.500,00
4	Tingkat Pengangguran terbuka	385.524.400,00
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	2.214.974.000,00
6	PDRB Perkapita	N/A
7	Indeks Kualitas Air	
8	Indeks Kualitas Udara	25.640.068.500,00
9	Indeks Kualitas Lahan	
10	Harapan Lama Sekolah	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	111.632.998.360,00
12	Usia Harapan Hidup	219.092.227.507,00
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	
14	Nilai SAKIP	1.205.767.080,00
15	Nilai LPPD	1.495.788.000,00
16	Persentase Desa Mandiri	14.328.728.234,00

17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	6.431.885.140,00
18	Opini BPK	661.030.733.297,00
19	Persentase penduduk berakses air minum	
20	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	498.312.703.193,00
21	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.333.082.105,00
22	Persentase rumah tangga pengguna listrik	293.589.800,00
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	3.039.332.049,00
Jumlah		1.611.276.087.435,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur, dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja. Secara umum, artinya yakni jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal, itu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga : Perorangan, Badan Hukum dan Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selaku pengemban

amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Ketentuan pembuatan laporan, sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, RKT Tahun 2021, RKPD Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1
**PREDIKAT NILAI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
DALAM SKALA PENGUKURAN ORDINAL**

No	Persentase	Predikat
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Dan Predikat Capaian Kinerja untuk realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Sebagai Berikut :

Tabel 3.2
**PENCAPAIAN KINERJA SASARAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI BARAT 2021**

No	Kategori	Rata-Rata Capaian %	Keterangan
1	Melampaui Target	>100	MT
1	Sangat Baik	85.00 - 100	SB
2	Baik	70.00 - 84.99	B
3	Cukup Baik	55.00 - 69.99	CB
4	Kurang Baik	0 - 54.99	KB

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja harus utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Kabupaten Kutai Barat dan Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,04	14,97	99,53%
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,5	1,42	284%
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,35	0,31	88,57%
4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,8	5,14	-2,28%
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44	1,00	287,09%
6	PDRB Perkapita	Juta	188,54	184,46	97,83%
7	Indeks Kualitas Air	indeks	62,1	60,00	96,62%
8	Indeks Kualitas Udara	indeks	93,24	91,65	98,29%
9	Indeks Kualitas Lahan	indeks	66,06	66,10	100,06%
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91	13,02	100,85%
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	8,70	102,47%
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,96	73,10	100,19%
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,50	79,91	98,05
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
15	Nilai LPPD	Poin	3,5	3,0733**	87,80
16	Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	%	20	19	95
17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	83,97	83,97*	100
18	Nilai SAKIP	Poin	64	62,27*	97,29
19	Persentase penduduk berakses air minum	%	76,45	77,79	101,75%

20	Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,25	85,60	86,24%
21	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	29	15,26	52,62%
22	Proporsi Panjanag Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	56	68,77	122,80%
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	43	56,31	130,95%

Catatan/Note : *Data Tahun 2020 **Data Tahun 2019

Dari table tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada :

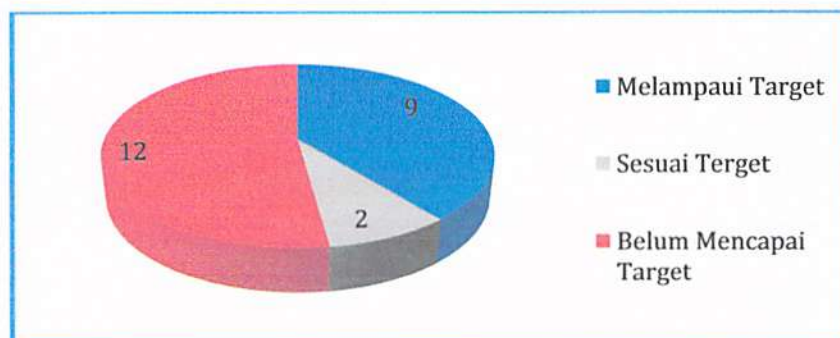
- A. Misi 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kawasan Berdasarkan Potensi Unggulan Lokal Secara Berkelanjutan
1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, mencapai 99,53%
 2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, mencapai 284%
 3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB, mencapai 88,57%
 4. Tingkat Pengangguran Terbuka, mencapai -2,28%
 5. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, mencapai 287,09%
 6. PDRB Perkapita, mencapai 97,83%
 7. Indeks Kualitas Air, mencapai 96,62%
 8. Indeks Kualitas Udara, mencapai 98,29%
 9. Indeks Kualitas Lahan, mencapai 100,06%
- B. Misi 2 : Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas Melalui Pendidikan dan Pelatihan yang didukung Optimalisasi Pelayanan Kesehatan
1. Rata-rata Lama Sekolah, mencapai 102,47%
 2. Angka Harapan Lama Sekolah, mencapai 100,85%
 3. Usia Harapan Hidup, mencapai 100,19%

- C. Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel
1. Indeks Kepuasan Masyarakat, mencapai 98,04%
 2. Opini BPK, mencapai 100%*
 3. Nilai LPPD, mencapai 87,80%**
 4. Pesentase Desa Mandiri, mencapai 95%
 5. Indeks Pembangunan Gender (IPG), mencapai 100%*
 6. Nilai SAKIP, mencapai 97,29%*
- D. Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penopang Ekonomi Kerakyatan
1. Persentase Penduduk Berakse Air Minum Layak, mencapai 101,75%
 2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik, mencapai 86,24%
 3. Berkurangnya jumlah Unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mencapai 7,44%
 4. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap, mencapai 122,80%
 5. Cakupan Layanan Telekomunikasi, mencapai 130,95%

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas dapat dilihat bahwa ada 9 (Sembilan) Indikator yang Melampaui Target, 2 (dua) Indikator yang Mencapai Target dan 12 (dua belas) Indikator yang Tidak Mencapai Target, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**



3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISA KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2021.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2021-2026 maupun RKPD Tahun 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021, telah ditetapkan 9 (Sembilan) Sasaran dengan 23 (Dua Puluh Tiga) indikator kinerja (Outcome) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
JUMLAH INDIKATOR PER SASARAN

1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	Indikator
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	Indikator
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	Indikator
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	Indikator
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	Indikator

6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	Indikator
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	Indikator
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	Indikator
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	Indikator

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 3.5
**REKAPITULASI CAPAIAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 2021**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	%	15,04	14,97	99,53
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	0,5	1,42	284
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	0,35	0,31	88,57
Rata-Rata Capaian Kinerja						157,36
2.	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	Tingkat Pengangguran terbuka	%	4,8	5,14	-2,28
		Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,44	1,00	287,09
Rata-Rata Capaian Kinerja						142,40
3.	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	PDRB Perkapita	Juta	188,54	184,46	97,83
Rata-Rata Capaian Kinerja						97,83
4.	Terjaganya	Indeks Kualitas Air		62,1	60,00	96,62

	Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara		93,24	91,65	98,29
		Indeks Kualitas Lahan		66,06	66,10	100,06
			Rata-Rata Capaian Kinerja		98,32	
5.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,49	8,70	102,47
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91	13,02	100,85
			Rata-Rata Capaian Kinerja		101,66	
6.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	72,96	73,10	100,19
					Rata-Rata Capaian Kinerja	
7.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,50	79,91	98,05
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP*	100
		Nilai LPPD	Poin	3,5	3,0733**	87,80
		Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	%	20	19	95
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	83,97	83,97*	100
		Nilai SAKIP	Poin	64	62,27*	97,29
					Rata-Rata Capaian Kinerja	
8.	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	Persentase penduduk berakses air minum	%	76,45	77,79	101,75
		Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	99,25	85,60	86,24
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	29	2,16	7,44
			Rata-Rata Capaian Kinerja		65,14	
9.	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi mantap	%	56	68,77	122,8
		Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	43	56,31	130,95
			Rata-Rata Capaian Kinerja		126,87	
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN						109,57

Catatan/Note : * Data Tahun 2020 **Data Tahun 2019

Pengkategorian hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6
**PENKATEGORIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian (%)	0 s/d <55	55 s/d <70	70 s/d <85	85 s/d <100	≥100
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	3	157,36					MT
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	142,40					MT
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	97,83				SB	
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	98,32				SB	
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	101,66					MT
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	100,19					MT
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	96,36				SB	
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	65,14		CB			
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	2	126,87					MT
	Jumlah	23	112,97		1		3	5

Berdasarkan kedua table diatas, maka kinerja capaian Sasaran dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian Kinerja ≥ 100 % Kategori “Melapau Target” sebanyak 5 Sasaran, atau 56 %
- Capaian Kinerja 85 s/d <100 Kategori “Sangat Baik” sebanyak 3 Sasaran, atau 33 %
- Capaian Kinerja 70 s/d <85 Kategori “Baik” sebanyak 0 Sasaran, atau 0 %

- d. Capaian Kinerja 55 s/d <70 Kategori “Cukup Baik” sebanyak 1 Sasaran, atau 11 %
- e. Capaian Kinerja 0 s/d <55 Kategori “Kurang Baik” sebanyak 0 Sasaran, atau 0 %

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat setelah Perubahan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 dengan total belanja sebesar **Rp 2.944.928.475.970,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp 2.158.396.440.333,79** atau dengan serapan dana APBD mencapai **73,29%**.

Anggaran Belanja Langsung merupakan bagian dari APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021, komposisi belanja APBD Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Tabel 3.7
**KOMPOSISI BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.632.113.314.267,00	1.249.691.261.990,73	76,57
2	Belanja Modal	930.735.773.269,00	597.002.939.452,86	64,14
3	Belanja Tidak Terduga	80.000.000.000,00	10.771.008.718,00	13,46
4	Belanja Transfer	302.079.388.434,00	300.931.230.172,20	99,62
Jumlah		2.944.928.475.970,00	2.158.396.440.333,79	73,29

Sumber : BKAD Kab. Kutai Barat

Jika dilihat dari komposisinya, Belanja Operasi memberikan kontribusi sebesar 55.00%, Belanja Modal Sebesar 32%, Belanja Tidak Terduga Sebesar 3%, dan Belanja Transfer sebesar 10%.

Adapun Anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Kutai Barat yang diperjanjikan pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp **1.611.276.087.435,-** lebih tinggi Rp **602.393.269.547,-** dari anggaran tahun 2020 yang mencapai Rp **1.008.882.817.888,-**. Realisasi anggaran terkait pencapaian kinerja sasaran strategis pemerintah Kabupaten Kutai Barat 2021 adalah sebesar **1.125.708.310.117,40** atau **69,86%**, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.8
**ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT 2021**

No	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas terhadap PDRB	51.096.857.840,00	43.048.751.559	84,25
2	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB	5.781.251.430,00	4.854.998.797,00	83,98
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	2.960.576.500,00	2.784.330.737,00	94,05
4	Tingkat Pengangguran terbuka	385.524.400,00	333.945.000,00	86,62
5	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	2.214.974.000,00	1.770.700.986,00	79,94
6	PDRB Perkapita	N/A	N/A	N/A
7	Indeks Kualitas Air	25.640.068.500,00	11.378.916.063,00	44,38
8	Indeks Kualitas Udara			
9	Indeks Kualitas Lahan			
10	Harapan Lama Sekolah	111.632.998.360,00	81.897.260.915,51	73,36
11	Rata-Rata Lama Sekolah			
12	Usia Harapan Hidup	219.092.227.507,00	158.221.439.058,21	72,22
13	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	6.431.885.140,00	4.622.587.665,00	71,87
14	Opini BPK	661.030.733.297,00	333.921.743.628,20	50,52

15	Nilai LPPD	1.495.788.000,00	1.041.406.200,00	69,62
16	Persentase Desa Mandiri	14.328.728.234,00	11.686.581.495,00	81,56
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	1.205.767.080,00	1.040.803.771,00	86,32
18	Nilai SAKIP			
19	Persentase penduduk berakses air minum			
20	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	498.312.703.193,00	460.606.313.908,48	92,43
21	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6.333.082.105,00	5.846.999.249,00	92,32
22	Persentase rumah tangga pengguna listrik	293.589.800,00	286.649.800,00	97,64
23	Cakupan Layanan Telekomunikasi	3.039.332.049,00	2.364.881.285	77,81
Jumlah		1.611.276.087.435,00	1.125.708.310.117,40	69,86

Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2021 sebagaimana table berikut:

Tabel 3.9
**EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN SASARAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase Rata-Rata Capaian Sasaran	Anggaran		Tingkat Efektifitas
				Realisasi (Rp)	%	
A. Misi 1						
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap	3	157,36	50.688.081.093,00	84,71	185,77

	perekonomian daerah					
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	2	142,40	2.104.645.986,00	80,93	175,95
3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat Kutai Barat	1	97,83	N/A	N/A	N/A
4	Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup	3	98,32	11.378.916.063,00	44,38	221,54
B. Misi 2						
5	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	2	101,66	81.897.260.915,15	73,36	138,57
6	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	1	100,19	158.221.439.058,21	72,22	138,89
C. Misi 3						
7	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah	6	96,36	352.313.122.759,20	51,47	187,22
D. Misi 4						
8	Meningkatnya dan meratanya kualitas Infrastruktur dasar	3	65,14	466.453.313.157,48	92,43	70,47
9	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Masyarakat	2	126,87	2.651.531.085,00	79,56	159,47

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan semakin besar persentase capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan persentase serapan anggaran maka dapat dipastikan semakin tinggi tingkat efektifitasnya.

SASARAN 1

MENINGKATNYA PERAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN (PDRB)

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan"** dengan tujuan **"Meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang semakin merata"**.

Adapun Indikator Kinerja sasaran ini adalah : **Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB**. Sedangkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab keberhasilan sasaran ini adalah **Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pariwisata**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 1 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu Kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB dengan tingkat keberhasilan **157,36%** dengan kategori **"MELAMPAUI TARGET"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Peran dari Sektor Unggulan daerah terhadap perekonomian daerah (PDRB)** seperti tampak pada tabel 3.11

Tabel 3.11
**CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA PERAN SEKTOR UNGGULAN
 DAERAH TERHADAP PEREKONOMIAN (PDRB) TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Kontribusi sector Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	15,5	14,88	96	15,04	14,97	99,53	TIDAK TERCAPAI
2	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	N.a	N.a	N.a	0,5	1,42	284	MELAMPAUI TARGET
3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	N.a	N.a	N.a	0,35	0,31	88,57	TIDAK TERCAPAI
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					157,36			MELAMPAUI TARGGET

Berdasarkan tabel 3.11 diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran 1 yakni Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah terhadap Perekonomian Daerah (PDRB) dapat disimpulkan bahwa sasaran 1 memberikan hasil kinerja yang baik bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan. Walaupun ada 2 Indikator yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya capaian tersebut mengalami peningkatan.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan indikator ini kita akan memperoleh gambaran tingkat pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, baik di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten atau kota digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga perubahan PDRB yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya Raharjo (Haryanto; 2008 : 38). Menurut BPS (2010). PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah.

Keadaan ekonomi suatu daerah dapat terlihat dari PDRB daerah tersebut. PDRB dapat mencerminkan kondisi dan pencapaian aktivitas atau kinerja perekonomian daerah. Informasi ini sangat dibutuhkan guna mendukung setiap kebijakan yang akan diambil oleh para *decision market* (pengambil keputusan), mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu daerah. Penyusunan PDRB suatu daerah merupakan salah satu upaya daerah tersebut dalam memberikan informasi yang jelas tentang gambaran pembangunan ekonomi, situasi, kondisi dan potensi suatu daerah sehingga memudahkan pemerintah maupun pihak swasta dalam menentukan pembangunan didaerah tersebut.

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi disuatu daerah. Paling tidak terdapat lima hal yang didapat dari sektor pertanian, diantaranya :

1. Berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat;

2. Berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
3. Menyerap tenaga kerja dipedesaan;
4. Berperan dalam penghasilan devisa dan penghematan devisa;
5. Berperan dalam pengendalian inflasi.

Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Sektor pertanian salah satu penyediaan pangan masyarakat, oleh karena itu percepatan pembangunan pertanian berperan penting dalam penyediaan pangan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Walaupun dalam kontribusinya dalam PDRB Kabupaten Kutai Barat terkadang mengalami penurunan, namun sektor pertanian masih akan tetap memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian secara keseluruhan, karena mempunyai keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi lainnya.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sumber pendapatan, serta perekonomian Regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pendapatan di sektor pertanian dapat di ukur dari nilai PDRB yang dihasilkan sektor tersebut. Berikut data perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB) di kabupaten Kutai Barat selama tahun 2018 -2021 menurut Lapangan Usaha.

Tabel 3.12
**PERSENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA DI
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018-2021**

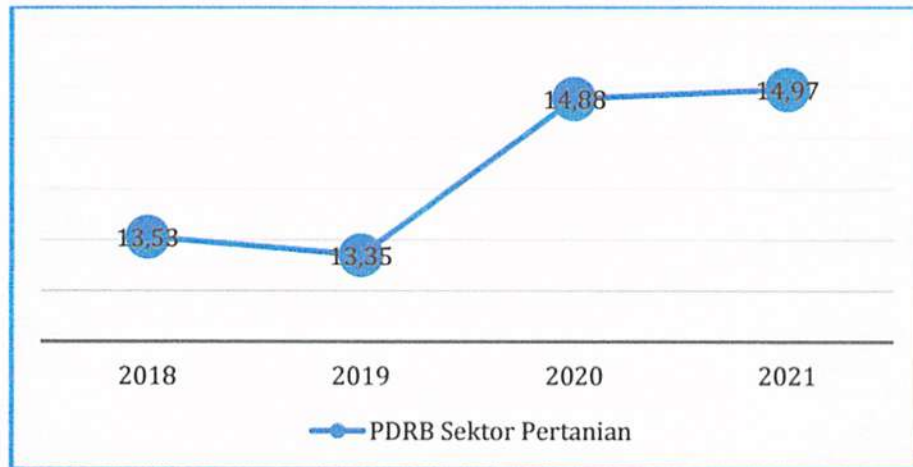
Kategori		2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,53	13,35	14,88	14,97
B	Pertambangan dan Penggalian	51,85	49,88	45,50	49,15
C	Industri Pengolahan	5,69	5,66	6,54	6,38
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	11,08	11,88	12,11	10,84
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,88	7,50	8,20	7,23
H	Transportasi dan Pergudangan	1,49	1,62	1,68	1,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,31	0,34	0,34	0,31
J	Informasi dan Komunikasi	0,98	1,05	0,34	1,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,12	0,13	1,22	0,13
L	Real Estate	0,52	0,54	0,14	0,49
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,07	0,06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,76	5,04	5,23	4,45
P	Jasa Pendidikan	1,56	1,66	1,92	1,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,80	0,88	1,15	1,12
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,32	0,37	0,39	0,34
Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product		100	100	100	100

Sumber : BPS Kutai Barat dalam angka 2021

Sektor Pertanian sebagai salah penyumbang PDRB di Kutai Barat perkembangannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2021 Sektor pertanian menyumbang 14,97 % atau naik 0,09% dari Tahun 2020 sebesar 14,88. Untuk lebih

jelasan perkembangan kontribusi sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 3.2
**PERTUMBUHAN KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DALAM ARTI
LUAS TERHADAP PDRB 2018 - 2021**



Peningkatan sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB disumbang dari beberapa sektor diantaranya dari sektor Pertanian, Perkebunan Peternakan, dan Perikanan. Berikut Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021.

Tabel 3.13
**JUMLAH PRODUKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2021**

No	Jumlah Produksi Komuditas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pertahun (Ton)	Target	Realisasi
1	Padi Sawah	25.554,10	25.216,84
2	Padi Ladang	5.033,90	3.217,43
3	Jagung	272,5	2.892,23
4	Ubi Kayu	8.783,40	6.833,87
5	Ubi Jalar	845,7	1.430,63
6	Durian	506,5	542,50

7	Langsat	129,1	64,70
8	Cabe Rawit	199,1	554,50
9	Kacang Panjang	127,8	586,30
10	Kangkung	74,7	301,40

Sumber : LKjIP Dinas Pertanian 2021

Tabel 3.14
JUMLAH PRODUKSI PERKEBUNAN TAHUN 2021

No	Jumlah Produksi Perkebunan Pertahun (Ton)	Target	Realisasi
1	Karet	64.874,02	65.912,00
2	Sawit	31.378,50	32.404,53
3	Kakao	16,89	18,85

Sumber : LKjIP Dinas Pertanian 2021

Tabel 3.15
JUMLAH PRODUKSI DAN POPULASI PETERNAKAN TAHUN 2021

No	Jumlah Produksi dan Populasi Pertahun (Ekor)	Target	Realisasi
1	Sapi Potong	10.584	6.854
2	Kerbau	988	937
3	Kambing	6.658	3.460
4	Babi	3.308	32.783
5	Ayam Ras Pedaging	159.997	2.493.640
6	Ayam Buras	18.096	23.905
7	Itik	206.089	227.247
8	Produksi Daging Pertahun (Ton)	771.735	116.343
9	Produksi Telur pertahun (butir)	10.558	102.210

Sumber : LKjIP Dinas Pertanian 2021

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus berupaya agar sektor Pertanian menjadi sektor unggulan yang bisa menopang perekonomian, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan terhadap kompetensi Petani melalui Kelompok Tani dan memberikan Pelatihan kepada Penyuluh Pertanian sehingga memiliki kompetensi dalam memberikan Penyuluhan kepada Kelompok Tani. Diharapkan dengan upaya yang dilakukan bisa meningkatkan Pendapatan Petani. Berikut informasi dalam bentuk Tabel terkait upaya yang dilakukan melalui Dinas Pertanian.

Tabel 3.16
**PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI DAN PENYULUH
TAHUN 2021**

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Prosentase Kelompok Tani yang memiliki Sertifikasi Kategori Lanjut	14	48,23
2	Prosentase Penyuluh Bersertifikat Kompetensi Ahli	38	38
3	Rata-rata Pendapatan Petani/Tahun (Rp)	15.750.014	13.450.048

Sumber : LKJIP Dinas Pertanian 2021

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung kontribusi sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB diantaranya adalah sebagai berikut :

Meningkatkan produktivitas usaha kluster karet, dengan arah kebijakan :

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani/koperasi petani sebagai suatu badan usaha ekonomi yang memenuhi syarat untuk memperoleh HGU lahan. Perluasan kebun karet rakyat diarahkan hanya pada wilayah wilayah yang sesuai dan

- tersedia serta masyarakatnya telah mengetahui budidaya karet secara baik;
- b. Penyediaan dana untuk pembangunan kebun karet rakyat; secara aktif memberikan fasilitasi agar petani yang tergabung dalam kelompok tani/koperasi petani dapat memperoleh dana dari program revitalisasi perkebunan;
 - c. Perluasan areal tanaman produktif dengan peremajaan kebun karet rakyat tanaman tua/tanaman rusak;
 - d. Memberikan dukungan/bantuan alsinta, dan saprodi dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha petani karet untuk Peningkatan kemampuan petani dalam mengadakan sarana produksi sesuai standar dengan Ketersediaan Bibit karet unggul bersertifikat, pupuk anorganik, herbisida, dan pestisida;
 - e. Akses permodalan usaha bagi petani karet;
 - f. Pembinaan teknik *good agricultural practices*=GAP dan manajemen dalam upaya meningkatkan produktivitas usaha dan mutu karet melalui Peningkatan pengetahuan petani tentang budidaya karet yang baik dengan peningkatan intensitas penyuluhan. Keberadaan BPP didukung oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) yang berkompoten di bidang budidaya karet dan peningkatan kualifikasi pendidikan PPL ke tingkat yang lebih tinggi untuk peningkatan kapasitas BPP.
 - g. Penguatan bargaining position petani karet melalui penguatan kelompok tani karet; menumbuhkan penangkar-penangkar bibit karet unggul bersertifikat di wilayah sentra produksi karet, memanfaatkan kebun-kebun entres karet unggul yang sebagai sumber perbanyak bibit.
 - h. Membina kelompok tani karet untuk dapat menyusun RDKK sehingga mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi (Urea, SP-36, ZA, NPK) dan mendorong tumbuhnya distributor pupuk serta kios pengecer di wilayah Kutai Barat .
 - i. Peningkatan nilai tambah produk karet melalui mendorong petani meningkatkan mutu lum (harus bersih dari ampuran

- kotoran) sehingga tidak terkena rafaksi/potongan pada saat penjualan.
- j. Meningkatkan jumlah PBS untuk investasi pabrik pengolahan karet di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
 - k. Revitalisasi kelompok tani karet; melalui Kelembagaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani menjadi kelompok agribisnis yang professional Dan petani dapat mengadakan sarana produksi untuk melaksanakan budidaya karet sesuai standar.
 - l. Menjalinkan kemitraan dengan perusahaan besar dan BUMN untuk menampung hasil karet.

2. Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam periode tertentu. Salah satu sektor PDRB adalah Pertanian dalam arti luas yang didalamnya terdapat sektor Kelautan dan Perikanan.

Dengan semakin banyak jumlah produksi perikanan baik yang diperoleh dari hasil budi daya maupun dari hasil perikanan umum yang ada di kawasan perairan di Kabupaten Kutai Barat serta adanya investasi di bidang Perikanan akan memberikan dampak yang positif terhadap PDRB di Kabupaten Kutai Barat terutama dari sektor-sektor perikanan itu sendiri.

Kedua sektor itu merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perikanan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya.

Tiap tahunnya sektor perikanan memberikan kontribusi positif terhadap PDRB Kabupaten Kutai Barat dimana tiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang cukup baik tentu ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian di Kabupaten Kutai barat.

Pertumbuhan perikanan subsektor perikanan rata-rata per tahun sebesar 9,09%, subsektor perikanan umum (perikanan tangkap) sebesar 3,60% dan sub sektor perikanan budidaya sebesar 13,06%.

Sedangkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,42% atau rata-rata setiap tahunnya 0,9%. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat selalu berupaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian bantuan kepada nelayan berupa perahu dan mesin ketinting, pembuatan keramba dan pelatihan pengolahan hasil perikanan.

Dengan pemberian bantuan kepada nelayan dan pelatihan pengolahan hasil perikanan diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan PDRB sektor perikanan.

Tabel 3.17
**PRODUKSI PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2018 -2021**

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.330	1.360	1.412	1.485
2	Produksi Perikanan Budi Daya	Ton	1.413	1.857	1.989	2.177
Total		Ton	2.743	3.217	3.401	3.662

Sumber : Dinas Perikanan Kutai Barat

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas subsektor perikanan dalam mendukung kontribusi sektor

perikanan dalam arti luas terhadap PDRB diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Integrasi pengelolaan hutan gunduk di sekitar DAS Mahakam dan Penegakan aturan sepadan sungai dan danau;
- b. Pengembangan jumlah pembudidaya ikan, Pengembangan kapasitas dan kapabilitas pembudidaya ikan;
- c. Pengembangan teknologi perikanan yang ramah lingkungan meliputi Teknologi benih, Teknologi pakan, Teknologi pengelolaan kualitas air, Teknologi dan manajemen kesehatan ikan, Teknologi pascapanen;
- d. Pengembangan infrastruktur produksi guna mendukung usaha perikanan yang tangguh melalui Pembangunan dan pengembangan hatchery ikan dan unit pembenihan/pendederan rakyat (UPR), Pembangunan dan pencetakan kolam, Pengembangan keramba apung dan keramba tancap, Pengembangan pabrik pakan, Pembangunan dan pengembangan pasar ikan higienis
- e. Pengembangan sarana produksi yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan tepat harga yang mencakup Pengembangan benih, Pengembangan pakan, Pengembangan obat-obatan ikan, Pengembangan peralatan perikanan. Pemberian bantuan/stimulan berupa bibit ikan berkualitas, pakan ikan, peralatan dan perlengkapan budidaya ikan);
- f. Pengembangan Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI);
- g. Pengembangan kelembagaan yang efektif dan tangguh melalui Pembentukan, penguatan dan pembinaan kelompok, Pemberdayaan dan penguatan penyuluh lapangan Penguatan lembaga usaha dalam sistem agribisnis perikanan, Pembinaan teknik produksi budidaya ikan.
- h. Pengembangan unit kolam air deras;
- i. Bantuan pemasaran hasil budidaya ikan.
- j. Pengembangan industri pengolahan perikanan;

3. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Kutai Barat sangatlah banyak antara lain: wisata alam, budaya, religi dan minat khusus seperti wisata agro. Pesona pariwisata yang dimiliki Kutai Barat membuat banyak wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara berkunjung menikmati keindahan pariwisata di Kutai Barat. Sektor pariwisata merupakan sektor yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, termasuk di Kutai Barat. Pariwisata Kutai Barat sudah dikenal oleh wisatawan di beberapa daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk di wilayah Kalimantan Timur. Pariwisata dapat menjadi industri andalan untuk daerah yang tidak memiliki sumber daya alam migas, hasil hutan dan industri manufaktur.

Tabel 3.18
JUMLAH WISTAWAN KUTAI BARAT 2017 - 2021

Tahun	Wisatawan		
	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2017	390	28.584	28.974
2018	279	32.205	32.484
2019	356	65.652	66.008
2020	28	25.929	25.957
2021	5	10.871	10.876

Sumber : Dinas Pariwisata dan BPS Kutai Barat dalam angka

Mengembangkan sektor pariwisata merupakan salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan ekonomi dalam jangka panjang yang perlu diperhatikan.

Tabel 3.19
**JUMLAH TEMPAT WISATA, PENGUNJUNG
DAN RATA-RATA TARIF MASUK**

Tempat Wisata	Pengunjung		Tiket Masuk/Orang	Keterangan
	2019	2020		
Danau Aco	8.303	4.693	5.000	Dikelola Dispar
Danau Bahadaq	299	59	5.000	Dikelola Dispar
Danau Beluq	885	427	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Gemuruh	479	73	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Mapan	5.583	1.694	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Manarung	591	65	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Tabalas	4.273	1.225	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Geronggong	96	7	5.000	Dikelola Dispar
Air Terjun Inar	29	5.000	
Kersik Kerbangan	459	4.200	5.000	Dikelola Dispar
Pancuran Sengkreaq	285	92	5.000	Dikelola Dispar
Situs Sendawar	305	64	5.000	Dikelola Dispar
Lamin Mancong	1.227	266	N.a	Dikelola Provinsi
Hutan Adat Jaras	N.a	N.a	5.000	Dikelola Dispar
Lamin Tembisaq	54	N.a	N.a	
Pemandian Tirta Tapak	6.475	1.605	15.000	Dikelola swasta
Kolam renang TKP	22.532	6.833	25.000	Dikelola swasta
Cia Wisata	3.267	233	5.000	Dikelola swasta
Taman Budaya Sendawar	5.568	753		Dikelola Dispar
Hemaq Beniung			2.000	Dikelola Kampung
Gunung S			5.000	Dikelola Kampung
Perkemahan Batuq Bura			5.000	Dikelola Kampung

Sumber : Dinas Pariwisata dan BPS Kutai Barat dalam angka

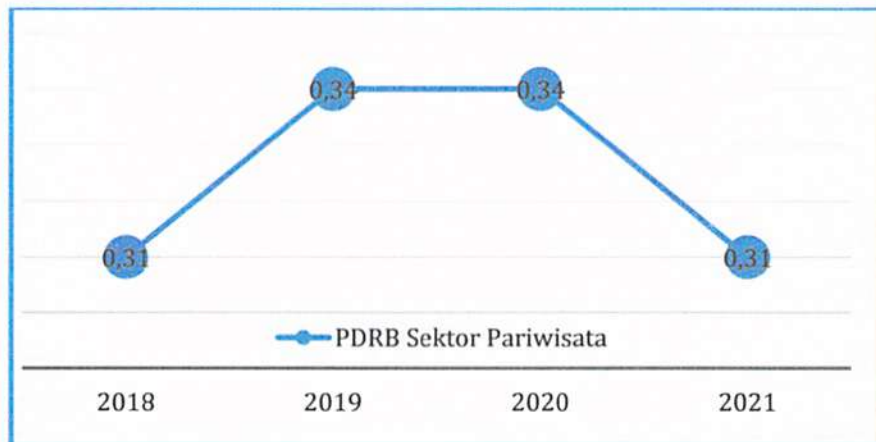
Ada beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain tenaga kerja, kapital, sumberdaya alam, tingkat teknologi dan kondisi sosial dalam negara yang bersangkutan. Banyak keuntungan yang didapat dari

pengembangan potensi sektor pariwisata di Kutai Barat karena sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam membentuk besaran PDRB Kabupaten Kutai Barat. Perkembangan sektor pariwisata di Kutai Barat dari tahun ke tahun cukup signifikan. Kontribusi sektor pariwisata pada tahun 2020, pariwisata memberikan kontribusi sebesar Rp. 93.432.000.000,00 terhadap PDRB Kutai Barat. Kemudian pada tahun 2021 kontribusi sektor pariwisata meningkat menjadi Rp. 98.300.000.000,00 (BPS, Kubar dalam angka 2021). Dari total kontribusi tersebut perlu diteliti mana faktor yang perlu diberikan perhatian lebih untuk saat ini digarap sebagai skala prioritas pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Menurut Hysa (2012) dua komponen utama yang mempengaruhi pergerakan pariwisata adalah jumlah wisatawan dan lama tinggal wisatawan. Saat ini pariwisata telah menjadi kebutuhan pokok sebagian besar manusia di dunia. Semakin sejahtera seseorang maka semakin banyak peluang dan keinginan untuk melakukan perjalanan wisata. Hal ini dapat dilihat dari total kunjungan wisatawan ke Kutai Barat yang semakin meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2021 wisatawan yang berkunjung ke Kutai Barat berjumlah 10.876 Orang, angka ini turun sebesar 58,09% bila dibandingkan dengan kunjungan di tahun 2020 yang jumlahnya 25.957 orang (Disbudpar, 2021). Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di suatu daerah. Pengaruh kontribusi sektor pariwisata yang lain dapat dilihat dari lama tinggal wisatawan yang berkunjung ke Kutai Barat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang disebabkan berbagai sektor Salah satunya sektor Pariwisata, khususnya di Kutai Barat. Kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari variabel investasi di bidang hotel, jumlah wisatawan asing dan lama mereka tinggal. Dari hasil analisis data time series selama 4 tahun dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menunjukkan bahwa, sektor Pariwisata berdasarkan ketiga variabel tersebut mempunyai

kontribusi positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat secara bersama-sama (simultan).

Grafik 3.3
**PDRB SEKTOR PARIWISATA (AKOMODASI DAN MAKAN MINUM)
TAHUN 2018 - 2021**



Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Situasi Pandemi COVID-19 yang masih belum reda, sehingga membatasi dan menghambat kegiatan untuk mencapai target kinerja seperti yang telah tertuang dalam perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2021;
2. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata.
3. Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata belum memadai.
4. Masih terbatasnya upaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kutai Barat.
5. Masih terbatasnya informasi terkait objek dan daya tarik wisata.
6. Objek wisata yang ada tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan dalam klaim masyarakat secara individu, yang mana sebagian besar mereka yang mengaku sebagai pemilik

tidak memiliki dokumen yang sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Strategi untuk memecahkan masalah dan kendala tersebut adalah:

1. Meningkatkan efektivitas peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan pemasaran kepariwisataan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memantapkan manajemen pembangunan bidang kepariwisataan.
3. Peningkatan peran aktif masyarakat diarahkan pada upaya untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan obyek wisata.
4. Mewujudkan pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing dengan mengembangkan destinasi atau objek dan daya tarik wisata yang potensial di Kutai Barat.
5. Untuk mengurai permasalahan kepemilikan lahan seperti itu, di perlukan koordinasi lintas sektoral guna merumuskan solusi legalitas objek wisata.

Tabel 3.20
**REALISASI KINERJA SASARAN 1 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

Indikator Kinerja	Realisasi s/d Tahun 2021	Target akhir RPJMD 2026	Presentase Capaian Kinerja
Kontribusi Sektor Pertanian dalam arti luas terhadap PDRB	14,97	15,85	94,45
Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	1,42	0,675	210,37
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,31	0,55	88,57

SASARAN 2

TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA BARU DAN WIRAUSAHAWAN LOKAL BARU

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan" dengan tujuan "Menurunkan Angka Kemiskinan".

Adapun Indikator Kinerja sasaran ini adalah : **Tingkat Pengangguran Terbuka** dan **Prosentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**. Sedangkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab keberhasilan sasaran ini adalah **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dan Dinas **Perdagangan, Koperasi dan UMK**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 2 menggunakan 2 indikator kinerja yaitu "**Tingkat Pengangguran Terbuka**" dan "**Prosentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil**" dengan tingkat keberhasilan **284,81%** dengan kategori "**MELAMPAUI TARGET (MT)**". Pencapaian target kinerja sasaran **Terciptanya Lapangan Kerja baru dan wirausahawan lokal baru** seperti tampak pada tabel 3.21

Tabel 3.21

CAPAIAN KINERJA TERCIPTANYA LAPANGAN KERJA BARU DAN WIRAUSAHAWAN LOKAL BARU

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,4	4,97	107,96	4,8	5,14	-2,28	TIDAK TERCAPAI
2	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	N.a	N.a	N.a	0,35	1,00	287,09	MELAMPAUI TARGET
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					284,81			MELAMPAUI TARGET

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran 2 yakni Terciptanya Lapangan Kerja baru dan Wirausahawan baru dapat disimpulkan memberikan hasil kinerja yang sangat baik bahkan melampaui target yang sudah ditetapkan. Walaupun pada indikator tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang signifikan hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 dan turunnya harga komoditas batubara pada awal tahun 2021 yang menyebabkan beberapa perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat dijelaskan melalui analisis sebagai berikut :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan keadaan seseorang belum mendapatkan pekerjaan dimana seseorang tersebut termasuk dalam angkatan kerja (Sukirno, 1994). Pengangguran terbuka merupakan salah satu jenis pengangguran dimana angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Konsep milik Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka dapat diukur dengan presentase pengangguran terhadap angkatan kerja, hasil perhitungan tersebut dinamakan tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Berdasarkan data dari BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kutai Barat berfluktuasi, ditandai dengan adanya penurunan dan juga peningkatan. Dimulai pada tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka Kutai Barat ada diangka 4,86% kemudian naik 0,22 % di tahun 2019 menjadi 5,08%. Ditahun 2020 mengalami penurunan 0,11% diangka 4,97. Namun di tahun

2021 naik kembali sebesar 0,17 % diangka 5,14%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada grafik 3.4 berikut ini.

Grafik 3.4
**PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
KABUPATEN KUTAI BARAT**



Sumber data : BPS, Kutai Barat dalam Angka

Secara umum ada 5 penyebab terjadinya pengangguran, yaitu :

1. Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja;
2. Terbatasnya kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi;
3. Kondisi pandemic covid-19 dengan adanya kebijakan PPKM;
4. Masih rendahnya kualitas angkatan kerja;
5. Kesenjangan persediaan tenaga kerja dengan kebutuhan akan tenaga kerja yang tidak sesuai dan motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru masih rendah.

Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten merupakan salah satu target yang harus dicapai dalam pembangunan Kutai Barat, khususnya dalam rangka penurunan angka pengangguran. Upaya yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan tenaga kerja trampil, kompeten dan profesional yang mengarah pada standar kualifikasi tenaga kerja yang memiliki kompeten knowledge, skill dan attitude serta

ketrampilan sosial (*social skill*), adalah dengan melaksanakan program-program pelatihan/*vocational training* yang intens dan berkelanjutan melalui lembaga pelatihan kerja baik pemerintah maupun swasta dan stake holders yang lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pelatihan.

Pelatihan kerja harus didukung sumber daya pelatihan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, yaitu : 1. Program pelatihan 2. Sumber daya manusia termasuk instruktur 3. Peralatan dan sarana prasarana 4. Bahan pelatihan 5. Manajemen 6. Anggaran / dana.

Permasalahan ketenagakerjaan memang sangat kompleks, hal ini antara lain disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah angkatan kerja dari waktu ke waktu, dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan pendidikan.

Setiap tahun akan memberikan kontribusi penganggur baru yang berasal dari lulusan baru dari pendidikan (*fresh graduate*). Belum lagi dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini juga berdampak yang luar biasa dibidang ketenagakerjaan, seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan kasus Perselisihan Hubungan Industrial. Pada Tahun 2021 Jumlah PHK sebanyak 10 Kasus dan 8 Kasus Perselisihan Hubungan Industrial terkait HAK. Dari 2 Kasus tersebut sebanyak : 130 orang tenaga kerja yang di PHK dan sebanyak 14 Tenaga Kerja yang pada Kasus Perselisihan Hubungan Industrial.

Tabel 3.22

DATA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TAHUN 2021

NO	URAIAN	PHK	HAK	TOTAL
1	Jumlah Kasus	10	8	18
2	Jumlah Tenaga Kerja	130	14	144
3	Jumlah Perusahaan	10	8	18

Tabel 3.23
PENCARI KERJA MENURUT KELOMPOK PENDIDIKAN TAHUN 2021

PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
TIDAK TAMAT SD	214	28	242
SD	109	21	130
SLTP	275	57	332
SLTA	862	381	1.243
SMK	836	336	1.172
DIPLOMA I	3	1	4
DIPLOMA II	0	1	1
DIPLOMA III	66	96	162
SARJANA S1	169	151	320
SARJANA S2	3	0	3
TOTAL	2.537	1.072	3.609

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai upaya Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah Meningkatkan akses pencari kerja terhadap lapangan kerja terutama di sektor formal dengan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana bidang ketenagakerjaan secara holistik dan integratif;
- b. Peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya penyediaan tenaga kerja sesuai kualifikasi atau kebutuhan lapangan kerja dan membekali keterampilan penduduk sebelum bekerja;
- c. Optimalisasi peran IT dalam mengkomunikasikan dan memberikan informasi dan pelayanan terkait lapangan kerja dan pencari kerja;
- d. Peningkatan kerja sama dengan stakeholders dan penguatan kerja sama dengan variasi stakeholders lain dalam teknis kegiatan peningkatan kesempatan kerja;
- e. Peningkatan peran hubungan industrial dalam penyusunan

kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.

2. Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pembangunan ekonomi saat ini. Pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat didorong oleh beberapa sektor, salah satu sektor yang mempunyai peran sangat strategis adalah sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah atau UMKM. Berikut Tabel Perkembangan UMKM di Kabupaten Kutai Barat 2018 – 2021:

Tabel 3.24
**PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018 – 2021**

No	Kriteria	2018	2019	2020	2021
1	Usaha Mikro	3.354	3.364	6.164	10.748
2	Usaha Kecil	115	130	145	253

Sumber : LKjIP Disdagkop UKM Tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pada tahun 2015 lalu telah membentuk Unit Pengelola Teknis- Unit Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM disingkat UPT UPD KUMKM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015.

UPT- UPD KUMKM tersebut sangat membantu masyarakat pelaku UMKM terkait permasalahan permodalan. Dengan Penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebesar Rp. 5.000.0000.000,00 telah menyalurkan bantuan permodalan ke UMKM di 16 Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dana tersebut dikelola terus menerus secara bergulir untuk membantu pelaku UMKM. Keuntungan dari Pengelolaan Dana Bergulir tersebut masuk sebagai Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Berdasarkan data dari LKjIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK, realisasi pendapatan dari pengelolaan Dana Bergulir UPT UPD KUMK tahun 2016 adalah 129.585.868.45 dari target 112.875.000, maka tercapai 114,80%. Dan pada tahun 2017 realisasi pendapatan adalah 204.717.089.35 dari target 120.000.000, maka tercapai 170,60%. Dan pada tahun 2018 realisasi pendapatan 233.968.484.10 dari target 150.000.000, maka tercapai 155.98%. dan pada tahun 2019 realisasi pendapatan 497.854.859.36 dari target 170.000.000, maka tercapai 292.86% dan pada tahun 2020 realisasi pendapatan 260.594.003,43 dari target 275.000.000, maka tercapai 94.76%., Tahun 2021 realisasi pendapatan 310.442.932,41 dari target 250.000.000, maka tercapai 124.18%

Sampai dengan tahun 2021 UPT UPD KUMK telah melakukan bantuan permodalan bagi pelaku UMKM. Dari total pemohon UMKM sebanyak 408 orang, realisasi penyaluran pinjaman kepada pelaku yang lolos verifikasi dan analisa kelayakan usaha sebanyak 292 UMKM dengan jumlah dana yang digulirkan sebesar Rp. 10.451.000.000.- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah). Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Kutai Barat. Peningkatan tersebut bisa dilihat pada Grafik 3.5 dibawah ini.

Grafik 3.5
**PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018 – 2021**



Meningkatnya perkembangan usaha dari Mikro ke Kecil di Kabupaten Kutai Barat karena adanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK melalui upaya :

- a. Penyederhanaan perijinan usaha bagi UMKM;
- b. Keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM;
- c. Pemberian bantuan permodalan bagi UMKM (BPUM);
- d. Peningkatan kualitas SDM pelaku UMKM (Pelatihan baik melalui anggaran Propinsi dan Daerah); dan
- e. Pengembangan pola kemitraan dan kerjasama dengan Perusahaan yang berada di Kabupaten Kutai Barat dalam pengembangan UMKM;

Adapun Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung prosentase Usaha Mikro menjadi Usaha kecil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah pelaku UMKM berbasis komoditas unggulan yang berdaya saing, Peningkatan keterampilan pelaku UMKM melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM;
2. Optimalisasi peran perusahaan besar swasta dalam menyediakan Kesempatan dan peluang berusaha yang sesuai dengan potensi unggulan lokal dan kemampuan masyarakat lokal berbasis Kawasan berkelanjutan pada kampung-Kampung disekitar perusahaan melalui kegiatan kegiatan pada PPM (Program Pemberdayaan masyarakat) untuk Meningkatkan Status IDM (indeks Desa Membangun) pada kampung kampung disekitar Perusahaan dalam upaya meningkatkan Status Kampung dari Kategori Desa tertinggal, berkembang dan Maju menuju kategori Desa Mandiri pada seluruh kampung disekitar Perusahaan.
3. Pembinaan kepada pelaku UMKM dan IKM, terutama dalam mendorong inovasi produk dan proses produksi;

4. Kemudahan dalam proses perijinan usaha bagi UMKM dan IKM;
5. Fasilitasi kerjasama usaha UMKM dengan perusahaan mitra;
6. Peningkatan wawasan peluang usaha bagi calon pelaku usaha UMKM dan IKM;
7. Melakukan percepatan penyerapan izin usaha pelaku UMKM dan industri (IKM) serta pemberian stimulus modal bantuan usaha melalui Fasilitasi permodalan bagi UMKM dan IKM;
8. Pengembangan variasi produk yang mampu merespon dinamisasi pasar melalui workshop untuk pengembangan variasi produk dan kualitas produk dari sisi produksi, branding, pengemasan dan pemasaran;
9. Pengembangan fasilitas produk berskala nasional melalui pameran berskala nasional yang menampilkan produk industri lokal Promosi dan fasilitasi pemasaran produk UMKM dan IKM;
10. Bimbingan manajemen UMKM dan IKM.

SASARAN 3**MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK MASYARAKAT KUTAI BARAT**

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 3 menggunakan indikator kinerja yaitu PDRB Perkapita dengan tingkat keberhasilan 97,83% dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat** seperti tampak pada tabel 3.25

Tabel 3.25
CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA STANDAR HIDUP LAYAK MASYARAKAT KUTAI BARAT

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	PDRB PerKapita	177 Juta	183,84 Juta	103,86	188,54	184,46	97,83	TIDAK TERCAPAI
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					97,83			SANGAT BERHASIL

Berdasarkan tabel 3.25 diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran Meningkatkan Standar Hidup Layak Masyarakat Kutai Barat dapat disimpulkan bahwa sasaran 3 memberikan hasil kinerja yang baik meskipun ditahun 2021 ini belum memenuhi target yang sudah ditetapkan. Namun jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 mengalami peningkatan.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

1. PDRB Per Kapita

Sebuah negara ataupun daerah pasti memiliki pendapatannya sendiri, biasanya berasal dari proses transaksi yang mereka lakukan di dalamnya. Hal tersebut bisa juga disebut indikator perekonomian. Indikator ekonomi ini bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi yang memiliki tingkatan dari nasional hingga daerah.

Pada tingkat nasional indikator ini disebut Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara, untuk tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten/kota bahkan kecamatan, hal itu dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Oleh karena perannya sebagai salah satu indikator utama dalam perekonomian, hal tersebut membuat PDRB ini secara otomatis memegang peranan penting. Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun.

Berikut perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Kutai Barat 2018 -2021 yang terlihat dalam grafik 3.6 dibawah ini:

Grafik 3.6
**PERKEMBANGAN PDRB PERKAPITA
KABUPATEN KUTAI BARAT 2018 -2021**



Dari grafik 3.6 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 3 tahun 2018 - 2020 target PDRB Perkapita selalui melampaui target yang ditetapkan. Pada Tahun 2018 PDRB Perkapita ditetapkan sebesar 161 Juta, realisasi tahun 2018 192,1 Juta, pada Tahun 2019 Target sebesar 169 Juta Realisasi 197,14 Juta. Ditahun 2021 target PDRB Perkapita di target 177 Juta Realisasi 183,84 Juta. Namun pada Tahun 2021 Target PDRB Perkapita di target 188,54 Juta realisasinya hanya 186,46 Juta.

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data pengeluaran dan konsumsi penduduk didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Data berasal dari kuesioner Konsumsi dan Pengeluaran (Daftar VSEN2017. KP).

Mulai tahun 2015, pengumpulan data SUSENAS dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret untuk pengumpulan data KOR dan konsumsi/ pengeluaran rumah tangga.

Serta pada bulan September untuk pengumpulan data modul dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Pelaksanaan SUSENAS Maret 2017 mencakup 300.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh provinsi. Target sampel SUSENAS September adalah 75.000 rumah tangga.

Data konsumsi/pengeluaran di bagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2017, jumlah komoditi yang disurvei sebanyak 112 komoditi yang terbagi dalam 14 kelompok. Pengumpulan data kelompok makanan meliputi banyaknya (kuantitas) komoditi yang dikonsumsi beserta nilai pengeluarannya. Sementara pengumpulan data pada sebagian besar kelompok bukan makanan hanya mencakup nilai pengeluaran barang yang dikonsumsi, kecuali beberapa jenis barang juga dikumpulkan kuantitasnya seperti listrik, air, gas dan BBM. Komoditi non makanan terbagi dalam 6 kelompok.

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kutai Barat tahun 2021 adalah Rp 1 529 795 ,-. Jumlah ini terdiri dari makanan dan bukan makanan. Untuk makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 780 784 ,-. dan untuk bukan makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah sebesar Rp 747 011 ,-. Hal ini artinya lebih besar pengeluaran untuk non-makanan daripada makanan. Ciri-ciri masyarakat yang sejahtera apabila pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar daripada makanan, hal ini menandakan bahwa pemerintah di kabupaten Kutai Barat harus lebih bekerja keras untuk menuju masyarakat Kutai Barat yang sejahtera.

Diketahui bahwa untuk makanan, komoditas makanan dan minuman jadi yang paling besar dibandingkan dengan komoditas makanan jadi, yaitu sebesar Rp 227.403,-. Kemudian diikuti oleh komoditas ikan/udang/ cumi/kerang sebesar Rp 93.073,- dan selanjutnya yang menempati posisi ketiga adalah komoditas rokok sebesar Rp 93.013,-. Jika kita tinjau dari bukan makanan, diketahui bahwa komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga adalah komoditas terbesar untuk kelompok bukan makanan, yaitu sebesar

Rp 412.065,- atau sebesar 27,94 persen. Kemudian diikuti oleh Aneka komoditas dan jasa sebesar Rp 138.135,- atau sebesar 9,03 persen.

Tabel 3.26

**RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT
KELOMPOK KOMODITAS (RUPIAH) DI KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2020 DAN 2021**

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian	75 955	76 589
Umbi-umbian	4 320	4 892
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	85 207	93 073
Daging	48 227	43 750
Telur dan Susu	54 752	52 962
Sayur-sayuran	40 369	52 989
Kacang-kacangan	10 142	11 659
Buah-buahan	45 543	48 760
Minyak dan Kelapa	16 216	17 556
Bahan minuman	23 825	25 230
Bumbu-bumbuan	14 766	17 275
Konsumsi Lainnya	15 920	17 633
Makanan dan Minuman	189 366	227 403
Rokok	92 008	93 013
Jumlah Makanan/Total Food	720 616	782 784
Bukan Makanan/Non Food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	413 470	412 065
Aneka komoditas dan jasa	130 809	138 135
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	25 614	32 689
Komoditas tahan lama	136 433	104 652
Pajak, pungutan, dan asuransi	40 978	47 604
Keperluan pesta dan upacara	26 695	11 866
Jumlah bukan makanan/Total non-food	774 000	747 011
Jumlah/Total	1 494 615	1 529 795

Sumber : BPS Kutai Barat 2021

Tabel 3.27

**RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT
KELOMPOK KOMODITAS (RUPIAH) DI KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2020 DAN 2021**

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian	5,35	5,01
Umbi-umbian ⁴ 320	0,29	0,32
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	5,70	6,08
Daging	3,23	2,86
Telur dan Susu	3,66	3,46
Sayur-sayuran	2,70	3,46
Kacang-kacangan	0,68	0,76
Buah-buahan	3,05	3,19
Minyak dan Kelapa	1,08	1,15
Bahan minuman	1,59	1,65
Bumbu-bumbuan	0,99	1,33
Konsumsi Lainnya	1,07	1,15
Makanan dan Minuman	12,67	14,86
Rokok	6,16	6,08
Jumlah Makanan/Total Food	48,21	51,17
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	27,66	26,94
Aneka komoditas dan jasa	8,75	9,03
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	1,71	2,14
Komoditas tahan lama	9,13	6,84
Pajak, pungutan, dan asuransi	2,74	3,11
Keperluan pesta dan upacara	1,79	0,78
Jumlah bukan makanan/Total non-food	51,79	48,83
Jumlah/Total	100,00	100,00

Sumber: BPS Kutai Barat 2021

SASARAN 4**TERJAGANYA KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke Pertama yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu **"Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan berbasis kawasan berdasarkan potensi unggulan lokal secara berkelanjutan"** dengan tujuan **"Menjaga Keberlanjutan Kawasan dalam skema Pembangunan Hijau"**.

Adapun Indikator Kinerja sasaran ini adalah : **Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan**. Sedangkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab keberhasilan sasaran ini adalah **Dinas Lingkungan Hidup**.

Untuk menilai keberhasilan/kegagalan sasaran 4 menggunakan 3 indikator kinerja yaitu : Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan dengan tingkat keberhasilan **98,31%** dengan kategori **"SANGAT BERHASIL (SB)"**. Pencapaian target kinerja sasaran **Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup** seperti tampak pada tabel 3.28

Tabel 3.28
CAPAIAN KINERJA TERJAGANYA KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Indeks Kualitas Air				62,1	60,00	96,62	TIDAK TERCAPAI
2	Indeks Kualitas Udara				93,24	91,65	98,29	TIDAK TERCAPAI
3	Indeks Kualitas Lahan				66,06	66,10	100,06	MELAMPAUI TARGET
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran					98,32			SANGAT BERHASIL

Berdasarkan tabel 3.28 diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2021 untuk sasaran 4 yakni Terjaganya Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa sasaran 4 memberikan hasil kinerja yang **sangat berhasil** meskipun ditahun 2021 ada beberapa Indikator Kinerja yang belum memenuhi target yang sudah ditetapkan.

1. Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Pada IKLH 2009 hingga 2011 dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan titik acuan dan metode perhitungan. Sebagai pembanding atau target untuk setiap indikator adalah standar atau ketentuan yang berlaku berdasarkan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti ketentuan tentang baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain itu dapat digunakan juga acuan atau referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (*Benchmark*).

Pada tahun 2012 – 2014 dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau (*green issues*) dan isu coklat (*brown issues*).

Isu hijau adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Isu coklat adalah aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tahun 2016 – 2017 dilakukan penyempurnaan kembali dengan pengembangan metodologi

perhitungan IKA. Pada periode ini status mutu air yang digunakan adalah status mutu air kelas I Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu dilakukan penyempurnaan metodologi perhitungan IKTL dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan aspek rehabilitasi berdasarkan perubahan tutupan lahan/hutan, serta karakteristik wilayah secara spasial. Indikator/parameter yang dipergunakan:

1. Luas tutupan hutan (Forest cover index) dan perubahan tutupan hutan (Forest performance index);
2. Kondisi tutupan tanah (Soil condition index). Indeks ini terkait dengan parameter C (tutupan lahan) dalam perhitungan erosi dan air limpasan;
3. Konservasi sepadan sungai/danau/pantai (Water health index). Kondisi tutupan lahan di kanan kiri sungai (ekosistem riparian); dan
4. Kondisi habitat (Land habitat index). Tingkat fragmentasi hutan/habitat. Luas tutupan hutan (Forest cover index).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Adapun strategi yang akan dilakukan yaitu berupa penguatan sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup dan penyempurnaan IKLH.

Adapun pencapaian sasaran pada indikator kinerja dapat di jelaskan melalui analisis sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Tolak ukur sasaran meningkatnya Kualitas Air diukur dari indikator persentase peningkatan kualitas air yang dihitung berdasarkan rata-rata dikalikan seratus persen (menggunakan metode perhitungan indeks pencemaran air (%)).

Realisasi capaian Indeks Kualitas Air (IKA) diatas Target Kinerja di mana pada target tahun 2021 IKA pada nilai 62.1 sedangkan pada realisasi indeks kualitas Air (IKA) mencapai pada nilai 62.86 sehingga melebihi persentase target capaian kinerja pada indeks IKU mencapai nilai sebesar 102.22%.

Realisasi capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 dan 2021. Di mana capaian tahun 2020 mencapai nilai IKA sebesar 62.00 % dari tahun 2021 yang mencapai nilai IKA sebesar 62.86 %. Nilai Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 tidak melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2021 sebesar 62.1 % dikarenakan faktor berkurangnya jumlah titik pemantauan pada penentuan indeks kualitas air dimana titik pantau pada tahun 2021 sebanyak 14 titik pantau dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 14 titik pemantauan kualitas air.

Adapun perbandingan capaian kinerja indikator terhadap target akhir Renstra adalah 100 %. Angka persentase peningkatan kualitas air pada tahun 2021 dihitung

berdasarkan hasil pemantauan di 7 sungai, yaitu hilir sungai Lawa Kecamatan Muara Lawa, hulu sungai lawa Kecamatan Bentian Besar, Hulu sungai Kelian Kecamatan Linggang Bigung, hulu sungai Kedang Pahu Kecamatan Damai, sungai Sakaq Kecamatan Mook Manaar Bulant, Hilir Sungai Kedang Pahu Kecamatan Muara Pahu, sungai Nyuatan Kecamatan nyuatan, Hilir Sungai Kelian Kecamatan Tering, Sungai Muyub Kecamatan Tering, sungai Encalint Kecamatan Tering . Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas air sungai adalah parameter Persentase (%), parameter Persentase (%). Untuk mencapai target dari sasaran 1 ini maka dilakukan melalui kebijakan:

1. Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan pada wilayah badan air;
2. Peningkatan Kwantitas dan Kwalitas Pemantauan Air sungai

Berdasarkan hasil Titik pantau Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat bahwa kualitas air sesuai baku mutu ada pun hasil pemantauan untuk perentase Indeks kualitas Air (IKA) pada pemantauan dan pengujian kualitas air sungai dengan rumusan indeks pencemaran air sebagai berikut:

$$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i / L_{ij})_M^2 + (C_i / L_{ij})_R^2}{2}}$$

IP_j = indeks pencemaran bagi peruntukan j,

C_i = konsentrasi parameter kualitas air i,

L_{ij} = konsentrasi parameter kualitas air i yang tercantum dalam baku peruntukan air j,

M = maksimum, R = rerata.

Dari 14 (empatbelas) titik untuk pormulasi perhitungan indeks pencemaran air dimana 9 (sembilan) titik yang

memenuhi kadar mutu air serta 5 (lima) titik yang mengalami sebaran ringan.

Jumlah sampel dibagi jumlah sampel keseluruhan :

Persentase Mutu air Memenuhi $9/14 \times 100 = 64$

Indeks mutu air memenuhi $\% \times \text{bobot} = 64 \times 70 = 45\%$

Jumlah sampel dibagi jumlah sampel keseluruhan:

Persentase Mutu air cemaran ringan $5/14 \times 100 = 36$

Indeks mutu air Cemaran ringan $\% \times \text{bobot} = 36 \times 50 = 17.86\%$

Total nilai indeks permutu air = Indeks mutu air memenuhi+
Indeks mutu air Cemaran ringan = $45 + 17.86 = 62.86\%$
(realisasi persentase peningkatan kualitas air tahun 2021)

Indeks Pencemaran Air Pada IKLH= Total nilai indeks
permutu air $\times \text{bobot} = 62.86\% \times \text{Bobot } 37.6\% = 23.63$
(indeks kualitas air)

1. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain:
 - 1) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
 - 2) Ketersedian dan fukuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
 - 3) Penggunaan air; dan
 - 4) Serta tingkat erosi dan sedimentasi.

Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

b. Indeks Kualitas Udara

Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Kabupaten Kutai Barat. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan :

1. Sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. Sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Tolok ukur capaian meningkatnya Kualitas Udara diukur dari indikator yaitu Persentase Peningkatan Kualitas Udara yang dihitung berdasarkan rata-rata peningkatan kualitas udara dengan parameter yaitu Nitrogen Dioksida (NO²) dan Sulfur Dioksida (SO²) sebagai berikut:

$$\text{IKU} = \text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Titik pemantauan kualitas udara pada 13 (empatbelas) titik sampling yang meliputi Titik Pantau Permukiman, Titik

Perkantoran, Titi Pantau Transportasi dan Titik Pantau Industri

Indeks NO^2 =Nilai rata-rata NO^2 /Nilai Baku Mutu=1.781/40=0.0445

Indeks SO^2 = Nilai rata-rata SO^2 /Nilai Baku Mutu=3.432/20=0.1716

Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu) = Jumlah total NO^2 dan SO^2 /rata-rata=0.0445+0.1716/2=0.10806

Indeks Kualitas udara =100 - [50/0.9 x (0.10806 - 0.1) = 99.552083 (**realisasi persentase peningkatan kualitas udara tahun 2021**)

Indeks Pencemaran Udara Pada IKLH= Total nilai indeks permutu air x bobot =99.55% X Bobot 40.5% = **40.35 (indeks kualitas udara)**

Angka persentase peningkatan kualitas Udara pada tahun 2021 dihitung berdasarkan hasil pemantauan yang sudah di tetapkan pada 13 titik pantau yaitu di Depan kantor kecamatan Mook Manaar Bulant dengan koordinat S 00°09'50.62" E 115°52'56.40". Depan Kantor Kecamatan Melak dengan koordinat S 00°14'12.12" E 115°48'46.58" Depan Kantor Camat Damai dengan koordinat S 00°27'07.34" E 115°42'00.74" kecamatan Muara Lawa dengan Koordianat S 00°30'06.00" E 115°44'58.75" Depan Kantor Skretariat Pemilihan Kecamatan Long iram dengan Koordinat S 00°01'04.63" E 115°37'33.34" Pelabuhan Tering denga Koordinat S 00°04'25.62" E 115°38'42.31" di depan Pasar Nala Kecamatan Linggan Bigung dengan Koordinat S 00°08'36.83" E 115°37'49.37" Depan Kantor kecamatan Siluq Ngurai dengan Koordinat S 00°32'29.84" E 115°54'10.38" SPBU Muara Nayan Kecamatan Jempang Dengan Koordinat S 00°34'16.19" E 116°05'31.45" depan Kantor Kecamatan Bongan dengan Koordinat S 00°45'01.43" E 116°14'32.73" Pemantauan pada titik

pantau yang telah ditetapkan dilakukan secara periodic (setiap 6 bulan dalam satu tahun). Parameter kunci yang digunakan untuk menilai kualitas udara adalah Persentase.

Untuk mencapai target dari sasaran 4 ini maka dilakukan langkah- langkah kebijakan: Dengan melakukan pemantauan kualitas udara ambient didaerah pemukiman/perkotaan/perkampungan secara periodik (sesuai PP No 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

Berdasarkan hasil Titik pantau DLH dapat dilihat bahwa kualitas udara ambient masih dalam kisaran sesuai baku mutu ada pun hasil pemantauan untuk kualitas udara Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2015 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau: 1) Barong = 401 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2) Melak = 399 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3) Bigung = 410 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4) Lawa= 427 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Sedangkan untuk data Tahun 2016 tidak ada kegiatan pengujian udara ambien.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2017 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau: 1) Barong = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2) Melak= < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3) Bigung = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4) Tering = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2018 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau: 1) Barong = < 1218 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 2) Melak= < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 3) Bigung = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 4) Tering = < 1190 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$, 5) Sekolaq Darat = < 1140 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,6) Long Iram = < 1190 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 30.000 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2019 dengan parameter CO terpantau untuk titik pantau:

- 1) Depan Kantor Bupati Kutai Barat Kec. Barong

- Tongkok = < 1140 ug/Nm³,
- 2) Halaman Pasar H. Imansyah Said Kec. Melak= < 1140 ug/Nm³,
 - 3) Pertigaan Tugu Tombak Kec. Sekolaq Darat = < 1140 ug/Nm³,
 - 4) Halaman Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = < 1140 ug/Nm³,
 - 5) Halaman Pelabuhan Tering Kec. Tering = < 1140 ug/Nm³,
 - 6) Lingkungan SD 001 Long Iram Kec. Long Iram = < 1140 ug/Nm³Dengan Standar Baku Mutu 30.000 ug/Nm³.

Dengan adanya perubahan target dan realisasi pada tahun 2019 yang memakai nilai baku mutu parameter CO (carbon dioksida) dan HC (hidro Carbon) sebagai nilai target dan realisasi sehingga perubahan target dan realisasi pada persentase kualitas udara di tahun 2020 yang menggunakan indeks kualitas udara (IKU) sebagai dasar perhitungan penetapan pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Yang memakai dua parameter kualitas lingkungan yang terbaru yaitu parameter SO² dan NO².

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2020 dengan parameter SO² terpantau untuk titik pantau:

- 1) Depan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok = 0.156 ug/Nm³,
- 2) Di Pelabuhan Sendawar Kec. Melak= 0.156 ug/Nm³,
- 3) Depan Kantor Kec. Long Iram = 0.156 ug/Nm³,
- 4) Depan Kantor Kec. Tering = 0.156 ug/Nm³,
- 5) Depan Kantor Kec. Damai = 0.156 ug/Nm³,
- 6) Depan Kantor Kec. Muara Lawa = 0.156 ug/Nm³,
- 7) Tugu Simpang 3 (tiga) Kec. Sekolaq Darat = 0.156 ug/Nm³,
- 8) Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = 0.156

$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu $20 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

NO^2 terpantau untuk titik pantau:

- 1) Depan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kec. Barong Tongkok = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 2) Di Pelabuhan Sendawar Kec. Melak = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 3) Depan Kantor Kec. Long Iram = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 4) Depan Kantor Kec. Tering = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 5) Depan Kantor Kec. Damai = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 6) Depan Kantor Kec. Muara Lawa = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 7) Tugu Simpang 3 (tiga) Kec. Sekolaq Darat = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 8) Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = $0.137 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu $40 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Data Tingkat kualitas Udara ambien pada tahun 2021 dengan parameter SO^2 terpantau untuk titik pantau:

- 1) Depan Kantor Kecamatan Mook Manaar Bulant = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 2) Depan Kantor kecamatan Melak = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 3) Depan Kantor Kecamatan Damai = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 4) Kecamatan Muara Lawa = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 5) Depan Kantor Sekretariat Pemilihan Kecamatan Long Iram = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 6) Pelabuhan Tering = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 7) Depan Kantor Kecamatan Siluq Ngurai = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 8) Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$
- 9) SPBU Muara Nayan Kecamatan Jempang = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$
- 10) Depan Kantor Kecamatan Bongan = $15.6 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu $20 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

NO^2 terpantau untuk titik pantau :

- 1) Depan Kantor Kecamatan Mook Manaar Bulant = $13.7 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$,

- 2) Depan Kantor kecamatan Melak = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 3) Depan Kantor Kecamatan Damai = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 4) Kecamatan Muara Lawa = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 5) Depan Kantor Sekretariat Pemilihan Kecamatan Long Iram = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 6) Pelabuhan Tering = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 7) Depan Kantor Kecamatan Siluq Ngurai = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$,
- 8) Depan Pasar Nala Kec. Linggang Bigung = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
- 9) SPBU Muara Nayan Kecamatan Jempang = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Depan Kantor Kecamatan Bongan = 13.7 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ Dengan Standar Baku Mutu 40 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Salah satu upaya mitigasi yang telah dilakukan Pemerintah Kutai Barat dalam pengendalian pencemaran udara dilaksanakan melalui 2 Program utama yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Program ini merupakan upaya memperbaiki kualitas lingkungan, melalui kegiatan Koordiansi, Singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media Tanah, Air Udara dan Laut Pada tahun 2021 Pengujian Kualitas Lingkungan yang merupakan upaya pemantauan kualitas udara ambient dilingkungan pemukiman yang dilakukan melalui kegiatan pengujian kualitas udara ambient yang dilakukan di 10 kecamatan Pelabuhan kapal Kec. Melak, kantor panwaslu Long Iram, pelabuhan kapal tering, kator BPU Damai, samping jembatan gantung Payang (Muara Lawa), Pasar Nala (kec. Linggang Bigung), Tugu simpang 3 Sekolaq Darat, Kantor Kecamatan Mook Manaar Bulant, Kantor kecamatan Siluq Ngurai, simpang APMS kecamatan Jempang, dan Kantor Kecamatan Bongan.

2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pada tahun 2021 dilaksanakan rencana pengawasan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL-UPL Pada Pemanfaat Sumber Daya Alam Terhadap 11 Pelaku kegiatan, pengawasan yang dilaksanakan terealisasi hanya pada terhadap 11 pelaku usaha/kegiatan. Sehingga cakupan pengawasan kegiatan/usaha terhadap pelaksanaan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL-UPL Pada Pemanfaat Sumber Daya Alam dan hukum lingkungan yang dapat dilaksanakan pada tahun 2021 adalah: $6/11 \times 100\% = 54.54\%$.

Adapun nama-nama pelaku usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan pada tahun 2021 terdiri dari: **PT. Aneka Reksa Internasional, PT. Borneo Persada Prima Jaya, PT. Citra Palma Periw, PT. Delta Utama Resources, PT. Perkebunan Sentawar Membangun, PT. Bharinto Ekatama, PT. Teguh Sinar Abadi, PT. Firman Ketaun Perkasa, PT. Gunung Bayan Pratamacoal, PT. Trubalindo Coal Mining, PT. Putra Bongan Jaya.**

Berdasarkan capain Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan teknologi sumber daya manusia dengan kegiatan evaluasi penerapan RKL/RPL, UKL-UPL Pada Pemanfaat Sumber Daya Alam di tahun 2021 realisasinya mencapai 100 % dari 11 pelaku usaha atau kegiatan yang dilakukan pengawasan, capaian kegiatan terhadap pelaksanaan evaluasi penerapan RKL/RPL 11 perusahaan ditahun 2021 sesuai target.

Untuk Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan kegiatan penyusunan Dokumen IKPLHD. Dimana kegiatan

dilaksanakan pada kelompok sasaran kegiatan di 16 kecamatan di Kabupaten Kutai Barat dengan indikator keluaran terlaksananya penyusunan IKPLHD dengan target kinerja 1 (satu) dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2021.

3. Peningkatan akses informasi lingkungan hidup.

Jumlah data dan informasi Lingkungan Hidup yang dapat diakses 100% pertahun (metode perhitungan absolut) target indikator kinerja persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan dalam RPJMD, sampai pada akhir periode tahun 2021 sebesar 6 jenis data.

Ada pun 6 jenis data yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. Data pemantauan kualitas air dan sungai
2. Data kualitas ambient
3. Data kualitas air sumur
4. Data kualitas tanah
5. Data kualitas limbah padat
6. Data kualitas cair
7. Data uji emisi Kendaraan bermotor

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Untuk keperluan penyusunan metode penghitungan IKTL yang dapat mewakili karakteristik wilayah perkotaan, hulu dan hilir daerah aliran sungai serta kepulauan, dapat diidentifikasi beberapa pendekatan yang dipergunakan untuk penyusunan metode penghitungan IKTL:

- a. Kecukupan luas (kawasan hutan dan) penutupan hutan pada daerah aliran sungai dan/atau pulau sesuai kondisi eksisting.
- b. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan

berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen). Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempadan sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih dari dua puluh lima persen) pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu, sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.

- c. Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan.
- d. Penggunaan data citra satelit *Landsat* dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan - 57 - mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).

3. ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
4. rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

SASARAN 5**MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN****PENDIDIKAN**

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Indikator Kinerja dari Sasaran tersebut adalah Rata-rata Lama sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah. Untuk melihat capaian Kinerja Tahun 2021 pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, dapat dilihat dilihat pada 2 indikator sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.29

**CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS
PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Rata-rata Lama Sekolah	8,95	8,47	94,77	8,49	8,70	102,47	Melebihi Target
2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,62	12,90	88,23	12,91	13,02	100,85	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		91,50			101,66			Melampaui Target

Tabel 3.30
**CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS
PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2021 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja
1	Rata-Rata Lama Sekolah	8,70	9,07	95,92
2	Angka Harapan Lama Sekolah	13,02	13,50	96,44

Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Masyarakat dapat dilihat dari 2 indikator yaitu:

Capaian Kinerja Indikator “Rata-rata Lama Sekolah” adalah 8,70 dari target sebesar 8,49 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,47, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,23, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka capaian kinerjanya mencapai 95,92%.

Capaian Kinerja Indikator “Angka Harapan Lama Sekolah” adalah 13,02 dari target sebesar 12,91 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,85, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan 0,12 dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka capaian kinerjanya mencapai 96,44%.

1. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di definisikan yaitu Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama

12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rumusan

$$MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (LamaSekolahPendudukke - i)$$

Keterangan:

1. P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas
2. Lama sekolah penduduk ke-i
 - > Tidak pernah sekolah = 0
 - > Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
 - > Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1
 - > Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir
 - > Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
3. Tahun konversi ijazah
 - > Tidak punya ijazah = 0
 - > SD = 6 tahun: SMP = 9 tahun: SMA = 12 tahun
 - > D1/D2 = 14 tahun: D3 = 15 tahun: D4 = 16 tahun: S1 = 17 tahun
 - > S2 = 19 tahun: S3 = 22 tahun

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 yaitu 8,70 tahun meningkat 0,23 tahun dari capaian tahun 2020 yaitu 8,47 tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Kutai Barat berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan hingga kelas IX.

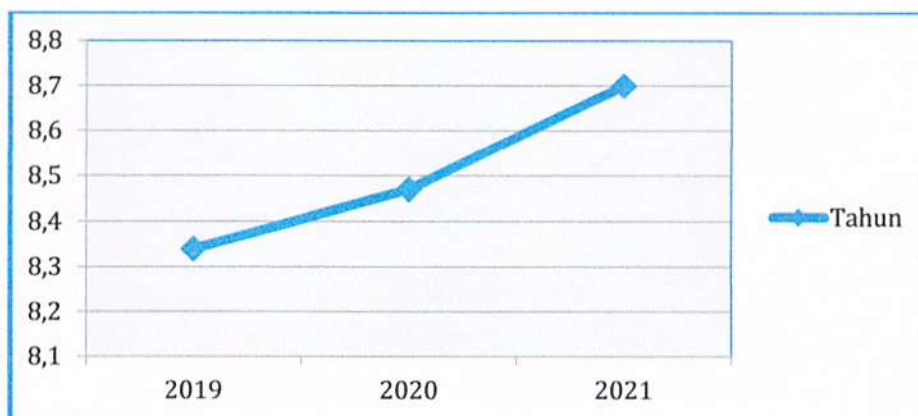
Berikut perkembangan capaian Rata-rata Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2021:

Tabel 3.31
**PERKEMBANGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,34	8,47	8,70

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.7
**PERKEMBANGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah selalu meningkat walau tidak terlalu signifikan, dimana peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2021 mencapai 8,70 Tahun meningkat sebanyak 0,23 Tahun.

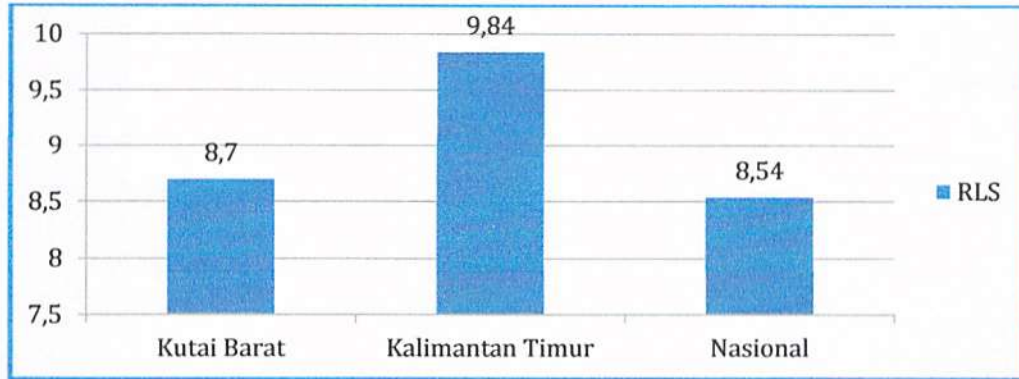
Berikut perbandingan Rata-rata Lama Sekolah dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional:

Tabel 3.32
**PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2021**

Indikator Kinerja	Kab. Kutai Barat	Prov. Kalimantan Timur	Nasional
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,70	9,84	8,54

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.8
**PERBANDIGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2021**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat lebih rendah 1,14 Tahun dari Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 9,84 Tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian secara Nasional, Kabupaten Kutai Barat lebih tinggi 0,16 Tahun dari capaian Nasional sebesar 8,54 Tahun dimana Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat yaitu 8,70 Tahun.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di definisikan yaitu Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 yaitu 13,02 tahun meningkat 0,12 tahun dari capaian tahun 2020 yaitu 12,90 tahun. Capaian ini menggambarkan bahwa anak-anak Kabupaten Kutai Barat yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh pendidikan hingga Diploma I.

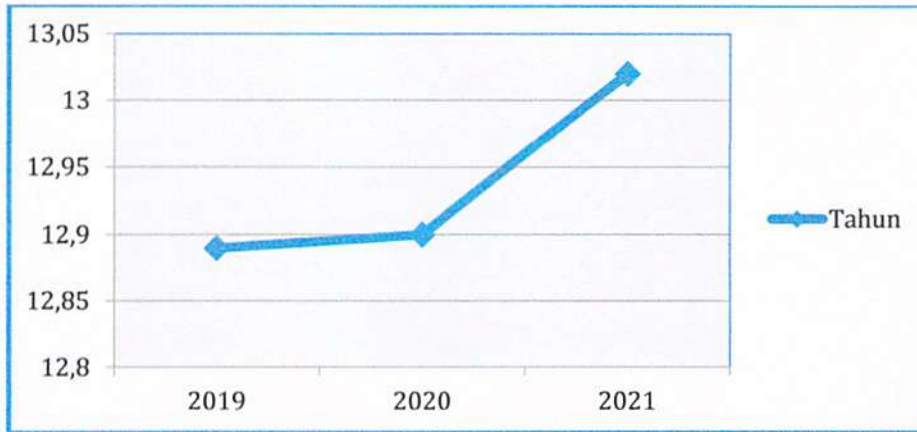
Berikut perkembangan Angka Harapan lama sekolah Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

Tabel 3.33
**PERKEMBANGAN CAPAIAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Angka Harapan Lama Sekolah	12,89	12,90	13,02

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.9
**PERKEMBANGAN CAPAIAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah selalu meningkat walau tidak terlalu signifikan, dimana peningkatan tertinggi yaitu pada tahun 2021 mencapai 13,02 Tahun meningkat sebanyak 0,12 Tahun.

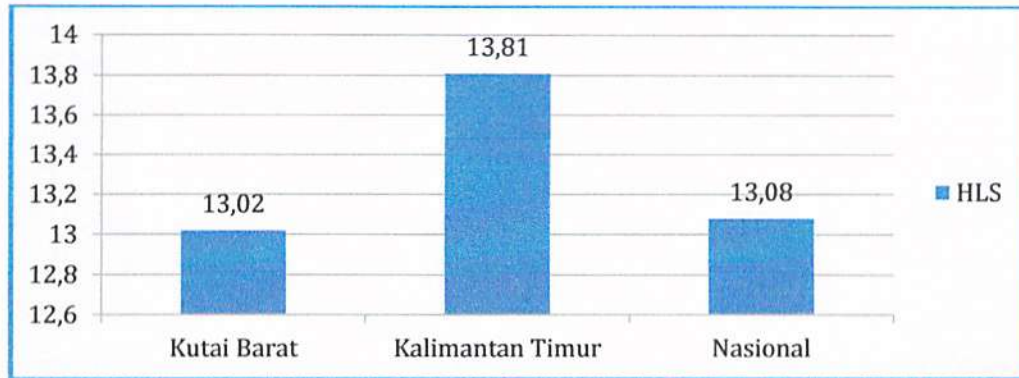
Berikut perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional:

Tabel 3.34
**PERBANDINGAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2021**

Indikator Kinerja	Kab. Kutai Barat	Prov. Kalimantan Timur	Nasional
Angka Harapan Lama Sekolah	13,02	13,81	13,08

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.10
**PERBANDINGAN ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI BARAT DENGAN PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL TAHUN 2021**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat lebih rendah 0,79 Tahun dari Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 13,81 Tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan capaian secara Nasional, Kabupaten Kutai Barat lebih rendah 0,06 Tahun dari capaian Nasional sebesar 13,08 Tahun dimana Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Barat yaitu 13,02 Tahun.

Adapaun Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan diantaranya adalah sebagai berikut :

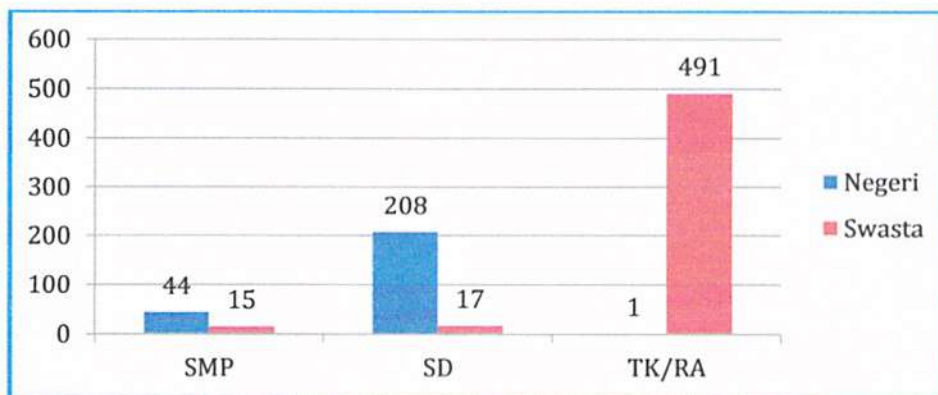
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak;
- b. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dan kependidikan, baik melalui penyetaraan pendidikan formal maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG) guna meningkatkan kualitas lulusan SD dan SMP;
- c. Pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya PAUD dan Pendidikan Dasar;

Adapun Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian pada Sasaran Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Pendidikan pada Tahun 2021 adalah :

1. Penyediaan sekolah oleh pemerintah (Sekolah Negeri) maupun masyarakat (Sekolah Swasta) dengan sarana prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Grafik 3.11

JUMLAH SEKOLAH DI KUTAI BARAT TAHUN 2021



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. TK/RA di Kabupaten Kutai Barat seperti tampilan pada grafik diatas menunjukkan betapa peran masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam penyediaan fasilitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini dikarenakan jumlah TK/RA swasta lebih banyak dari jumlah keseluruhan PAUD sebesar 99,80%
- b. Pada jenjang SD/MI, persentase jumlah sekolah negeri lebih banyak dari swasta yaitu sebesar 92,44% sedangkan persentase sekolah swasta yaitu sebesar 7,56%. Dari sisi jumlah peserta didik, persentase sekolah swasta mencapai 12,53%. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah swasta cukup memiliki rombongan belajar sama dengan sekolah negeri. Artinya, partisipasi masyarakat dalam penyediaan fasilitas SD/MI juga memberikan andil terhadap aksesibilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kutai Barat.

- c. Pada jenjang SMP/MTs, persentase jumlah sekolah negeri lebih besar daripada sekolah swasta yaitu sebesar 74,58%, sedangkan persentase sekolah swasta sebesar 25,42%. Dari sisi jumlah peserta didik, persentase sekolah swasta mencapai 15,04%. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah swasta juga cukup memiliki rombongan belajar sama dengan sekolah negeri. Meskipun demikian, peran masyarakat dalam menyediakan fasilitas pendidikan SMP/MTs juga merupakan kunci keberhasilan dalam memperluas aksesibilitas pendidikan karena menampung sekitar 18% peserta didik SMP/MTs di Kabupaten Kutai Barat.
2. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BPPD terutama yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Barat untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam **Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan**. Dana BOS dan BPPD diberikan pemerintah pusat dan daerah kepada satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua peserta didik terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu. Dana tersebut digunakan untuk membiayai operasional sekolah dalam rangka mencapai 8 standar pendidikan nasional. Terutama pada masa pandemic covid-19 di tahun 2021 ini, pemanfaatan dana BOS dan BPPD tidak lagi dibatasi tetapi tetap dengan prinsip sesuai kebutuhan dan kondisi kemampuan anggaran masing-masing satuan pendidikan. Pada tahun 2021 ini dana BOS SD dialokasikan sebesar Rp 1.090.000,- per siswa per tahun, sedangkan BPPD Kabupaten Kutai Barat untuk SD Negeri dan Swasta sebesar Rp 300.000,- per siswa per tahun. BOS SMP sebesar Rp 1.350.000,- per siswa per tahun, dan BPPD Kabupaten Kutai Barat untuk SMP Negeri dan Swasta sebesar Rp 420.000,- per siswa per tahun.

3. Pemberian Bantuan Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan juga BOP Pendidikan Kesetaraan dari dana APBN juga merupakan kunci keberhasilan peningkatan aksesibilitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
4. Kerjasama dengan stakeholder lain seperti PGRI, lembaga pendidikan tinggi, dan perusahaan di wilayah Kabupaten Kutai Barat juga merupakan kunci keberhasilan dalam bidang pengembangan kualitas belajar mengajar dan peningkatan kualifikasi pendidik. Terlebih lagi dalam masa pandemic covid-19 di tahun 2021 ini. Seperti yang telah dilakukan oleh PGRI Kabupaten Kutai Barat melalui Kubar Jaji, yang telah menyusun kajian hasil pembelajaran jarak jauh dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR) serta memberikan rekomendasi pelaksanaan BDR, diantaranya yaitu:
 - a. Peran orang tua dalam pendampingan belajar anak-anak mereka di rumah yang posisinya menggantikan peran guru di sekolah menjadi sangat penting. Maka dibutuhkan kesadaran dari para orang tua untuk mendampingi secara penuh agar pembelajaran daring bisa berjalan efektif.
 - b. Perlunya mengembangkan TV digital Edukasi, dengan adanya TV digital Edukasi menjadi sangat relevan dimasa pandemic Covid-19 ini. Konten berfokus pada penayangan materi pembelajaran yang sifatnya membutuhkan visualisasi seperti halnya mata pelajaran lain. Konten tersebut dapat ditayangkan pada jam di mana sebagian besar orang tua tidak bekerja misalnya di sore hari atau malam hari bagi mereka yang bekerja di pagi hari. Sedangkan bagi orang tua yang bekerja di malam hari dapat ditayangkan di pagi hari. Maka perlu adanya pembuatan modul yang berisi penjelasan konten yang akan ditayangkan dalam TV Digital Edukasi baik pembelajaran luring dan daring.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pengampu sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan melaksanakan 7 (Tujuh) Program yang mendukung pada pencapaian kinerja dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.

Adapun Program–Program tersebut diantaranya:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

SASARAN 6

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Indikator Kinerjanya berupa Usia Harapan Hidup. Untuk melihat capaian Kinerja Tahun 2021 pada RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026, dapat dilihat pada indikator sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.35
**CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS
PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2021**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,80	72,86	98,72	72,96	73,10	100,19	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		98,72			100,19			Melampaui Target

Tabel 3.36
**CAPAIAN KINERJA MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS
PENDIDIKAN MASYARAKAT TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN
TARGET AKHIR RPJMD**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja
1	Usia Harapan Hidup	73,10	73,54	99,40%

Sasaran Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari 1 indikator yaitu:

Capaian Kinerja Indikator “Usia Harapan Hidup” adalah 73,10 dari target sebesar 72,96 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,19, capaian ini

melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 0,24, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 maka capaian kinerjanya mencapai 99,40%.

Meningkatnya usia harapan hidup 73,10 Tahun dipengaruhi beberapa Faktor diantaranya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Walaupun menurut data dari dinas kesehatan melalui LKjIP tahun 2021 adanya peningkatan pada AKI hal ini disebabkan adanya Covid-19.

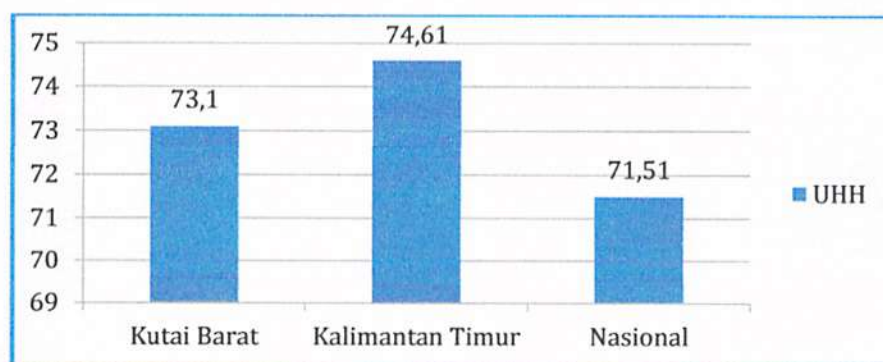
Berikut perbandingan Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat terkait indikator Usia Harapan Hidup dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional:

Tabel 3.37
**PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2021**

Indikator Kinerja	Kab. Kutai Barat	Prov. Kalimantan Timur	Nasional
Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,10	74,61	71,51

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.12
**PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2021**



1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kutai Barat pada bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 73,10 Tahun atau meningkat 0,24 dari capaian tahun 2020 sebesar 72,86 Tahun.

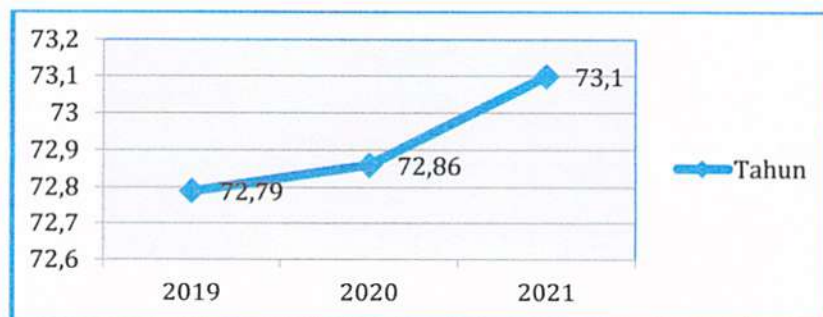
Berikut perkembangan capaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2021:

Tabel 3.38
**PERKEMBANGAN CAPAIAN USIA HARAPAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	72,79	72,86	73,10

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.13
**PERKEMBANGAN CAPAIAN USIA HARAPAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI BARAT**



Usia Harapan Hidup 73,10 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada 2021 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 73,10 tahun. Dimana pada setiap tahunnya Usia Harapan Hidup di Kabupaten Kutai Barat selalu meningkat.

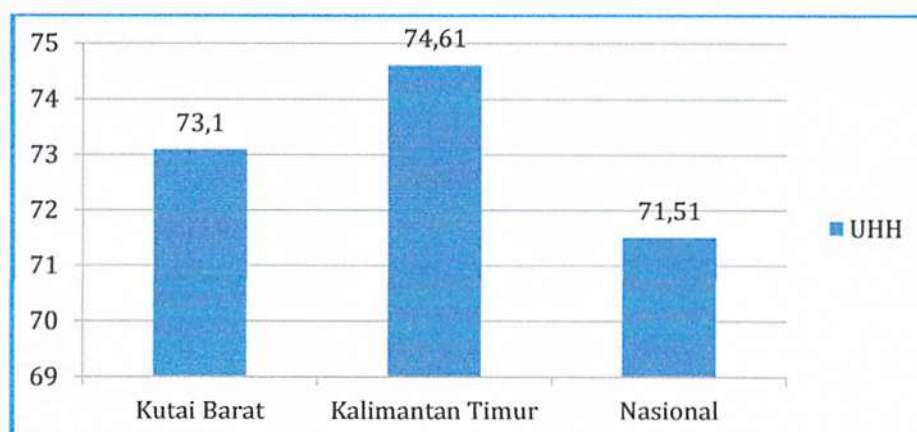
Berikut perbandingan Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat terkait indikator Usia Harapan Hidup dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional:

Tabel 3.39
**PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2021**

Indikator Kinerja	Kab. Kutai Barat	Prov. Kalimantan Timur	Nasional
Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,10	74,61	71,51

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Grafik 3.14
**PERBANDINGAN USIA HARAPAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT
DENGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DAN NASIONAL
TAHUN 2021**



Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan rasio pelayanan rumah sakit;
- b. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar nasional;
- c. Perbaikan manajemen pengelolaan kefarmasian;
- d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan pada Pustu (khususnya pelatihan APN, MTBS, BBLR, SDIDTK dan sebagainya);
- e. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pengelola program promkes;
- f. Perbaikan kondisi gedung rumah sakit dalam upaya pemenuhan persyaratan rumah sakit yang telah ditetapkan;
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan baik di level PKM maupun Rumah Sakit;
- h. Setifikasi dan peningkatan kualitas SDM pengelola peralatan kesehatan di rumah sakit;
- i. Peningkatan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama upaya penanggulangan penyakit-penyakit tidak menular; dan
- j. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PHBS.

SASARAN 7**MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan 6 (Enam) Indikator Kinerja berupa persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Nilai SAKIP, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah, Nilai LPPD, Persentase Desa Mandiri dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Untuk melihat capaian kinerja tahun 2021 sebagai tahun pertama RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Tabel 3.40

**MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian Kinerja
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Predikat
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	81,44	105,77	81,50	79,91	98,04	Tidak Tercapai
2	Nilai SAKIP	70,00 (BB)	62,27 (B)	88,95	64 (B)	N/A	100	Tercapai
3	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	N/A	100	Tercapai
4	Nilai LPPD	2,9	3,0733	105,98	3,5	N/A	87,80	Tercapai
5	Persentase Desa Mandiri (Jumlah)	9	9	100	20	19	95	Tidak Tercapai
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	83	83,87	101,04	83,97	N/A	99,88	Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,29			96,10			SANGAT BAIK

Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah dapat dilihat dari 6 indikator yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menjelaskan definisi dan beberapa unsur penilaian SKM kategori baik dengan nilai interval 76,61 – 88,30, Adapun kriteria IKM Baik dalam Perencanaan Strategis Kabupaten Kutai Barat adalah minimal 81,50. Pada tahun 2021 terdapat 30 OPD dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat, dari 30 OPD yang melakukan pengukuran IKM, terdapat 21 perangkat daerah dengan katagori “Baik” memperoleh nilai IKM sama atau lebih dari 76,50 dan 2 Perangkat Daerah dengan kategori “Sangat Baik” serta masih terdapat 7 OPD yang Nilai IKMnya Kategori C Sehingga capaian kinerja indikator adalah sebesar 79,91 %. Realiasi sasaran kinerja ini menurun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah OPD yang dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 dibandingkan pada tahun 2020 yang lalu. meskipun demikian, persentase Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal 81,50 sesuai dengan yang ditargetkan Meningkat sebesar 100%. Secara riil jumlah SKPD yang memperoleh nilai IKM diatas 81,50 meningkat sebanyak 11 Perangkat Daerah dibanding tahun 2020.

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan Amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah pula mengamanatkan pelayanan publik yang berorientasi pada Kepuasan masyarakat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat dari Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diberikan oleh Ombudsman RI Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang hasilnya diperoleh melalui melalui pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat pada seluruh unit layanan Perangkat Daerah.

Survei pelayanan publik pada perangkat daerah di lingkungan

pemerintah Kabupaten Kutai Barat, mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, terdiri dari 9 unsur meliputi Persyaratan, Sistem, mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan serta tindak lanjut, Sarana dan Prasarana.

Berikut rekapitulasi hasil pengukuran survey kepuasan masyarakat :

Tabel 3.41
**REKAPITULASI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

No.	OPD/Instansi/Unit Kerja	IKM Unit Pelayanan	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	DPMPSTP	85,14	B	Baik
2	Disdukcapil	80,13	B	Baik
3	Kecamatan Barong Tongkok	77,91	B	Baik
4	Kecamatan Melak	83,76	B	Baik
5	Kelurahan Barong Tongkok	73,03	C	Kurang Baik
6	Kelurahan Simpang Raya	70,20	C	Kurang Baik
7	Kelurahan Melak Ulu	78,77	B	Baik
8	Kelurahan Melak Ilir	87,29	B	Baik
9	BKPSDM	77,35	B	Baik
10	Dinas Sosial	84,96	B	Baik
11	Dinas Arsip dan Perpustakaan	77,78	B	Baik
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	65,28	C	Kurang Baik
13	Badan Pendapatan Daerah	79,47	B	Baik
14	Dinas Lingkungan Hidup	84,44	B	Baik
15	Dinas Kesehatan	81,13	B	Baik

16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,42	B	Baik
17	Kecamatan Sekolaq Darat	86,38	B	Baik
18	Kecamatan Tering	81,94	B	Baik
19	Kecamatan Linggang Bigung	77,50	B	Baik
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	75,93	B	Baik
21	BKAD	83,87	B	Baik
22	Dinas Ketahanan Pangan	75,00	C	Kurang Baik
23	Dinas Perkimtan	90,28	A	Sangat Baik
24	Dinas Pertanian	92,46	A	Sangat Baik
25	Disnaker	80,73	B	Baik
26	Bagian Hukum	72,22	C	Kurang Baik
27	Bagian Kesrasos	80,90	B	Baik
28	Bagian Pembangunan	86,14	B	Baik
29	Bagian Humas	69,44	C	Kurang Baik
30	Bagian Organisasi	80,55	B	Baik

Sumber : Data Bagian Organisasi Setkab Kubar

Perangkat daerah yang mendapatkan predikat kurang baik berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat didapat dari unsur pelayanan antara lain : biaya dan tarif, sarana dan prasarana, serta kompetensi pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan yang belum sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Saran / Rekomendasi

Saran / rekomendasi berikut ini disampaikan kepada seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kutai Barat yang bertujuan agar dapat menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Rekomendasi ini juga sebagai bentuk komunikasi dan pembinaan pelayanan publik oleh pimpinan kepada unit penyelenggara pelayanan publik. Adapun saran / rekomendasi yang disampaikan sebagai berikut :

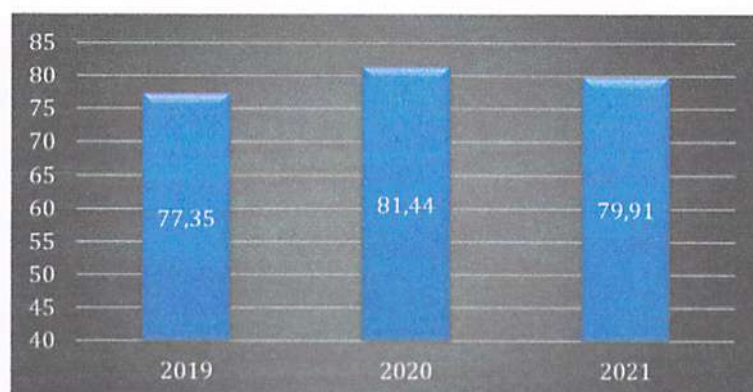
1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan unsur terendah pada unsur **Sistem, Mekanisme dan Prosedur, unsur Persyaratan Pelayanan dan unsur Biaya / Tarif Pelayanan** agar membuat Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan berdasarkan jenis dan produk pelayanan yang diterbitkan dan mereviu dan mengevaluasi kembali waktu pelayanan pada Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang sudah dibuat kemudian mempublikasikan Standar Pelayanan atau SOP tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai mekanisme dan prosedur untuk mendapatkan produk pelayanan, syarat apa saja yang diperlukan serta pelayanan tersebut memerlukan biaya atau tidak (gratis).
2. Unit penyelenggara pelayanan publik dengan unsur terendah pada unsur **Waktu Penyelesaian** direkomendasikan untuk dapat membuat pengaturan jam kerja petugas pelayanan agar pelayanan tidak dihenikan pada jam istirahat sehingga masyarakat tidak perlu menunggu hingga jam istirahat berakhir dan pelayanan dapat lebih cepat diselesaikan. Selain itu pimpinan masing – masing unit pelayanan memastikan bahwa petugas pelayanan hadir sesuai waktu pelayanan sesuai yang sudah ditetapkan dan memasitikan pemberian sanksi dan penghargaan bagi petugas pelayanan berdasarkan ketepatan waktu dalam memberi pelayanan.
3. Setiap pimpinan pada unit penyelenggara pelayanan publik secara berjenjang agar melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui permasalahan / kendala apa saja yang terjadi dalam proses pelayanan serta menerapkan inovasi dalam memberi pelayanan publik.
4. Setiap unit penyelenggara pelayanan publik dapat melakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri untuk dapat menilai kelebihan dan kekurangan unitnya masing – masing sehingga dapat menyusun skala prioritas upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.42
**REALISASI INDIKATOR INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020-2021**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	77,35	81,44	79,91

Sumber : Data Bagian Organisasi Setkab Kubar

Grafik 3.15
**REALISASI INDIKATOR INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2020-2021**



Sumber : Data Bagian Organisasi Setkab Kubar

Adapun upaya dan solusi untuk mendorong pencapaian kinerja pelayanan publik Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong dan memfasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan;
- b. Mendorong dan melakukan fasilitasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja agar menerapkan Standar Pelayanan pada setiap jenis pelayanan, sesuai dengan penetapan Standar Pelayanan;
- c. Melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- d. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi terhadap ketersediaan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas dan kualitas;
 - e. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja agar melakukan evaluasi, memelihara, dan membangun sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - f. Mendorong dan memfasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk berkomitmen melalui cara membuat Maklumat Pelayanan dan menerapkannya pada kegiatan pelayanan publik sehari-hari;
 - g. Mendorong Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk menyusun rencana kerja berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan memperhatikan unsur pelayanan mana yang harus tetap dipertahankan dan unsur pelayanan mana yang harus ditingkatkan.

2. Nilai SAKIP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai 62,27 atau predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menunjukkan hasil yang baik.

Untuk tahun 2021 sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 belum diumumkan oleh Kementerian PAN RB, oleh karena itu rekomendasi dan tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP menggunakan data hasil evaluasi tahun 2020.

Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai **62,27** atau predikat **B**. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,66 dari hasil Evaluasi tahun lalu yang memperoleh Nilai 60,61.

Tabel 3.43

NILAI AKIP KABUPATEN KUTAI BARAT DARI 2018-2020

No	Tahun	Realisasi Nilai AKIP
2	2018	56,23
3	2019	60,61
4	2020	62,27

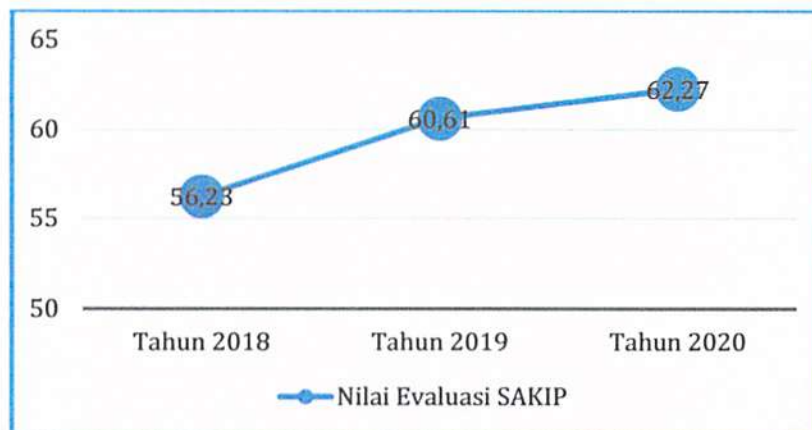
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Nilai AKIP Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,38. pada tahun ini nilai AKIP Kabupaten Kutai Barat Meningkat sebesar 1,66 dari tahun yang lalu.

1. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.44
REALISASI KINERJA SASARAN 7 DIBANDINGKAN
TARGET AKHIR RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%)
Nilai SAKIP	Predikat /Poin	62,27	74	86,58

Grafik 3.16
HASIL AKIP KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2018 - 2020



Tabel 3.45
**RINCIAN PENILAIAN EVALUASI PERIODE 2018-2020 AKIP PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Komponen yang dinilai	2018		2019		2020		Peningkata/ (Penurunan)
	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	
Perencanaan Kinerja	30	19,93	30	21,17	30	21.82	0,65
Pengukuran Kinerja	25	13,15	25	14,14	25	14.48	0,34
Pelaporan Kinerja	15	9,00	15	9,52	15	9.71	0,19
Evaluasi Internal	10	3,23	10	4,88	10	5.19	0,30
Capaian Kinerja	20	10,92	20	10,91	20	11.07	0,16
Nilai Hasil evaluasi	100	56,23	100	60,61	100	62.27	1,66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C		B		B	Meningkat

Berdasarkan data diatas, kami sampaikan informasi uraian Rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kabupaten Kutai Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Namun demikian, beberapa rekomendasi perbaikan yang kami sampaikan tahun sebelum nya belum ditindaklanjuti dengan baik. Sehingga belum terlihat ada kemajuan yang berarti dalam penerapan SAKIP terutama terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah:
 - a. Kinerja sebagian OPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (outcome), dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup. Kejelasan dan keterukuran kinerja adalah hal yang sangat

penting dalam penerapan manajemen kinerja, karena berpengaruh pada penerapan anggaran berbasis kinerja, penjenjangan (cascading), pengukuran, perjanjian, monitoring, pelaporan sampai kepada reward and punishment atas capaian kinerja tersebut;

- b. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menyusun seperangkat indikator kinerja utama (IKU) mulai dari tingkat Kabupaten hingga level organisasi terendah. Namun demikian, penyusunan IKU ini tidak memperhatikan proses kerja yang telah dibangun serta tugas fungsional peran yang diemban oleh setiap jabatan;
- c. Ketiadaan peta proses bisnis yang menggambarkan hubungan kinerja antar unit kerja/OPD dan unit kerja dibawahnya dalam menghasilkan kinerja yang diinginkan, menyebabkan keterkaitan kinerja antar OPD menjadi tidak terlalu jelas dan keterkaitan kinerja secara berjenjang antar level organisasi belum dapat digambarkan dengan baik;
- d. Indikator kinerja belum diimplementasikan dengan baik, seperti satu indikator kinerja yang sama digunakan untuk mengukur dua sasaran yang berbeda dan indikator kinerja digunakan oleh OPD yang tidak sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pemantauan atas pencapaian kinerja di level OPD belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dikarenakan, informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme pemantauan kinerja belum dimanfaatkan secara efektif untuk berbagai perbaikan kinerja yang diperlukan;
- f. Laporan kinerja telah disusun sampai ke level OPD dan sebagian besar sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, analisis capaian kinerja tersebut belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, mekanisme pengumpulan data kinerja dalam rangka pelaporannya belum sepenuhnya dapat diandalkan;

- g. Evaluasi atas program yang dilakukan baru sebatas pelaksanaan program dan penyerapan anggarannya, belum kepada hasil program sehingga masih dijumpai ketidakselarasan antara kegiatan, hasil program serta peran yang diemban oleh setiap OPD
- h. Evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat belum sepenuhnya ditindaklanjuti dan belum menjadi bahan perbaikan penerapan SAKIP di lingkungan internal OPD.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi kepada hasil (outcome atau achievements) yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis. Seluruh pimpinan OPD harus memastikan dokumen perencanaan masing-masing telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) terakhir yang sudah lebih sempurna, dan melengkapinya dengan targettarget kinerja terukur, baik jangka menengah maupun tahunan;
2. Melakukan pembinaan SAKIP yang intensif pada seluruh OPD Kabupaten, sehingga pencapaian kinerja pada tingkat OPD juga dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat;
3. Cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, penyusunan IKU akan mengacu pada cascade kinerja tersebut;
4. Menyusun peta proses bisnis dengan mengacu pada hasil cascading kinerja sehingga dapat memberikan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai ke pelaksana paling bawah. Kemudian proses bisnis ini dijadikan acuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dalam mencapai kinerja pemerintah daerah;

5. Mereviu kembali Indikator kinerja yang digunakan oleh seluruh OPD sedemikian rupa sehingga satu indikator kinerja hanya mengukur kinerja tertentu, indikator kinerja digunakan oleh OPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
6. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian reward and punishment;
7. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran;
8. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD serta dapat memberikan feedback untuk perbaikan kinerja OPD kedepan.

Tabel 3.46

PROGRES TAHUN 2021 ATAS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TIM EVALUATOR KEMENTERIAN PAN-RB TAHUN 2020

No	REKOMENDASI HASIL EVALUASI SAKIP DARI KEMENPAN RB TAHUN 2020	PENANGGUNG JAWAB	PROGRES TINDAK LANJUT	BUKTI TINDAK LANJUT	KET
1	Memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen terencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi kepada hasil (outcome atau achievements) yang terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis. Seluruh pimpinan OPD harus memastikan dokumen perencanaan masing-masing telah selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) terakhir yang sudah lebih sempurna, dan melengkapinya dengan targettarget kinerja terukur, baik jangka menengah maupun tahunan;	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda	<ul style="list-style-type: none"> Permintaan Data RENSTRA Program dan Kegiatan, Serta Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Pembuatan Cascading /Pohon Kinerja Sebagai Bahan Pendampingan (<i>Coaching Clinic</i>) Penguatan SAKIP Dari PANRB Undangan Kegiatan Pendampingan (<i>Coaching Clinic</i>) Penguatan SAKIP Kabupaten Kutai Barat 	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Surat :060/2571/Org-TU.P/VIII/2021 Nomor Surat :060/2429/Org-TU.P/VIII/2021 Nomor Surat : 060/3074/Org-TU.P/IX 	
2	Melakukan pembinaan SAKIP yang intensif pada seluruh OPD Kabupaten, sehingga pencapaian kinerja pada tingkat OPD juga dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda	Menjadwalkan <i>Road Show</i> Tim SAKIP Kabupaten ke Perangkat Daerah memberikan Pendampingan Penguatan SAKIP agar bisa memberikan pemahaman terhadap	Nomor Surat; 060/2387/Org-TUP/I/2022	<i>Coaching Clinic</i> dan pendampingan penyusunan SAKIP Perangkat Daerah

			implementasi SAKIP sebagai manajemen kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (<i>result oriented government</i>)		Pengampu IKU Daerah (RPJMD)
3	Cascade kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, penyusunan IKU akan mengacu pada cascade kinerja tersebut	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan Cascading /Pohon Kinerja Sebagai Bahan Pendampingan (Coaching Clinic) Penguatan SAKIP Dari PANRB 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Surat :060/2429/Org-TU.P/VIII/2021 	
4	Menyusun peta proses bisnis dengan mengacu pada hasil cascading kinerja sehingga dapat memberikan gambaran proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi sampai ke pelaksana paling bawah. Kemudian proses bisnis ini dijadikan acuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dalam mencapai kinerja pemerintah daerah	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda	Melalui Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik telah melakukan Penyusunan Peta Proses Bisnis. Untuk memaksimalkan kualitas Peta Proses Bisnis yang disusun dilakukan Rapat Pembahasan draft Peta Proses Bisnis dengan meminta masukan dan arahan dari beberapa stake holder terkait.	Surat Sekda Nomor : 005/185/Org-TU-P/I/2021 tentang Undangan Rapat pembahasan draft Peta Proses Bisnis Kanupaten Kutai Barat.	
5	Mereviu kembali Indikator kinerja yang digunakan oleh seluruh OPD sedemikian	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi	Penetapan indikator dan target.	Nomor surat: 060/3694/Org-	

	rupa sehingga satu indikator kinerja hanya mengukur kinerja tertentu, indikator kinerja digunakan oleh OPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya	Setda		TUP/XI/2021	
6	Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta membangun mekanisme sistem pengukuran kinerja organisasi dan individu, sebagai sarana pemantauan kinerja oleh pimpinan dan juga sebagai dasar pemberian reward and punishment	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda	Penandatanganan perjanjian kinerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai barat	Nomor Surat : 060/929/Org-TUP/II/2022	
7	Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran	Bapelitbagda dan Bagian Organisasi Setda	Melakukan evaluasi terhadap Program dan kegiatan yang ada dengan mengacu pada IKU yang ada dan memastikan bahwa Program dan Kegiatan yang ada adalah program dan kegiatan yang mendukung pada pencapaian sasaran strategis pembangunan yang terdapat dalam RPJMD	Surat Undangan Rapat Pembahasan dan Coaching klinik Pembuatan Peta Proses Bisnis dengan mengacu pada cascading kinerja	
8	Meningkatkan kualitas evaluasi	Bapelitbagda,	Mengirimkan auditor		

<p>akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD serta dapat memberikan feedback untuk perbaikan kinerja OPD kedepan</p>	<p>Inspektorat dan Bagian Organisasi Setda</p>	<p>inspektorat untuk mengikuti bimtek evaluasi AKIP agar memiliki pemahaman menganalisa implementasi AKIP di perangkat Daerah dan memahami teknik Evaluasi AKIP yang benar dan Sesuai sehingga dapat memberikan feedback untuk perbaikan kinerja perangkat daerah</p>		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

3. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada tahun 2020 di targetkan nilai opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hasil audit BPK RI memberikan penilaian WTP sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mampu mempertahankan opini WTP dan mempertahankan panji pengelolaan keuangan terbaik tahun 2020.

Tabel 3.47

HASIL AUDIT BPK TERHADAP PEMERIKSAAN KEUANGAN KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2017 – 2020

NO	Tahun	Hasli Opini
1	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
3	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
4	2020	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber Data : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Barat

Tabel 3.48
**REALISASI KINERJA SASARAN 5 DIBANDINGKAN
TARGET AKHIR RPJMD**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2020	Target Akhir RPJMD	Persentase Capaian Kinerja (%)
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100

Untuk mencapai target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kutai Barat antara lain melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia penatausahaan laporan keuangan, Pemkab Kutai Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Laporan Keuangan SKPD se-Kutai Barat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltim. "Output yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut yaitu para pejabat dan pegawai yang terlibat dalam penatausahaan pelaporan keuangan mampu membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah.
- Peningkatan pengelolaan SIMDA barang dan Jasa.
- Peningkatan sistem pengendalian intern melalui kegiatan *Workshop Control Self Assessment (CSA)*.
- Evaluasi secara menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern (SPI) atas aset tetap yang digunakan oleh SKPD guna penyempurnaan SPI atas aset tetap dan peningkatan tingkat kepatuhan terkait pengelolaan aset.
- Melaksanakan koordinasi dengan SKPD pada akhir tahun untuk menyesuaikan saldo akhir Laporan Keuangan SKPD dengan Laporan Keuangan yang dibuat oleh Bagian Keuangan sehingga Laporan Keuangan yang dipakai oleh

SKPD mendasarkan pada Laporan Keuangan yang disusun oleh Bagian Keuangan (sentralistik).

- f. Rencana pembentukan *Badan Keuangan dan Aset Daerah*.

Pada dasarnya tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran satu dengan indikator penyampaian rencana kerja OPD tepat waktu dan rasio kemandirian keuangan daerah dengan katagori penilaian sangat berhasil sedangkan Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target dengan indikator penilaian berhasil.

Sasaran kedua indikator persentase data aset yang dapat dimanfaatkan dalam menunjang PAD, presentase data aset yang akurat dengan indicator penilaian sangat berhasil dan sasaran tiga indikator persentase tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dengan baik mencerminkan keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam kategori Sangat Berhasil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat selama Tahun 2020. Capaian kinerja Tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat dimana tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasian sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan Capaian Sasaran :

Dari 6 indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat, 5 indikator sasaran sudah memenuhi target Indicator tujuan sesuai dengan RPJMD yaitu Nilai Opini BPK sedangkan penyerapan anggaran

tidak tercapai target Akan tetapi meski capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan penilaian indikator sangat berhasil, namun masih ada permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah :

- a. Terdapat 1.593 bidang aset tanah dan bangunan yang terdiri dari 662 bidang tanah dan bangunan dan 934 bidang tanah bawah jalan. Tanah yang sudah dilakukan sertifikasi sebanyak 53 sertifikat dan yang belum dilakukan sertifikasi sebanyak 609 bidang tanah dan bangunan, sedangkan aset tanah bawah jalan keseluruhannya belum dilakukan sertifikasi.
- b. Pengamanan aset pemerintah daerah masih belum optimal baik dari sisi hukum dan fisik.
- c. Pengelolaan barang persediaan di SKPD masih perlu ditingkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggunakan aplikasi persediaan.
- d. Terdapat SKPD yang belum terkoneksi oleh SIMDA secara online terutama Kecamatan, Puskesmas dan Sekolah.
- e. Belum semua SKPD melakukan install SIMDA Keuangan versi terbaru 2.7.13 yang berakibat terhambatnya proses realisasi anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan.
- f. Masih sering terjadinya Permasalahan Jaringan LAN di setiap SKPD.
- g. Kegiatan penilaian BMD sudah terlaksana dan sudah selesai penilaian dari tim penilai (KPKNL) tinggal menunggu tim pelelangan BMD untuk melaksanakan lelang.
- h. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi untuk melakukan penilaian BMD belum tersedia.
- i. Terdapat dana tampungan DBH-DR yang tidak dapat teranggarkan oleh SKPD teknis yang membidangi sesuai dengan ketentuan penggunaan dana tersebut sehingga diadministrasikan pada DPA BKAD dan tidak dapat direalisasikan karena bersifat khusus.

Strategi yang dirumuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka mendukung Misi III **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel** adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Daerah, dengan arah kebijakan berikut:
 - a. Peningkatan kapabilitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat teknis;
 - b. Optimalisasi pemanfaatan IT dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik dan pemerintahan;
 - c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah; dan
 - e. Peningkatan kapabilitas APIP dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
2. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Desa, dengan arah kebijakan berikut:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pemberdayaan masyarakat;
 - b. Meningkatkan kualitas SDM perangkat kampung khususnya terkait bidang tata kelola desa, keuangan dan aset desa dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam); dan
 - c. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dalam pembangunan kampung.

4. Nilai LPPD

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD. LPPD

merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan memublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai ruang lingkup, pen5rusunan, dan penyampaian LPPD, LKPJ, dan RLPPD, pelaksanaan EPPD, dan sistem informasi elektronik LPPD dan EPPD.

Untuk tahun 2021 sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi LPPD tahun 2021 belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri, oleh karena itu rekomendasi dan tindaklanjut hasil evaluasi LPPD menggunakan data hasil evaluasi tahun 2019.

Hasil Evaluasi LPPD tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai **3,0733**. Nilai tersebut mengalami kenaikan.

a. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya

Tabel 3.49
TABEL NILAI EVALUASI LPPD (EKPPD) 2017-2020

No	Tahun	Nilai Evaluasi LPPD	Ket
1	2017	2.8824	Skor Nilai Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 100-53 Tahun 2018 Tanggal 10 Januari 2018
2	2018	2.8234	Skor Nilai Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 118-8840 Tahun 2018 Tanggal 31 Desember 2018
3	2019	2.8971	Skor Nilai Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 710/K.489/2018 Tanggal 10 September 2018
4	2020	3,0733	Skor Nilai Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 700/K.630/2020 Tanggal 2 Desember 2020

Tabel 3.50
NILAI KABUPATEN KUTAI BARAT DARI 2017-2019

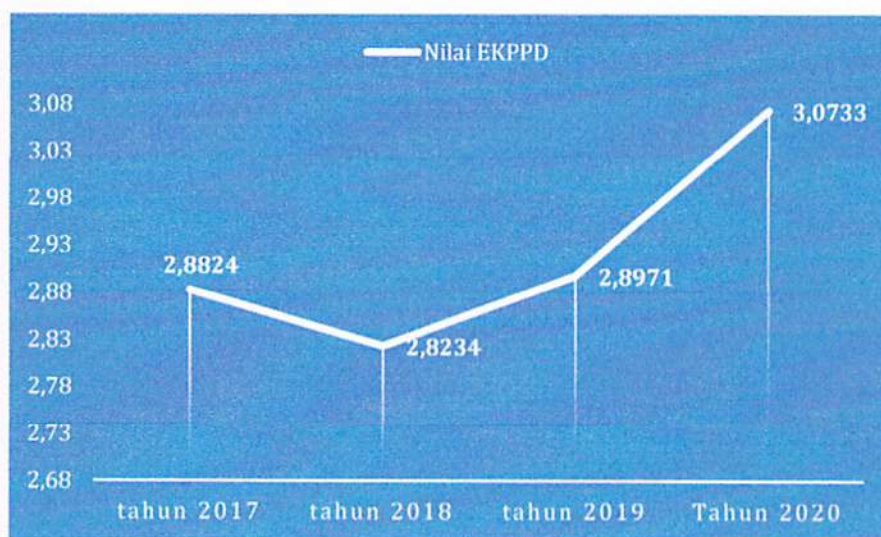
No	Tahun	Realisasi Nilai SAKIP
1	2017	2.8824
2	2018	2.8234
3	2019	2.8971
4	2020	3,0733

b. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.51
REALISASI KINERJA SASARAN 6 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja S/d Tahun 2020	Target Akhir dalam RPJMD	Prosentase Capaian Kinerja
Nilai Evaluasi LPPD (EKPPD)	Poin	3,0733	4	76,83

Grafik 3.17
NILAI EVALUASI KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) TAHUN 2017-2020



Berdasarkan Data diatas dapat diketahui secara akumulasi pencapaian sasaran **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”** sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sudah mencapai **87,80** Telah melebihi capaian target 100% target akhir RPJMD tahun 2021.

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;

Pada saat pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2019 ada beberapa kendala yang dihadapi, kendala-kendala tersebut yaitu :

A. Kendala-Kendala tersebut antara lain :

1. Ada beberapa Penambahan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Manual Penyusunannya sehingga pada saat penyusunan perlu Komunikasi yang Intens dan Penjelasan terkait dengan Data/Dokumen Pendukung yang digunakan untuk mengisi Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut kepada OPD-OPD;
2. Keterlambatan pengumpulan Data/Dokumen dari masing-masing OPD sehingga menyebabkan proses penginputan Data di dalam IKK menjadi terlambat dan kadang-kadang agar tidak terlambat mengumpulkan LPPD, Tim Penyusun menggunakan Data/Dokumen Tahun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan terdapat perbedaan Data/Dokumen yang ada di dalam IKK LPPD saat diserahkan kepada Pemprov. Kaltim dan Pemerintah Pusat dengan Data/Dokumen yang ada saat Evaluasi seringkali berbeda;
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang mempersulit proses Permintaan Data/Dokumen kepada OPD-OPD di Kabupaten Kutai Barat sehingga hanya bisa dikirim melalui WA;
4. Perbedaan persepsi Penilaian Data/Dokumen Pendukung oleh Tim Evaluasi Daerah (Inspektorat Wilayah Provinsi Kaltim/BPKP Kaltim) dengan Tim Penyusun sehingga menyulitkan dalam Proses Penyusunan LPPD dan Evaluasi Penyusunan LPPD setiap Tahun Anggaran. ;
5. Belum tersedianya Anggaran untuk Bimbingan Teknis kepada seluruh OPD-OPD terkait dengan Tata Cara dan

Mekanisme serta Data/Dokumen yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);

6. Belum dilaksanakannya *Self Assesment* Data/Dokumen Pendukung dalam Penyusunan LPPD sehingga Data yang diinput masih belum melalui Proses Validasi dan Verifikasi Tim Inspektorat Kabupaten Kutai Barat.

B. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut antara lain :

1. Perlu untuk dianggarkan Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Seluruh OPD terkait dengan Tata Cara dan Mekanisme serta Data/Dokumen yang diperlukan untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
2. Perlu adanya Pemberian *Reward and Punishment* kepada OPD-OPD yang terlambat maupun tepat waktu dalam mengumpulkan Data/Dokumen Pendukung serta perlu dilakukan *Self Assesment* Data/Dokumen oleh Inspektorat Kabupaten Kutai Barat agar tidak terdapat Perbedaan Data/Dokumen Pendukung yang terlalu Ekstrim dari saat Penyusunan maupun saat Evaluasi LPPD;
3. Bahwa terkait dengan Tim Evaluasi Daerah, telah disampaikan saran melalui Bagian Pemerintahan Setda.Kab.Kutai Barat agar kedepannya dilaksanakan bimtek terkait dengan Penyusunan LPPD bersama-sama dengan Tim Daerah untuk menyatukan Persepsi tentang Data/Dokumen Pendukung Penyusunan LPPD;
4. Untuk kedepannya perlu dibentuk Tim Penyusun yang melibatkan Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan dan BKAD, serta Inspektorat Kabupaten Kutai Barat agar Data/Dokumen yang digunakan dalam Penyusunan Laporan semuanya memiliki angka yang sama sehingga tidak menimbulkan

kerancuan bagi Subyek yang membaca maupun mengevaluasi Laporan-Laporan tersebut.

Upaya-Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui Bagian Pemerintahan, antara Lain :

1. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan OPD Teknis untuk Proses Pengumpulan Data/Dokumen serta Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
2. Mengadakan Koordinasi dan Konsultasi kepada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat terkait dengan kesiapan Tim *Self Assesment* dari Inspektorat untuk membantu mendampingi Tim Penyusun LPPD dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
3. Membuat Surat Edaran Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah untuk Proses Pengumpulan Data/Dokumen Pendukung dari seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kutai Barat;
4. Menugaskan 3 Orang Tim Penyusun LPPD untuk mengikuti Bimtek terkait dengan Mekanisme Penyusunan LPPD sesuai dengan Anggaran yang ada;
5. Menyusun RKA-SKPD Bagian Pemerintahan Kegiatan Penyusunan LPPD dan RLPPD Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kliping yang dikeluarkan oleh Bapelitbangda Kabupaten Kutai Barat, belum sesuai dengan Kebutuhan dalam Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat;
6. Melakukan Kegiatan Jemput Bola ke OPD-OPD Teknis untuk mempercepat proses Pengumpulan Data/Dokumen Penyusunan LPPD Kabupaten Kutai Barat baik bertemu secara langsung ke OPD-OPD ataupun Via Telpon, WA dan E-Mail.

5. Persentase Desa Mandiri

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pembangunan desa meliputi pemenuhan 4 aspek, yaitu: (1) kebutuhan dasar, (2) pelayanan dasar, (3) lingkungan, dan (4) kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Berikut merupakan progres perkembangan Kampung di Kabupaten Kutai Barat :

Tabel 3.52
**PROGRES PERKEMBANGAN KAMPUNG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019-2021**

IDM	2019		2020		2021	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
MANDIRI	1	1%	9	4,74%	19	10,00%
MAJU	10	5%	48	25,26%	65	34,21%
BERKEMBANG	75	39%	91	47,89%	87	45,79%
TERTINGGAL	98	52%	40	21,05%	18	9,47%
SANGAT TERTINGGAL	6	3%	2	1,05%	1	0,53%

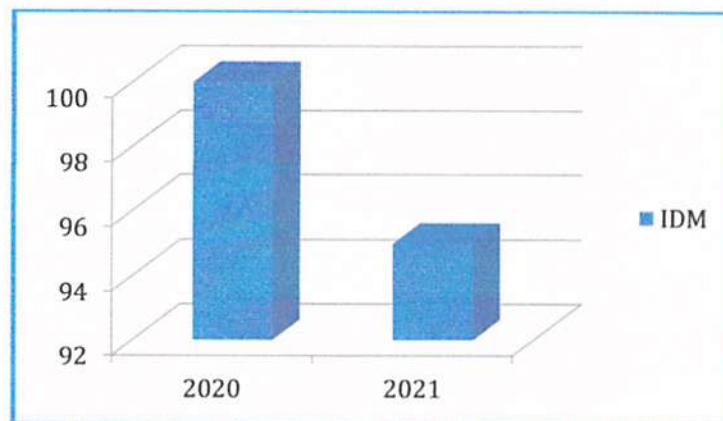
Sumber: DPMK 2021

Tabel 3.53
**REALISASI INDIKATOR PERSENTASE DESA MANDIRI KABUPATEN
KUTAI BARAT TAHUN 2020-2021**

Indikator Kinerja	2020	2021
Persentase Desa Mandiri	100%	95%

Sumber : DPMK 2021

Grafik 3.18
**REALISASI INDIKATOR PERSENTASE DESA MANDIRI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020-2021**



Sumber: DPMK 2021

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah Desa Mandiri di kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dimana pada tahun 2019 hanya 1 Desa Mandiri dan pada Tahun 2020 naik menjadi 9 Desa Mandiri, tahun 2021 terdapat 19 Desa Mandiri diKutai Barat.

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan serta solusi yang akan dilakukan terkait pencapaian indeks Desa Membangun :

- Analisa Keberhasilan :
 1. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan kemajuan kemandirian desa dan dijadikan nlandasan Pemerintah sebagai pelaku pembangunan baik ditingkat pusat, daerah maupun kampung/desa dalam menentukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang lebih baik, merata dan tepat sasaran.
 2. Adapun dimensi Indeks Desa Membangun yang dijadikan Indikator dalam Penilaian Indeks Desa yaitu :
 1. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
 - a. Pelayanan Dasar
 - Akses TK/PAUD
 - Akses SD/Sederajat
 - Akses SMA/ sederajat
 - Akses Poskesdes/Polindes
 - Posyandu yang aktif bulanan
 - b. Kegiatan warga menjaga keamanan lingkungan
 - c. Keberadaan Fasilitas Olahraga dan ruang publik terbuka
 - d. Taman Bacaan Masyarakat
 - e. Musyawarah Kampung
 - f. Konflik Sosial/perkelahian masal di kampung
 - g. Kegiatan gotong royong
 - h. Sarana Prasarana
 - Sumber air untuk mandi/cuci
 - Waktu tempuh per Kilometer ke Kantor Camat
 - Bahan Bakar Memasak
 - Persentase Keluarga dirumah kumuh
 2. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
 - a. Keberadaan Pasar desa
 - b. Akses ke Bank
 - c. Keberadaan UKMK
 - d. Keberadaan Kantor Pos/Perusahaan Ekspedisi

- e. Keberadaan BUMKM
- f. Akses Listrik
- g. Keberadaan Angkutan Umum
- h. Layanan Telekomunikasi

3. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

- a. Sistem Pembuangan Sampah
- b. Pegolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah
- c. Fasilitas buang air besar
- d. Usaha Mitigasi Bencana

3. Berdasarkan penjelasan pada poin 2 maka sesuai hasil pengukuran Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dengan Perkembangan dari tahun sebelumnya 2020 sebagai berikut :

- Kampung Mandiri sebanyak 9 Kampung
Adanya peningkatan status Kampung dari tahun sebelumnya (2020) yaitu Kampung Maju ke Mandiri 9 Kampung dan Berkembang ke Mandiri 1 Kampung.
- Kampung Maju sebanyak 65 Kampung,
Adanya peningkatan status kampung dari tahun sebelumnya (2020) yaitu kampung berkembang menuju kampung maju sebanyak 26 kampung.
- Kampung berkembang 87 kampung,
Adanya peningkatan status kampung dari tahun sebelumnya (2020) yaitu kampung berkembang menuju kampung maju sebanyak 26 kampung.
- Kampung Tertinggal 18 kampung,
Adanya peningkatan status kampung dari tahun sebelumnya (2020) yaitu kampung tertinggal menuju kampung Berkembang sebanyak 23 kampung
- Kampung Sangat tertinggal 1 kampung,
Adanya peningkatan status kampung dari tahun sebelumnya (2020) yaitu kampung sangat tertinggal menuju kampung Tertinggal sebanyak 1 kampung

• **Analisa Kegagalan :**

1. Prasarana Pelayanan Sosial Dasar rata-rata kampung masih belum tersedia/masih dianggap kurang dan perlu mendapat perhatian serius dari organisasi perangkat daerah yang terkait antara lain :
 - a. Tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya belum semua tersedia di kampung;
 - b. Akses / jarak tempuh menuju SMP dan SMU masih terlalu jauh dan jalannya sulit dilalui.
2. Taman bacaan masyarakat desa atau perpustakaan desa masih tidak tersedia di kampung.
3. Penanganan pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM)/ kejar paket A, B, C;
4. Pendidikan anak usia dini (PAUD) masih belum semua desa/kampung yang memiliki PAUD;
5. Jumlah kelompok kegiatan olahraga dan jumlah kegiatan olahraga masih belum optimal tersedia secara optimal di kampung;
6. Jumlah keluarga yang memakai listrik + non listrik/jumlah keluarga memakai listrik di desa di kampung masih belum terpenuhi secara optimal;
7. Fasilitas/akses internet warga kampung yang belum ada/masih lemah;
8. Akses jalan desa/kampung yang menghubungkan antara kecamatan ke kampung yang masih belum terhubung dengan aspal/beton;
9. Masyarakat kampung masih membuang sampah secara tradisional dengan digali lubang atau dibakar dan masih belum memiliki TPA/TPS kampung;
10. Fasilitas mitigasi bencana yang sesuai karakteristik wilayah kampung sesuai hasil identifikasi kebencanaan masih belum menjadi perhatian dari pihak kampung;
11. Masih belum tersedianya pasar desa/kampung secara permanen;
12. Jumlah koperasi aktif dan BUMK yang masih belum optimal, BUMK belum menghasilkan pendapatan asli kampung;

13. Belum tersedianya profil masing-masing kampung.;

• **Solusi**

1. Perlu adanya kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana dimensi sosial, ekonomi dan ekologi/Lingkungan menjadi kekuatan yang saling mengisi;
2. Agar organisasi perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan indikator penilaian indek dsa membangun dapat memprioritaskan program kegiatan sehingga segala keterbatasan pada prasarana sosial dasar yang selama ini menjadi persoalan di tingkat kampung dapat teratasi dengan baik;
3. Mendukung pemerintahan kampung untuk membuat profil desa/kampung dan mengupdate data-data kampungnya secara berkala;
4. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada BUMK agar dapat aktif dan mampu menghasilkan pendapatan asli kampung dengan menggali potensi-potensi yang ada dikampungnya;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi aparatur kampung untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Faktor pendukung tercapainya indikator ini yaitu, sesuai hasil pengukuran Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) Di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dengan perkembangan dari tahun sebelumnya :

1. Adanya peningkatan status Kampung dari Tahun sebelumnya (2020) yaitu terdapat 9 Kampung Maju ke Mandiri dan 1 Kampung Berkembang ke Mandiri. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan 10 kampung mandiri;
2. Pemerintah Kampung telah dapat melihat apa saja yang menjadi kelemahan didalam penyelenggaraan kampungnya dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan didalam rencana kerja Pemerintahan Kampung dan APBKam melalui sumber daya dan dana yang tersedia yang telah dianggarkan pada tahun sebelumnya;
3. Adanya Evaluasi Penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bersama tenaga

ahli Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa ke Kecamatan dan Kampung-Kampung sangat membantu Pemerintah Kampung di dalam memenuhi Indikator Penilaian Indeks Desa.

4. Meningkatnya persentase BUMK yang aktif sebesar 46,48%.

6. Indeks Pembangunan Gender

Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Konsep	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia.
Rumusan	$IPG = IPM \text{ perempuan} / IPM \text{ laki-laki}$
Kegunaan	Untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan.
Keterangan	Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)
Interpretasi	Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-

laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

Untuk tahun 2021 sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, hasil evaluasi IPG tahun 2021 belum diumumkan oleh Badan Pusat Statistik Kutai Barat, oleh karena itu rekomendasi dan tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP menggunakan data hasil evaluasi tahun 2020.

Hasil Evaluasi IPG tahun 2020 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperoleh nilai **83,87**, Nilai tersebut mengalami kenaikan.

Tabel 3.54
**PROGRES PERKEMBANGAN IPG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018-2020**

IPG	2018	2019	2020
KUTAI BARAT	83,52	83,84	83,87

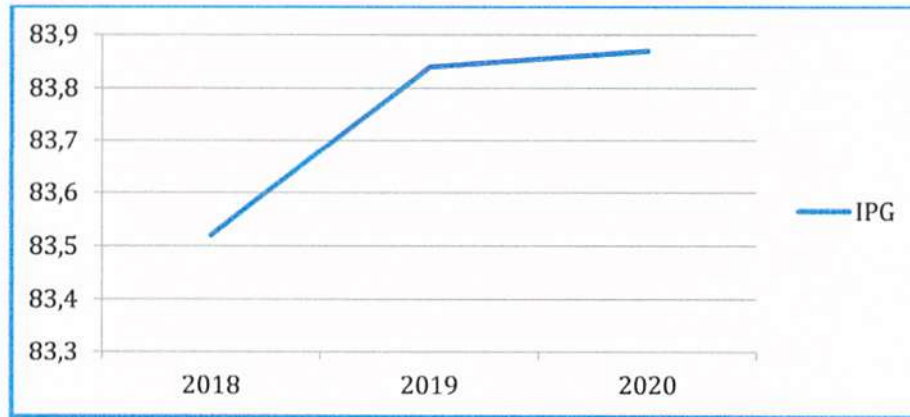
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.55
**REALISASI INDIKATOR IPG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018-2020**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Gender	83,52	83,84	83,87	83,87*

Sumber: Badan Pusat Statistik, Catatan/Note : *Data Tahun 2020

Grafik 3.19
**REALISASI INDIKATOR IPG
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018-2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel diatas IPG di Kabupaten Kutai Barat meningkat setiap tahunnya, dimana capaian pada tahun 2018 dengan nilai 83.52, pada tahun 2019 meningkat sebesar 0,32 dengan capaian nilai 83.84. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,03 dengan nilai 83.87.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengemban amanah mengkoordinir Indeks Pembangunan Gender. Secara umum seluruh program dan kegiatan yang selama tahun 2020 telah dapat dilaksanakan dengan baik. Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program /kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2020 sesuai dengan target.

Meskipun demikian Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah.

Secara teknis perlu dilakukan integrasi isu gender sebagai 'cross cutting issue' dalam dokumen RPJMD, di antaranya menuangkan data pilah, dasar hukum, bahkan IPG dan IDG telah dijadikan indikator keberhasilan pembangunan daerah.

SASARAN 8

MENINGKATNYA DAN MERATANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR

Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar mempunyai 3 (tiga) Indikator Kinerja yakni Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik dan Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait tiga indikator tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Kutai Barat dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Untuk menilai capaian Kinerja sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar melalui 3 indikator adalah **80,20 %** dengan predikat **BERHASIL** dapat dilihat pada rincian sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.56

CAPAIAN KINERJA SASARAN MENINGKATNYA DAN MERATANYA KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR DARI 3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	74,60%	69,95%	93,77	76,45%	77,79%	101,75	Melebihi Target
2	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	n.a	n.a	n.a	99,25%	85,60%	86,24	Tidak Tercapai
3	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	n.a	n.a	n.a	29%	15,26	52,62	Tidak Tercapai
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				93,77			80,20	Baik

Berikut Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dari 3 (tiga) Indikator yaitu :

1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak.

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi.

Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Infrastruktur pelayanan dasar untuk cakupan layanan air minum layak dan aman menjadi prioritas sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi kabupaten/ kota sesuai Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk

mendapatkannya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Penerapan SPM menjadi sangat penting dan mendasar karena pada hakekatnya dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud. Berdasarkan Permen PUPR nomor 29/PRT/M/2018 indikator capaian layanan air minum merupakan persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi. Pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari minimal 60 liter/org/hari dari sisi kuantitas air.

Capaian Kinerja dari Indikator “Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak” pada tahun 2021 adalah 101,75%, capaian ini dikategorikan melebihi target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2021 sebesar 76,45% dengan realisasinya sebesar 77,79%. Capaian tersebut didapat dari target 130.630 penduduk berakses air minum layak dari jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat sebanyak 170.871 penduduk, dengan realisasi sebanyak 132.936 penduduk berakses air minum layak.

Sementara bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2020 yakni 93,77% dari realisasi 69,95% dengan target 74,60% mengalami kenaikan sebesar 7,98%.

Berikut Rincian Data Cakupan Layanan Air Minum Sistem Perpipaan Perunit Pengolahan (WTP, IKK) di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 :

Tabel 3.57

**CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM SISTEM PERPIPAAN PERUNIT
PENGOLAHAN (WTP, IKK) KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**

NO	NAMA UNIT INFRASTRUKTUR	WILAYAH CAKUPAN LAYANAN	JUMLAH PENDUDUK TERFASILITASI
1	WTP 1 (Kota Sendawar)	Kecamatan Barong Tongkok	32.986
		Kecamatan Sekolaq Darat	10.656
		Kecamatan Melak	15.409
2	WTP 2	Kecamatan Tering	10.706

		Kecamatan Linggang Bigung	16.129
3	WTP Damai	Kecamatan Damai	10.807
4	WTP Muara Pahu	Kecamatan Muara Pahu	8.528
5	WTP Penyinggahan	Kecamatan Penyinggahan	3.927
6	WTP Tanjung Isuy	Kampung Tanjung Isuy	2.537
7	WTP Muara Nayan	Kampung Muara Nayan	269
8	WTP Muara Kedang	Kampung Muara Kedang	1.600
9	WTP Jambuk	Kampung Jambuk	2.175
10	WTP Muara Jawaq	Kampung Muara Jawaq	1.416
11	WTP Muara Lawa	Kecamatan Muara Lawa	7.380
12	WTP Siluq Ngurai	Kecamatan Siluq Ngurai	6.123
13	SPAM	Penambahan 2021	1.012
jumlah			131.660

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Rincian Data yang terfasilitasi SAB :

Tabel 3.58
DATA YANG TERFASILITASI SAB

NO	NAMA UNIT INFRASTRUKTUR	WILAYAH CAKUPAN LAYANAN	JUMLAH PENDUDUK TERFASILITASI
1	SAB Intu Lingau	Kampung Intu Lingau	361
2	SAB Merayaq	Kampung Merayaq	503
3	SAB Pepas Asa	Kampung Pepas Asa	412
JUMLAH PENDUDUK YANG TERFASILITASI			1.276

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Berdasarkan Data pada kedua tabel diatas ada beberapa sistem yang mencakup layanan air minum yang ada di Kabupaten Kutai Barat yakni WTP, SPAM dan SAB yang mencakup 131.660 penduduk yang menggunakan sistem perpipaan perunit pengelolaan (WTP) dan juga SPAM serta 1.276 yang menggunakan layanan SAB, untuk itu bila di jumlah keseluruhan jumlah penduduk yang terealisasi cakupan layanan air munim sebanyak 132.936 dari jumlah penduduk di Kabupaten Kutai

Barat yakni 170.871 di tahun 2021 ini.

Berikut daftar tabel dan grafik perkembangan realisasi dari Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak dari tahun 2018 sampai dengan 2021:

Tabel 3.59

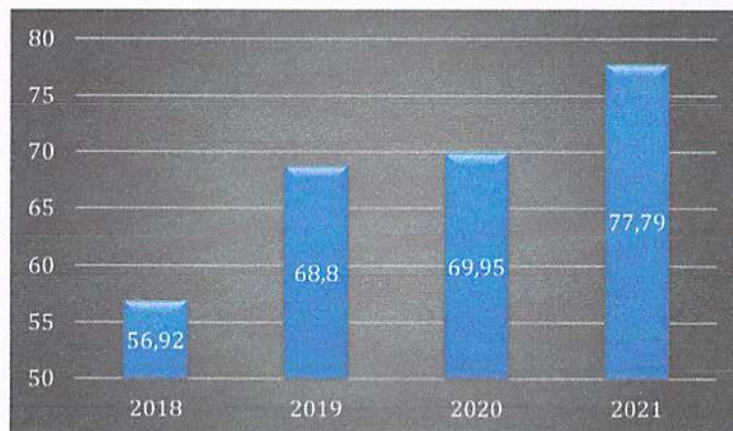
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM LAYAK
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 – 2021**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	56,92%	68,80%	69,95%	77,79%

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Grafik 3.20

**PERKEMBANGAN REALISASI INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK
BERAKSES AIR MINUM LAYAK KABUPATEN KUTAI BARAT
TAHUN 2018 – 2021**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berikut Rinciannya :

- ✓ Ditahun 2021 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 77,79% naik 7,84% dari tahun 2020 sebesar 69,95%,

- ✓ Ditahun 2020 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 69,95% naik 1,15% dari tahun 2019 sebesar 68,8%,
- ✓ Ditahun 2019 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 68,8% naik 11,88% dari tahun 2018 sebesar 56,92%.

Berikut Realisasi Kinerja dari Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.60
REALISASI KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM LAYAK TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	77,79%	100%	77,79%

Berdasarkan data pada tabel diatas Capaian Realisasi Kinerja dari Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 77,79%, capaian tersebut diraih dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 100% dan terealisasi sebesar 77,79%.

Faktor yang menjadi penghambat dan serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut :
 1. Dikarenakan Pandemi Covid tahun 2019-2020 yang menyebabkan adanya kebijakan relokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih diutamakan pada aspek kesehatan

dan ekonomi.

b. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar untuk air minum dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM),
2. Penyediaan layanan air minum layak sesuai target SPM.

Program yang menunjang Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik.

Realisasi Kinerja dari Indikator “Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik” pada tahun 2021 adalah 85,60% dari target yakni 99,25% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 86,24%, capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 sebesar 99,75% maka capaian kinerja ditahun 2021 ini mencapai 86,45%.

Berikut ini Data yang diambil dari Rasio Elektrifikasi UP3 Samarinda per Desember 2021 untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat adalah :

Jumlah Rumah Tangga yang terdata	: 50.308
Jumlah Pelanggan PLN	: 43.062
Persentase	: 85,60 %

Berikut tabel dan grafik Data Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur :

Tabel 3.61

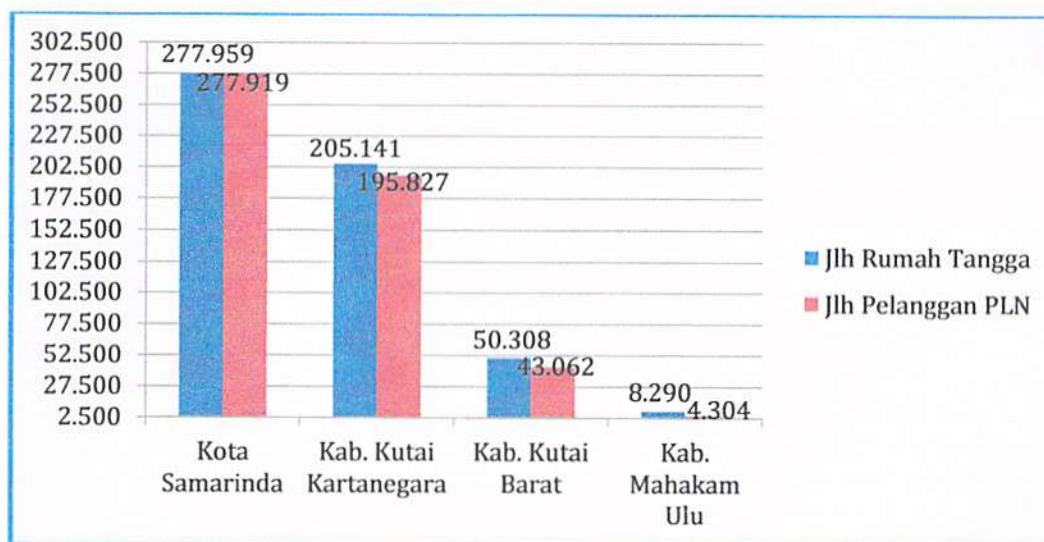
**RASIO ELEKTRIFIKASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Pelanggan PLN	Rasio (%)
1	Kota Samarinda	277.959	277.919	99,99
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	205.141	195.827	95,46
3	Kabupaten Kutai Barat	50.308	43.062	85,60
4	Kabupaten Mahakam Ulu	8.290	4.304	51,92
JUMLAH		541.698	521.112	96,19

Sumber : PLN UP3 Samarinda tahun 2021

Grafik 3.21

**RASIO ELEKTRIFIKASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas Rasio Elektrifikasi untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat yakni 85,60% dari jumlah rumah tangga sebanyak 50.308 terdapat jumlah pelanggan PLN sebanyak 43.062.

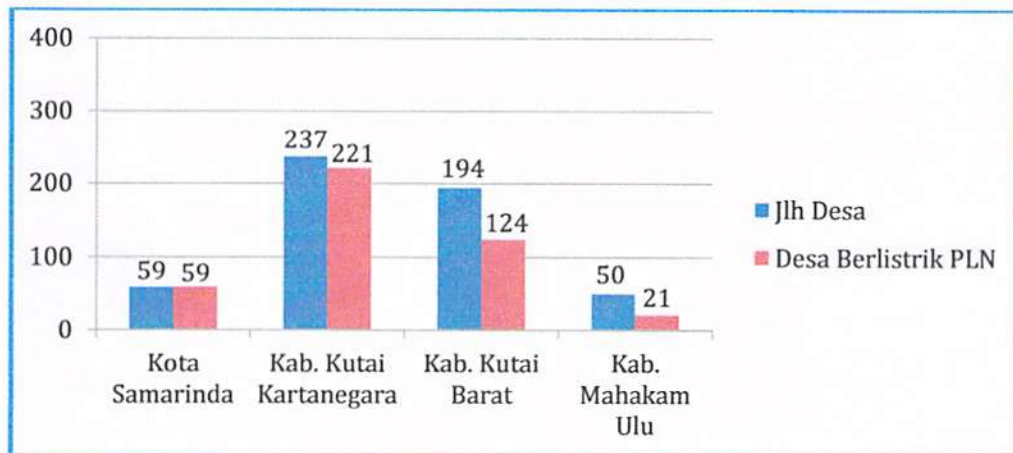
Berikut ini tabel dan grafik Data Rasio Desa Berlistrik menurut Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Januari 2022 adalah :

Tabel 3.62
**DATA RASIO DESA BERLISTRIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**

No	Kabupaten/Kota	Jlh Desa	Desa Berlistrik PLN	Desa Non PLN	Rasio (%)
1	Kota Samarinda	59	59	0	100
2	Kabupaten Kutai Kartanegara	237	221	16	93,25
3	Kabupaten Kutai Barat	194	124	70	63,91
4	Kabupaten Mahakam Ulu	50	21	29	42,00
JUMLAH		540	425	115	100

Sumber : PLN UP3 Samarinda tahun 2021

Grafik 3.22
**RASIO DESA BERLISTRIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas Rasio Desa Berlistrik khusus untuk Kabupaten Kutai Barat adalah 63,92% dihitung dari jumlah desa berlistrik PLN sebanyak 124 desa dibagi dengan jumlah desa Kabupaten Kutai Barat sebanyak 194 desa dikalikan dengan 100 % maka capaiannya adalah 63,91% serta desa yang berstatus non PLN ada 70 desa.

Berikut Realisasi Kinerja dari Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.63
**REALISASI KINERJA INDIKATOR PERSENTASE RUMAH TANGGA
PENGGUNA LISTRIK TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN
TARGET AKHIR RPJMD**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik	85,60%	99,75%	86,45%

Berdasarkan data pada tabel diatas Capaian Realisasi Kinerja dari Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 86,45%, capaian tersebut diraih dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 99,75% dan terealisasi sebesar 85,60%.

Faktor yang menjadi pendukung dan faktor penghambat serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

1. Pendukung Data dari Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Timur Melalui UP3 Samarinda sampai dengan Desember 2021 dan Rasio Desa Berlistrik Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Januari 2022.

b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya kewenangan Kabupaten/Kota terkait indikator persentase rumah tangga pengguna listrik sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang, Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Untuk memenuhi data dari indikator persentase rumah tangga pengguna listrik diambil data yang ada di Faktor Pendukung di poin (a).
- c. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatkan akses ketenagalistrikan berbasis energi baru terbarukan.
 2. Peningkatan upaya konservasi energi.

3. Berkurangnya Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Urusan Perumahan dan Pemukiman di Kabupaten Kutai Barat yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah terkait permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni (RTLH). Tercatat masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang tersebar di Kecamatan Barong, Sekolaq Melak, Damai, dan Muara Lawa. Untuk rumah tidak layak huni tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Barat. Berikut merupakan data luasan Kawasan permukiman kumuh dan jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat.

Realisasi Kinerja dari Indikator “Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)” pada tahun 2021 adalah 15,26% dari target yakni 29% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 52,62%, capaian ini dikategorikan tidak tercapai dari target yang diperjanjikan meski sudah mendapat bantuan dana dari provinsi dan juga dana DAK serta capaian tersebut didapat dari realisasi bantuan yang hanya bisa membangun 202 bangunan dari jumlah 1.323 RTLH yang ada di perkotaan.

Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Kutai Barat 2021-2026 sebesar 24% maka capaian kinerja ditahun 2021 ini mencapai 63,58%.

Berikut data luas kawasan permukiman kumuh dan jumlah RTLH di Kabupaten Kutai Barat:

Tabel 3.64
**DATA LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DAN JUMLAH RTLH
 DI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2021**

No	Jenis Data	Volume	Satuan	Keterangan
1	Luas Kawasan Permukiman	8.024,17	Ha	16 Kecamatan
2	Luas Kawasan Permukiman Perkotaan	3.459,45	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak
3	Luas Kawasan Permukiman Kumuh sesuai SK. Bupati No. 592/K.425?2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	1.045,63	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak, Damai, Muara Lawa.
4	Kumuh Perkotaan sesuai SK. No. 592/K.425?2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	662,15	Ha	Barong Tongkok, Sekolaq Darat, Melak
5	Kumuh Pedesaan sesuai SK. No. 592/K.425?2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh	423,48	Ha	Muara Lawa, Damai
6	Jumlah Rumah Se- Kabupaten Kutai Barat	33.326	Unit	16 Kecamatan
7	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Se- Kabupaten Kutai Barat	9.329	Unit	16 Kecamatan
8	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Perkotaan	1.323	Unit	Barong, Sekolaq Darat, Melak

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tahun 2021

Berikut tabel perkembangan realisasi dari Indikator Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari tahun 2018 sampai dengan 2021:

Tabel 3.65
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
BERKURANGNYA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 – 2021**

Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021
Berkurangnya RTLH	n.a	n.a	n.a	2,16%

Berikut Realisasi Kinerja dari Indikator Berkurangnya RTLH di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD:

Tabel 3.66
**REALISASI KINERJA INDIKATOR BERKURANGNYA RTLH TAHUN
2021 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	15,26	24%	63,58

Berdasarkan data pada tabel diatas Capaian Realisasi Kinerja dari Indikator Berkurangnya RTLH di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 9%, capaian tersebut diraih dari target akhir RPJMD 2021-2026 sebesar 24% dan terealisasi sebesar 2,16%.

Faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Berkurangnya RTLH adalah sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

1. Adanya bantuan dari dana provinsi dan juga dana DAK.

b. Faktor yang menghambat Capaian Indikator adalah sebagai berikut:

1. Dikarenakan Pandemi Covid tahun 2019-2020 yang menyebabkan adanya kebijakan relokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih diutamakan pada aspek kesehatan dan ekonomi.

c. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Bantuan stimulan rumah layak huni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan pembiayaan perumahan Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),

2. Optimalisasi upaya pembenahan pemukiman dan rumah tidak layak huni.

Program yang menunjang Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah sebagai berikut :

a. Program Pengembangan Perumahan

b. Program Kawasan Pemukiman

SASARAN 9

TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PENOPANG KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN

Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja yakni Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dan Cakupan Layanan Telekomunikasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas terkait indikator-indikator tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk menilai Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan melalui 2 Indikator adalah **126,87%** dengan predikat **MELAMPAUI TARGET** dapat dilihat pada rincian sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 3.67

CAPAIAN KINERJA SASARAN TERSEDIANYA INFRASTRUKTUR PENOPANG KEGIATAN EKONOMI KERAKYATAN DARI 2 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020			Tahun 2021			Nilai Capaian
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	55,7%	55,7%	100%	56%	68,77%	122,8%	Melebihi Target
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	38%	36,59%	96,28%	43%	56,31%	130,95%	Melebihi Target
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran				98,14%			126,87%	Melampaui Target

Berikut Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dari 2 (dua) Indikator yaitu :

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap.

Urusan pekerjaan umum merupakan urusan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik. Selama beberapa tahun terakhir pembangunan fisik di Kutai Barat menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, dan pemerintah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang mampu mendukung aktivitas masyarakat, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi. Perkuatan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Infrastruktur Pelayanan Dasar berupa penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau, penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, keselamatan dan keamanan transportasi, dan pembangunan jaringan irigasi. Sedangkan infrastruktur ekonomi dengan prioritas pada konektivitas jalan untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Selain itu, infrastruktur ketenagalistrikan dan transformasi digital juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan serta penuntasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Infrastruktur jalan menjadi prioritas utama yang terus dibangun di Kutai Barat. Kondisi jalan yang baik akan sangat mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa sehingga akan berpengaruh pada berjalannya roda perekonomian daerah dengan lancar.

Pembangunan infrastruktur jalan di Kutai Barat, sesuai target RPJMD untuk mewujudkan jaringan jalan dalam kondisi mantap. Menurut kriteria Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, jalan dalam kondisi mantap adalah jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang.

Prioritas pembangunan jalan adalah jalan yang mampu meningkatkan akses masyarakat antar wilayah, sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa di Kutai

Barat. Selain itu, pembangunan jalan diharapkan mampu mengatasi keterisoliran beberapa kampung atau daerah yang terjadi selama ini. Kelancaran akses antar wilayah akan mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga tingkat ketimpangan pembangunan dan kondisi sosial ekonomi yang ada di antara wilayah dapat direduksi.

Realisasi Kinerja dari Indikator “Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap” pada tahun 2021 adalah 68,77% (883,12 Km) dari target yakni 56,31% (723,04 Km) yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 122,8%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Dan juga capaian tersebut diraih dari kondisi jalan di Kabupaten Kutai Barat dalam kondisi baik/mantap adalah 783,23 Km dan yang sedang 99,89 Km jadi jumlah keseluruhan jalan di Kabupaten Kutai Barat dalam kondisi baik/mantap dan kondisi sedang adalah 883,12 Km dari panjang jalan di Kabupaten Kutai Barat 1.283,99 Km.

Sementara bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2020 yakni 100% dari realisasi 55,7% dengan target 55,7%, capaian yang dicapai ditahun ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi yakni 22,8% dari tahun sebelumnya.

Berikut Rincian Data Panjang Jalan di Kabupaten Kutai Barat Menurut Status Tahun 2021 :

Tabel 3.68
**PANJANG JALAN DI KABUPATEN KUTAI BARAT
MENURUT STATUS TAHUN 2021**

NO	STATUS JALAN	PANJANG JALAN (KM)
1	Jalan Nasional	269,75
2	Jalan Provinsi	-
3	Jalan Kabupaten	1.283,99
4	Jalan Desa/Kampung	892,2
5	Jalan Non Status	1.812 (Jalan Tambang/Sawit)

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Berdasarkan pada tabel diatas yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang panjang jalan Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 adalah 1.284,99 Km, Jalan Nasional 269,75 Km, jalan Desa/Kampung 892,2 Km dan jalan Non Status (jalan tambang/sawit) 1.812 Km. Sedangkan untuk jalan Provinsi 0 Km.

Berikut Rincian Data Rekapitulasi Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 :

Tabel 3.69
**REKAPITULASI KONDISI JALAN
DI KABUPATEN KUTAI BARATTAHUN 2021**

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)
1	Baik/Mantap	783,23
2	Sedang	99,89
3	Rusak Ringan	34,09
4	Rusak Sedang	22,66
5	Rusak Berat	24,11
6	Tanah	320,03

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Untuk Rekapitulasi Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 yakni kondisi jalan baik/mantap 783,23 Km, sedang 99,89 Km, rusak ringan 34,09 Km, rusak sedang 22,66 Km, rusak berat 24,11 dan jalan masih tanah 320,03 Km.

Berikut tabel perkembangan realisasi dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dari tahun 2019 sampai dengan 2021 :

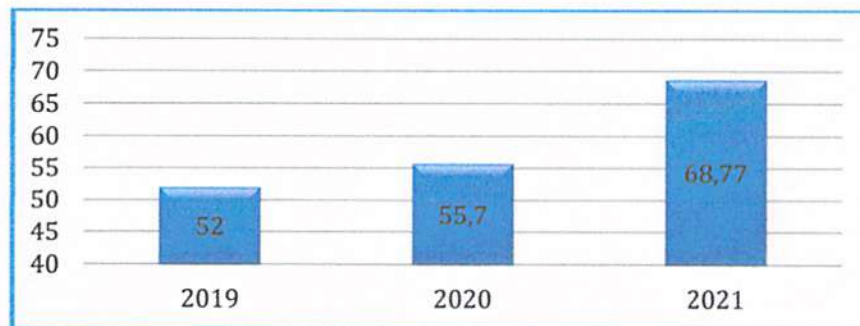
Tabel 3.70
**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN KUTAI BARAT
DALAM KONDISI MANTAP TAHUN 2019 – 2021**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	52%	55,7	68,77

Sumber : DPUPR Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021

Berikut Grafik perkembangan realisasi dari Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap dari tahun 2019 sampai dengan 2021 :

Grafik 3.23
**PERKEMBANGAN REALISASI INDIKATOR PROPORSI PANJANG
JARINGAN JALAN KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM KONDISI
MANTAP TAHUN 2019 – 2021**



Berdasarkan tabel dan grafik diatas perkembangan realisasi dari indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Berikut Rinciannya :

- ✓ Ditahun 2021 realisasi Indikator Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantab sebesar 68,77% naik 13,7% dari tahun 2020 sebesar 55,7%,
- ✓ Ditahun 2020 realisasi Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak sebesar 55,7% naik 3,7% dari tahun 2019 sebesar 52%,

Berikut Realisasi Kinerja Indikator Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap di tahun 2021 Dibandingkan Dengan Target RPJMD :

Tabel 3.71

REALISASI KINERJA INDIKATOR PROPORSI PANJANG JARINGAN JALAN KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM KONDISI MANTAP TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJMD

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	68,77%	75,20%	91,44%

Untuk Perbandingan dari Indikator Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap dengan target RPJMD ditahun 2021 ini mencapai 91,44% dari target akhir RPJMD 75,20% dengan realisasi 68,77%.

Faktor yang menjadi penghambat dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap adalah sebagai berikut :

a. Faktor penghambat capaian indikator adalah sebagai berikut :

1. Pandemi Covid tahun 2019-2020 lalu menyebabkan adanya kebijakan realokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih diutamakan pada aspek kesehatan dan ekonomi,
2. Selain itu kondisi geografis Kutai Barat serta jarak antar kecamatan merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengerasan jalan.

b. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah :

1. Mengembangkan konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan yang masih terbatas,

2. Peningkatan cakupan layanan infrastruktur dasar dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Program yang menunjang Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Proporsi Jaringan Jalan Kabupaten Kutai Barat Dalam Kondisi Mantap adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Cakupan Layanan Telekomunikasi.

Realisasi Kinerja dari Indikator “Cakupan Layanan Telekomunikasi” pada tahun 2021 adalah 56% dari target yakni 43% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kabupaten Kutai Barat dengan capaian kinerjanya adalah 130,23%, capaian ini melebihi dari target yang diperjanjikan. Hal ini dicapai dari Desa/Kampung yang bisa mengakses internet dan jumlah Desa/Kampung yang tercoverage layanan telekomunikasi pada tahun 2021 yang ditargetkan sebanyak 82 Desa/Kampung (43%) terealisasi sebanyak 107 Desa/Kampung (56%).

Jumlah Realisasi 107 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet pada tahun 2021 ini menurut Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat adalah :

- Sebanyak 30 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet oleh Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI)
- Sebanyak 3 Desa/Kampung yang bisa mengakses internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.
- Sebanyak 74 Desa/Kampung yang tercoverage layanan telekomunikasi.

Sementara bila dibandingkan dengan Capaian Kinerja pada tahun 2020 yakni 96,28% dari realisasi 36,59% dengan target 38%.

Berikut ini Jumlah Desa/Kampung yang bisa mengakses internet Oleh Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) serta oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 :

Tabel 3.72
**JUMLAH DESA/KAMPUNG YANG BISA
MENGAKSES INTERNET TAHUN 2021**

NO	NAMA KAMPUNG	KECAMATAN	TITIK KOORDINAT	
			LATITUDE	LONGITUDE
1	Anan Jaya	Bentian Besar	S00°53'20.23'	E115°40'42.15"
2	Jelmuk Sibak	Bentian Besar	S00°53'39.4"	E115°44'26.8"
3	Abit	Mook Manar Bulatn	S00°14'10.1"	E116°00'37.5"
4	Muara Kalaq	Mook Manar Bulatn	S00°06'13.9"	E115°46'25.2"
5	Cakaq Tada	Mook Manar Bulatn	S00°15'25.725"	E115°52'44.844"
6	Muyub Ulu	Tering	S00°01'15.6"	E115°42'28.7"
7	Tukul	Tering	S00°00'23.0"	E115°41'47.0"
8	Gabung Baru	Tering	S00°01'44.1"	E115°42'52.5"
9	Deraya	Bongan	S00°55'04.7"	E116°09'16.5"
10	Gerunggung	Bongan	S00°59'27.0"	E116°08'50.7"
11	Muara Siram	Bongan	S00°44'51.5"	E116°10'46.2"
12	Pering Taliq	Bongan	S00°48'59.8"	E116°15'32.4"
13	Resaq	Bongan	S00°41'45.05"	E116°10'44.76"
14	Lemper	Bongan	S00°54'50.55"	E116°08'59.47"
15	Tanjung Soke	Bongan	S00°59'08.46"	E116°08'54.56"
16	Lumpat Dahuq	Damai	S00°26'25.5"	E115°38'13.7"
17	Muara Tokong	Damai	S00°24'03.3"	E115°37'59.1"
18	Kelian	Damai	S00°23'18.15"	E115°35'32.12"
19	Randa Empas	Bentian Besar	S00°03'27.12"	E115°45'05.28"
20	Kelian Luar	Long Iram	S00°01'00.65"	E115°31'48.19"
21	Keliwai	Long Iram	N00°00'45.1"	E115°36'32.6"
22	Long Daliq	Long Iram	S00°00'55.745"	E115°36'42.903"
23	Ujoh Halang	Long Iram	N00°01'24.3"	E115°33'05.7"
24	Lakan Biulem	Nyuatan	S00°13'45.2"	E115°20'46.2"
25	Sentalar	Nyuatan	S00°22'55.55"	E115°32'13.01"
26	Kendesiq	Silug Ngurai	S00°53'11.8"	E115°57'31.3"
27	Muara Ponak	Silug Ngurai	S00°40'31.97"	E115°57'44.98"
28	Penawang	Silug Ngurai	S00°46'31.50"	E115°54'06.39"
29	Rikong	Silug Ngurai	S00°42'180"	E115°56'761"

30	Kenyanyan	Siluq Ngurai	S00°37'36.0"	E115°56'03.8"
31	Lendian	Siluq Ngurai	S00°57'55.20"	E115°51'54.87"
32	Suakong	Bentian Besar	S00°46'39.0"	E115°46'02.1"
33	Tukuq	Bentian Besar	S00°52'42.2"	E115°44'45.1"

Sumber Data : Dinas Komunikasi dan Informatika

Berikut data rincian luas wilayah yang tercoverage layanan komunikasi di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 :

- ✓ Luas Wilayah Kabupaten Kutai Barat : 20.385 Km²
- ✓ Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat : 16 Kecamatan
- ✓ Jumlah Kampung di Kabupaten Kutai Barat : 190 Kampung
- ✓ Jumlah Kampung yang Tercoverage : 74 Kampung
- ✓ Jumlah Kampung yang kekuatan sinyalnya (lemah) : 83 Kampung
- ✓ Jumlah Kampung Blankspot : 38 Kampung

Berikut tabel dan grafik perkembangan realisasi dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2019 sampai dengan 2021 :

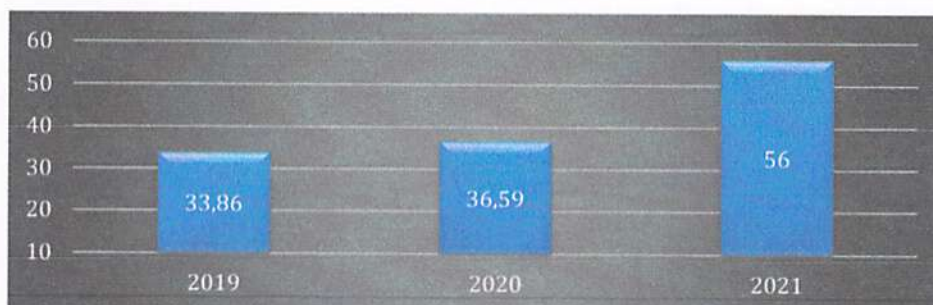
Tabel 3.73

**PERKEMBANGAN REALISASI DARI INDIKATOR
CAKUPAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2021**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Cakupan Layanan Telekomunikasi	33,86%	36,59%	56%

Grafik 3.24

**PERKEMBANGAN REALISASI INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN
TELEKOMUNIKASI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 – 2021**



Berdasarkan Tabel dan Grafik diatas realisasi dari Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 ini sangat meningkat drastis dari 2 tahun sebelumnya karena adanya penambahan Desa/Kampung yang tercoverage layanan internet yakni 33 Desa/Kampung diantaranya 30 Desa/Kampung oleh Badan Aksibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) sedangkan 3 Desa/Kampung yang yang bisa mengakses internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat.

Berikut Realisasi Kinerja Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD :

Tabel 3.74

**REALISASI KINERJA INDIKATOR CAKUPAN LAYANAN
TELEKOMUNIKASI TAHUN 2021 DIBANDINGKAN
DENGAN TARGET AKHIR RPJMD**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021	Target Akhir RPJMD	Capaian (%)
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	56%	68%	82,35%

Berdasarkan Tabel diatas Capaian realisasi kinerja indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dibandingkan dengan target akhir RPJMD mencapai 82,35% dari target akhir RPJMD 68% terealisasi sebesar 56% di tahun 2021 ini.

Faktor yang menjadi penghambat dan faktor pendukung serta strategi yang dilakukan dalam pencapaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan dengan Indikator Cakupan Layanan Telekomunikasi adalah sebagai berikut :

- a. Faktor penghambat capaian indikator adalah sebagai berikut :
Pandemi Covid tahun 2019-2020 lalu menyebabkan adanya kebijakan realokasi anggaran sehingga perhatian pemerintah lebih

diutamakan pada aspek kesehatan dan ekonomi,

- b. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian indikator adalah :
1. Mengembangkan konektivitas di daerah tertinggal dan antar kawasan yang masih terbatas,
 2. Meningkatkan sistem pelayanan administrasi kewilayahan.

Program yang menunjang Sasaran Meningkatnya dan Meratanya Kualitas Infrastruktur Dasar dengan Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak adalah sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (result oriented government), Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui 48 (Empat Puluh Delapan) Perangkat Daerah yang ada, telah berusaha memaksimalkan Sumber Daya Manusia dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa target yang telah ditetapkan tersebut ada pencapaian kinerjanya yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Ini adalah salah satu bentuk efisiensi penggunaan anggaran yang patut dibanggakan karena target yang telah ditetapkan dapat dilampaui dengan menggunakan Sumber Daya yang ada. Dari 9 (Sembilan) Sasaran Strategis yang ada sebanyak 5 (lima) sasaran yang pencapaian kinerjanya diatas 100% dengan Rata-rata Tingkat Efisiensi sebesar **47,54 %** dengan nilai **Rp 100.934.373.748,28**. Untuk lebih jelasnya terkait penghitungan efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.75
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Efisiensi (Rp)	Realisasi %	Efisiensi %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (3-7)
1	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah berbasis kluster terhadap perekonomian daerah	157,36%	59.838.685.770,00	50.688.081.093,00	9.150.604.677,00	84,71	72,65
2	Terciptanya Lapangan Kerja Baru dan Wirausahawan Lokal baru	142,40	2.600.489.400,00	2.104.645.986,00	495.852.414,00	80,93	61,47
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	101,66	111.632.998.360,00	81.897.260.915,51	29.735.737.444,49	73,36	28,30
4	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	100,19	219.092.227.507,00	158.221.439.058,21	60.870.788.448,79	72,22	27,97
5	Tersedianya Infrastruktur Penopang Kegiatan Ekonomi Kerakyatan	126,87	3.332.921.849,00	2.651.531.085,00	681.390.764,00	79,56	47,31
	Jumlah		396.497.331,886,00	295.562.958.137,72	100.934.373.748,28	Rata-Rata	47,54

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam menjabarkan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja serta Target yang harus dicapai dalam setiap tahunnya. Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pada RPJMD 2021-2026 terdapat Program dan Kegiatan yang disiapkan untuk melaksanakan Visi dan Misi Bupati Kutai Barat 2021-2026. Pada Tahun 2021 berdasarkan RKPD tahun 2021 terdapat **293** Program dan **836** Kegiatan yang diselenggarakan ke seluruh Perangkat Daerah untuk mencapai target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

Dari **293** Program dan **836** Kegiatan pada tahun 2021 sebanyak **181** Program dan **379** Kegiatan yang dialokasikan untuk merealisasikan target dalam 23 Indikator Kinerja Utama dari 9 Sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026. Untuk lebih jelasnya terkait program dan kegiatan yang dianggarkan dengan mengacu pada tercapainya target dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.76

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Nilai Efisien (Rp)	%	Total Program / Kegiatan yang dianggarkan		Jumlah Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk Mencapai Sasaran		Keterangan
					Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	61.434.011.763,00	44.806.850.677,00	16.627.161.086,00	72,93	5	4	4	5	Sekretariat DPRD
2	142.237.314.485,00	111.692.319.602,00	30.544.994.883,00	78,53	3	19	2	6	SETKAB
3	14.602.270.999,00	12.099.158.113,00	2.503.112.886,00	82,86	6	12	5	5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
4	12.915.428.352,00	10.547.092.753,00	2.368.335.599,00	81,66	2	10	1	4	BKPSDM
5	23.017.552.271,00	8.863.409.054,00	14.154.143.217,00	38,51	2	6	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	707.271.251.517,00	352.015.761.666,20	355.255.489.850,80	49,77	3	14	2	6	BKAD
7	22.110.067.689,00	16.419.110.183,00	5.690.957.506,00	74,26	12	57	4	21	BAPELITBANGDA
8	27.535.702.044,00	20.527.197.889,00	7.008.504.155,00	74,55	9	34	1	8	BAPENDA
9	15.214.516.026,00	12.954.275.345,00	2.260.240.681,00	85,14	5	11	4	5	Dinas Perikanan
10	11.647.113.471,00	9.768.754.276,00	1.878.359.195,00	83,87	3	12	2	6	Dinas Pemuda dan Olahraga
11	42.920.942.935,00	26.729.405.783,00	16.191.537.152,00	62,28	11	20	10	14	Dinas Lingkungan Hidup
12	8.821.086.381,00	7.239.062.712,00	1.582.023.669,00	82,07	5	13	4	6	Dinas Ketahanan Pangan
13	453.017.579.548,00	361.736.014.749,60	91.281.564.798,40	79,85	8	21	7	14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	10.128.178.821,00	8.646.811.371,00	1.481.367.450,00	85,37	4	11	3	5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15	18.577.512.703,00	16.464.100.311,00	2.113.412.392,00	88,62	3	22	2	9	Dinas Perhubungan
16	18.515.738.015,00	15.265.174.485,00	3.250.563.530,00	82,44	3	10	2	3	Inspektorat Daerah
17	18.667.769.281,00	16.507.925.239,54	2.159.844.041,46	88,43	4	12	3	5	Dinas Pariwisata
18	10.365.365.776,00	8.638.144.144,00	1.727.221.632,00	83,34	5	10	7	20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19	10.796.637.295,00	9.664.844.409,00	1.131.792.886,00	89,52	6	13	5	6	DPMPTSP
20	453.332.159.941,00	334.142.540.218,21	119.189.619.722,79	73,71	5	23	4	14	Dinas Kesehatan
21	7.850.456.711,00	6.994.006.065,00	856.450.646,00	89,09	3	12	2	5	Dinas Arsip & Perpustakaan
22	15.576.823.808,00	12.779.220.853,76	2.797.602.954,24	82,04	9	25	8	18	KB
23	11.885.986.626,00	10.259.595.394,00	1.626.391.232,00	86,32	3	10	2	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	28.250.184.301,00	26.093.686.298,00	2.156.498.003,00	92,37	4	13	3	12	Satpp
25	16.670.317.979,00	14.097.259.684,00	2.573.058.295,00	84,57	21	43	15	22	Disdakp-UKM
26	79.479.759.844,00	68.400.688.326,00	11.079.071.518,00	86,06	6	13	5	8	Dinas Pertanian
27	20.114.170.021,00	13.588.830.318,00	6.525.339.703,00	67,56	5	10	4	4	DPMK
28	522.531.165.615,00	480.862.979.264,48	41.668.186.350,52	92,03	21	59	13	35	DPU&PR
29	13.425.880.245,00	8.864.296.794,00	4.561.583.451,00	66,02	15	64	9	37	Dinas Sosial
30	38.928.476.422,00	29.484.923.238,00	9.443.553.184,00	75,74	6	8	4	6	Disperkim
31	107.087.055.085,00	82.243.001.118,00	24.844.053.967,00	76,80	93	237	41	65	16 Kecamatan
	2.944.928.475.970,00	2.158.396.440.333,79	786.532.035.636,21	73,29	290	828	179	377	

BAB IV PENUTUP

Penyusunan LKjIP Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 ini merupakan bentuk perekaman kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan membandingkan antara rencana dan realisasi serta melakukan penajaman sasaran strategis lewat indikator-indikator sasaran yang ditetapkan. Sudah menjadi konsekuensi bagi daerah hasil pemekaran yang terbentuk tahun 1999 ini memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar pelayanan terhadap masyarakat sebagai agenda pembangunan selain usaha pengentasan kemiskinan sebagai prioritas. Hal ini dimaklumi mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kutai Barat dengan kampung-kampung yang terpencar dan sulitnya mengakses daerah-daerah tertentu. Meski secara umum pengukuran kinerja program dan kegiatan yang dijalankan masing-masing Perangkat Daerah dianggap berhasil, namun pembangunan dirasakan masih menyisakan kekurangan dan kelemahan terutama pada sisi perencanaan dan usaha pencapaian dari target yang dikehendaki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Seiring dengan terjadinya musibah global dan nasional yaitu pandemi covid-19 memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha berada pada angka **-2,92%**. Berkat upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan dukungan dari masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19, perlahan-lahan sektor ekonomi di Kutai Barat berangsur membaik, dimana berdasarkan data dari BPS Laju Pertumbuhan Ekonomi Kutai Barat tahun 2021 meningkat menjadi **4.8%**. Tentunya ini berdampak pada rasa optimis masyarakat dan

pemerintah Kabupaten Kutai Barat akibat badai pandemi covid-19 untuk bangkit dan terus berbenah untuk membangun daerah ini.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kutai Barat yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun dibalik keberhasilan yang dicapai Pemerintah Kutai Barat, masih dijumpai berbagai hambatan baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mempersiapkan strategi-strategi yang diupayakan untuk pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, indikator-indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun Pertama RPJMD 2021 – 2026, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, kompetensi SDM dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun program kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan selama tahun 2021, senantiasa memperhatikan urusan yang menjadi prioritas baik karena tuntutan peraturan perundangan maupun karena kebutuhan sejatinya masyarakat seperti urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum (infrastruktur) dan lain sebagainya yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan itu, upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik terus dibenahi dan ditingkatkan. Dan upaya ini dinilai berhasil oleh pemerintah, sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2021 berhasil meraih penghargaan antara lain :

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** selama 5 tahun berturut-turut dari BPK dan Kementerian Keuangan Republik

- Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. **Predikat B** (baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi untuk Bidang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 3. **Predikat Kepatuhan Tinggi** Tahun 2021 dengan Nilai 89,80 Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai Undang – Undang no. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dari OMBUDSMAN Republik Indonesia;
 4. **Top 45 Inovasi Pelayanan Publik** Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi Teka - Teki (Tekan dan Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi);
 5. **Peringkat Pratama Kabupaten Layak Anak** Tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
 6. **Anugrah Desa Wisata** Desa Wisata Linggang Melapeh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. **TPID Award Tahun 2021** kategori TPID NON IHK (Indeks Harga Konsumen) berprestasi tingkat Kabupaten/Kota se-Kaltim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 8. **Panji Keberhasilan (Terbaik I)** dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Bidang Dekranasda;
 9. **Terbaik II Bidang Industri** Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 10. **Terbaik II Bidang Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat** Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 11. **Terbaik III Bidang Perdagangan** Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 12. **Terbaik III Bidang Pelayanan Publik** Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 13. **Terbaik III Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman** Tahun 2021 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa dalam kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat, Bapak FX. Yapan, SH dan H. Edyanto Arkan, SE telah berhasil melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang merupakan salah satu cita-cita otonomi daerah.

Terlepas dari keberhasilan tersebut diatas, tidak sedikit pula program dan kegiatan yang ditetapkan seringkali tidak mencapai target karena banyaknya kendala atau permasalahan yang dihadapi. Hal inilah yang kemudian memberi ruang yang seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembinaan dan pengawasan dalam perbaikan penyelenggaraan otonomi daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran pembangunan melalui LKjIP ini, masih terdapat ada beberapa indikator kinerja sasaran yang belum tercapai secara maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Belum adanya sinkronisasi antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD yang selanjutnya dituangkan dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Target yang ditetapkan dalam RKPD belum diaktualisasikan sesuai anggaran APBD sehingga target capaian kinerja sasaran belum selaras.
2. RPJMD belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam mengevaluasi capaian indicator kinerja karena ada beberapa indikator yang ditetapkan bukan merupakan indicator *outcome*, target yang tidak realistis, satuan indicator dan indikator yang seharusnya penting belum dimasukkan dalam RPJMD.
3. Ada beberapa indikator kinerja sasaran tidak didukung ketersediaan data. Indikator Kinerja Utama sebagai instrument untuk mengukur pencapaian sasaran belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing Perangkat Daerah, dan belum adanya petunjuk teknis dari beberapa penerapan SPM sehingga Perangkat Daerah belum dapat menggali data profil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya.

4. Pemahaman oleh masing-masing Perangkat Daerah terhadap ketentuan pedoman Penyusunan LKjIP masih kurang sehingga penyusunan LKjIP belum memberikan hasil optimal.
5. Rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB untuk SAKIP Kabupaten dan oleh Inspektorat Daerah untuk SAKIP Perangkat Daerah belum sepenuhnya ditindaklanjuti dengan baik, sehingga belum terlihat kemajuan yang berarti dalam penerapan SAKIP terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Dalam upaya mengatasi masalah dan hambatan tersebut, maka strategi yang dapat ditempuh yaitu :

1. Mengadakan evaluasi pada target-target yang telah ditetapkan di RPJMD sehingga ada sinkronisasi antara RKPD dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.
2. Memacu penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara penuh, yaitu SKPD selain menyusun Renstra, Perjanjian Kinerja dan LKjIP juga harus menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Aksi atas pelaksanaan kinerja yang akan diwujudkan.
3. Menyelenggarakan pendampingan (*coaching clinic*) Penguatan Akuntabilitas dengan mengundang Narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk peningkatan SDM Aparatur sehingga pengetahuan dan pemahaman terkait implementasi SAKIP agar kedepan akan memberikan dampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
4. Peningkatan kapasitas SDM para evaluator LKjIP dengan mengikuti Bimtek Evaluasi LKjIP di luar daerah atau mengundang Narasumber

dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

5. Memberikan *reward* kepada Perangkat Daerah yang meraih poin tertinggi pada implementasi SAKIP sehingga akan memacu Perangkat Daerah yang lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk meningkatkan kualitas penerapan SAKIP dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 ini disusun, dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sendawar, 24 Maret 2022
BUPATI KUTAI BARAT

FX, YAPAN, SH